



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PPATK's Integrity to Guard Indonesia's Asta Cita

INTEGRITAS PPATK

Mengawal Asta Cita Indonesia

Laporan Tahunan | Annual Report
2024



INTEGRITAS PPATK MENGAWAL ASTA CITA INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN 2024

PPATK's Integrity To Guard Indonesia's Asta Cita

Annual Report 2024

Supervisory Official: Supriadi (Head of INTRAC AML-CFT Empowerment Partnership Center)

Coordinator: Andi Emil Hidayat

Editorial Team: Putri Artika R, Sani Nuraida, Irwansyah, Bachtiar Amri, Adeck Herwin Indriani

Layout Designer: Mulyana, Imam Apriyogo

Ilustrasi Sampul: Hans Art Id

Contributor: Tri Andriyanto, Dyah Ferawati, Dinda Ulfa Sri Rejeki, Wendhiarto Arief Digdoyo, Kristina Widhi Prasetyanti, Tri Indah Purwanti, Otniel Yustitia Kristian, Arya Hendro Yudo, Retno Dwi Larasati, Muhammad Miftah Farid, Dwiki Krisna Saputra, Ratih Putri Pertiwi, Shanti Dewi Siawanta, Aulia Riskafina Kusuma

Quality Assurance: Ellya Sulistiyani

21x21 cm - x,104 pages

ISSN : 2623-2766

SK Nomor 0005.26232766/Jl.3.1/SK.ISSN/2018.09

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat

www.ppatk.go.id



**Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar,
kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman.
Namun tidak jujur sulit diperbaiki.**

*Lack of intelligence can be improved through learning,
and lack of skill can be overcome with experience.
But dishonesty is difficult to fix.*

~ Mohammad Hatta

Daftar Isi
CONTENTS

Kata Pimpinan (<i>Leadership Message</i>)	VI	(<i>The Gatekeepers of The House Of Integrity</i>)	36
Apa itu Asta Cita? (<i>What Is Asta Cita?</i>)	1	Denyut Teknologi Informasi Di Jantung PPATK	
Peran Rezim APUPPT dalam Asta Cita		(<i>The Pulse of Information Technology at</i>	
(<i>The Role Of The Anti-Money Laundering And</i>		<i>The Heart of PPATK</i>)	38
Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) Regime		Pengawas Integritas (<i>Guardians Of Integrity</i>)	40
In Asta Cita)	3		
Pentingnya Integritas dalam Asta Cita (<i>The</i>			
<i>Importance Of Integrity In Achieving Asta Cita</i>)	6		
		CHAPTER 3 - CONTRIBUTING INTEGRITY	
		Kontributor Integritas (<i>Contributing Integrity</i>)	46
		Pilar yang Menopang Rumah Kebenaran (<i>The Pillars</i>	
		<i>That Uphold the House of Truth</i>)	47
		Patuh itu Baik: Menjaga Garis Lurus (<i>Compliance is</i>	
	10	<i>Virtue: Upholding the Straight Path</i>)	49
		Memperkuat Pilar Rumah: Pembinaan	
		Pihak Pelapor (<i>Strengthening the Pillars of the House:</i>	
	12	<i>Guiding the Reporting Entities</i>)	50
	14		
Budaya Kerja ASN		Mengisi Rumah dengan Pengetahuan: Bimbingan	
Struktur Organisasi (<i>Organizational Structure</i>)	16	Teknis (<i>Filling the Home with Knowledge:</i>	
		<i>Technical Guidance</i>)	52
		Menjaga Ketegasan dalam Rumah:	
	20	Sanksi dan Teguran (<i>Filling the Home with</i>	
		<i>Knowledge: Technical Guidance</i>)	53
		Ketika Publik Bersuara: Peran	
	26	Pengaduan Masyarakat (<i>When the Public Speaks:</i>	
		<i>The Role of Public Complaints</i>)	54
	29		
Sumber Daya Keuangan (<i>Financial Resources</i>)	32	Statistik FIR Agregat Nasional (<i>National</i>	
Penjaga Pintu Rumah Integritas		<i>Aggregate FIR Statistics</i>)	56

		CHAPTER 4 - PRODUCT OF INTEGRITY	
		Produk Integritas (<i>Product Of Integrity</i>)	62
		Peran PPATK dalam Penegakan Hukum	
		(<i>PPATK's Role In Law Enforcement</i>)	66
		Tindak Lanjut Hasil Analisis (HA) dan Hasil	
		Pemeriksaan (HP) (<i>Follow-Up Of Analysis</i>	
		<i>Results (HA) And Examination Results (HP)</i>)	68
		Penghentian Sementara Transaksi	
		(<i>Temporary Suspension Of Transactions</i>)	70
		Korupsi pada Lembaga Peradilan	
		(<i>Corruption In The Judiciary</i>)	72
		Tindak Pidana Perjudian Online	
		(<i>Online Gambling Offences</i>)	74
		Tindak Pidana Perdagangan Orang	
		(<i>Trafficking In Persons</i>)	76
		CHAPTER 5 - NETWORK OF INTEGRITY	
		Kolaborasi Menjaga Negeri (<i>Collaboration to</i>	
		<i>Protect the Nation</i>)	78
		Statistik Asistensi Penanganan Perkara	
		(<i>Assistance Handling Case Statistics</i>)	79
		Statistik Pemberian Keterangan Ahli 2024 (<i>Expert</i>	
		<i>Testimony Provision Statistics 2024</i>)	80
		Statistik MoU 2024 (<i>MoU Statistics 2024</i>)	81
		Orkestrasi Informasi yang Menjaga Kepercayaan	
		Publik (<i>Orchestration of Information that</i>	
		<i>Maintains Public Trust</i>)	82
		Statistik Sentimen Pemberitaan Tahun 2024 (<i>News</i>	
		<i>Sentiment Statistics 2024</i>)	83
		Mendidik Publik (<i>Educating the Public</i>)	84
		Menyebarkan Literasi (<i>Spreading Literacy</i>)	84
		Kolaborasi Lintas Batas (<i>Cross-Border Collaboration</i>)	85
		CHAPTER 6 - RESULT OF INTEGRITY	
		Hasil Usaha Integritas dalam Mengawal Keuangan	
		Negara (<i>The Outcomes of Integrity Efforts in</i>	
		<i>Protecting State Finances</i>)	88
		Menelusuri Perjalanan Kasus: Dari Analisis hingga	
		Keputusan (<i>Tracking Case Progress: From</i>	
		<i>Analysis to Decision</i>)	89
		Statistik Penghentian Sementara Transaksi	
		(<i>Statistics of Temporary Transaction Suspension</i>)	90
		Kontribusi Potensi Penerimaan Negara/ Asset	
		<i>Recovery</i> (<i>Contribution to Potential State</i>	
		<i>Revenue/Asset Recovery</i>)	91
		Produk Kajian Hukum 2024 (<i>2024 Legal</i>	
		<i>Study Report</i>)	92
		Indeks Efektivitas (<i>Effectiveness Index</i>)	93
		Penghargaan dan Pengakuan (<i>Awards & Recognition</i>)	94
		EPILOGUE	
		Menutup Tahun dengan Komitmen Tak	
		Berbatas (<i>Closing the Year with Unwavering</i>	
		<i>Commitment</i>)	96
		Glosarium (<i>Glossary</i>)	98

KATA PIMPINAN

LEADERSHIP MESSAGE

Sore itu, berbeda dari biasanya, Rahmi menyambut kepulangan suaminya, Mohammad Hatta, dengan cemberut. “Ayah, mengapa tidak bilang terlebih dahulu akan ada pemotongan uang?” tanya Rahmi kepada suaminya. Ibu Rahmi sangat kecewa. Uang yang ia sisihkan tiap hari untuk membeli mesin jahit tak ada gunanya lagi, sebab pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan sanering (pemotongan nilai uang) dari Rp100,00 menjadi Rp1,00.

Padahal, tabungannya kala itu sudah cukup untuk membeli mesin jahit idamannya. Akibat kebijakan tersebut, nilai tabungan Ibu Rahmi pun menurun dan tak lagi cukup untuk membeli mesin jahit. Ibu Rahmi sangat kecewa, terlebih yang mengumumkan kebijakan sanering itu adalah suaminya sendiri; Bung Hatta-sapaan akrabnya, yang menjabat sebagai wakil presiden.

Dengan bijak, Bung Hatta menjawab, "Kepentingan negara tidak bisa dipisahkan dari kepentingan keluarga. Rahasia negara harus tetap terjaga. Walaupun saya bisa percaya padamu, namun rahasia ini tidak boleh dibocorkan kepada siapa pun. Kita mungkin rugi sedikit demi kepentingan seluruh negara. Kita coba menabung lagi, ya."

Kisah di atas dapat menjadi teladan betapa Integritas Bung Hatta tetap tegak berdiri meski harus mengorbankan kepentingan keluarganya. Bung Hatta menunjukkan bahwa kepentingan negara harus selalu diutamakan, meskipun keputusan tersebut bisa berdampak pada kesulitan pribadi. Bung Hatta memilih hidup sederhana bukan karena tidak mampu, bukan pula karena tidak bisa kaya. Ia memilih opsi

That afternoon was unlike any other. Rahmi greeted her husband, Mohammad Hatta, with a frown. “Father, why didn’t you tell me in advance that there would be a currency cut?” she asked. Rahmi was deeply disappointed. The money she had carefully saved each day to buy a sewing machine had suddenly lost its value due to the Indonesian government’s monetary policy of redenomination, reducing the value of Rp100 to Rp1.

She had finally saved enough to purchase her dream sewing machine, but because of the policy, her savings were no longer sufficient. Rahmi’s disappointment was further compounded by the fact that it was her own husband, Bung Hatta—as he was fondly called—who, in his capacity as Vice President, had announced the policy.

With wisdom, Bung Hatta responded, "The interests of the nation cannot be separated from personal interests. State secrets must be maintained. Even though I trust you, this secret could not be disclosed to anyone. We may suffer a small loss for the greater good of the country. Let us try saving again."

This story is a testament to Bung Hatta's unwavering integrity, even at the cost of his family's interests. He demonstrated that the well-being of the nation must always take precedence, even if personal hardships arise as a result. As a leader, Bung Hatta understood that upholding integrity in serving the state was far more important than personal or familial comfort.

itu karena fokus dalam menjalankan amanat rakyat, bukan fokus memperkaya diri. Menjadi abdi negara dan rakyat bukan berarti mencari kehidupan dengan memanfaatkan kekayaan negara dan rakyat.

Bung Hatta merupakan satu dari sekian tokoh perjuangan lainnya yang memiliki integritas teguh. Kami memetik satu kisah integritas ini sebagai dasar inspirasi lembaga PPATK, agar senantiasa mengingat dan menerapkan prinsip integritas dalam kerja sehari-hari.

PPATK sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keuangan negara dari praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, dapat mengambil pelajaran dari keteguhan integritas para tokoh nasional seperti Bung Hatta. Kisah beliau mengingatkan kami bahwa, dalam setiap langkah yang diambil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, kita harus mampu mengutamakan kebenaran dan keadilan, meskipun terkadang itu berarti harus berani mengorbankan kepentingan pribadi.

“Integritas PPATK Mengawal Asta Cita Indonesia” adalah tema besar dalam Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024. Tema ini bukan hanya sekadar slogan atau judul laporan tahunan, melainkan sebuah refleksi dari peran sentral PPATK dalam menjaga dan mendukung cita-cita negara. Asta Cita Indonesia merujuk pada delapan tujuan besar yang tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Satu dari delapan misi dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terkait Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Dalam hal ini, PPATK berkomitmen penuh melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum dan birokrasi untuk meningkatkan

Bung Hatta chose to live modestly, not because he lacked the means, nor because he was incapable of acquiring wealth, but because his focus was on fulfilling his responsibility to the people rather than enriching himself. Serving the nation and its people is not about exploiting public resources for personal gain. Bung Hatta was one of many national figures who upheld unwavering integrity. This story serves as an inspiration for PPATK, reminding us to uphold and implement the principle of integrity in our daily work.

PPATK, as an institution playing a crucial role in safeguarding the nation’s financial system from money laundering and terrorist financing, can draw valuable lessons from the integrity of national leaders like Bung Hatta. His legacy reminds us that in every decision we make in fulfilling our duties and responsibilities, we must prioritize truth and justice, even if it means making personal sacrifices.

At PPATK, integrity forms the foundation of every action taken to ensure transparency and accountability. These fundamental values serve as a moral compass, guiding us through various challenges in maintaining the integrity of Indonesia’s financial system.

“PPATK’s Integrity in Guarding Indonesia’s Asta Cita” is the central theme of PPATK’s 2024 Annual Report. This theme is not merely a slogan or a report title but a reflection of PPATK’s crucial role in safeguarding and supporting the nation’s aspirations. Asta Cita Indonesia refers to the eight key national goals embodied in Pancasila and the 1945 Constitution, encompassing progress, prosperity, and social justice for all Indonesians. As an institution responsible for monitoring and analyzing financial transactions to prevent money laundering, terrorist financing,

transparansi serta akuntabilitas. PPATK sebagai *leading sector* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal, memegang peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan di Indonesia.

Dalam tahun 2024 perjalanan PPATK ibarat perahu yang melaju di lautan luas, mengarungi gelombang tantangan. Namun semua itu berhasil dikendalikan. Di bawah kemudi integritas, ancaman badai berhasil dilalui. Terbukti dari hasil Statistik Tindak Lanjut HA/HP lebih dari separuh produk intelijen keuangan berhasil untuk mengembangkan kasus. Statistik Penghentian Sementara Transaksi memblokir potensi ancaman, menutup transaksi mencurigakan senilai Rp1,74 triliun, USD 731 juta, dan USDT 13.957. Kontribusi potensi *Asset Recovery* juga memperlihatkan peran PPATK dalam memulihkan harta negara melalui denda, uang pengganti, dan aset hasil tindak pidana. Selain itu, Pemberian Keterangan Ahli dan Produk Kajian Hukum 2024 semakin memperkuat dasar pengambilan keputusan. Indeks Efektivitas 2024 yang meningkat menjadi 7,93 menunjukkan stabilitas kinerja lembaga, semakin kokoh dalam menghadapi tantangan. *Awards & Recognition* yang diterima juga menegaskan bahwa PPATK diakui, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar, sebagai senjata ampuh melawan kejahatan finansial.

Namun, disamping pencapaian yang ada sepanjang tahun ini, kami (PPATK) masih merasa belum sepenuhnya sempurna. Masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki, masih banyak celah atau kekosongan yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, kami terus belajar, terus

and the proliferation of weapons of mass destruction, PPATK plays a direct role in ensuring that Indonesia’s financial sector remains clean, transparent, and free from harmful practices.

One of the eight missions of Asta Cita, as outlined by the President and Vice President, focuses on Political, Legal, and Bureaucratic Reform, as well as the Eradication of Corruption and Narcotics. In line with this, PPATK is fully committed to implementing legal and bureaucratic reforms to enhance transparency and accountability. As the leading sector in the prevention and eradication of money laundering (TPPU), terrorist financing, and the proliferation of weapons of mass destruction, PPATK plays a critical role in maintaining the stability and integrity of Indonesia’s financial system.

Throughout 2024, PPATK’s journey resembled a vessel navigating vast seas, facing waves of challenges. Yet, under the helm of integrity, even the most formidable storms were overcome. This is evident in the Follow-up Statistics of HA/HP, where more than half of financial intelligence products were acted upon. Meanwhile, the Temporary Transaction Suspension successfully blocked potential threats, preventing suspicious transactions amounting to Rp1.74 trillion, USD 731 million, and USDT 13,957. PPATK’s contributions to Asset Recovery further highlight its role in restoring state wealth through fines, compensation, and criminal asset recovery. Additionally, Expert Testimonies and Legal Research in 2024 have reinforced the foundation for sound decision-making. The 2024 Effectiveness Index, which rose to 7.93, reflects the institution’s steady performance in facing challenges. The awards and recognitions received further affirm that PPATK is acknowledged, both domestically and internationally, as a formidable force against financial crime.

memperbaiki diri, dan terus menjadikan integritas sebagai dasar kami untuk melangkah dalam tiap perjalanan.

Mengutip kata-kata bijak dari Hoegeng, "Selesaikan tugas dengan kejujuran karena kita masih bisa makan nasi dengan garam." Hoegeng, sebagai seorang tokoh polisi yang dikenal dengan integritasnya, menekankan bahwa pentingnya kejujuran dalam menjalankan tugas, meskipun mungkin tidak mendapatkan imbalan materi yang besar. Meskipun dunia ini sering kali menawarkan godaan materi yang besar, kejujuran tetap menjadi dasar dalam melakukan segala sesuatu dengan benar dan sesuai dengan prinsip moral.

PPATK berkomitmen untuk tidak tergoda oleh keuntungan sesaat atau kemudahan yang dapat mengorbankan integritas. Sebagai lembaga yang mengawal keuangan negara, mencegah pencucian uang, serta pendanaan terorisme, PPATK percaya bahwa mempertahankan integritas yang tinggi jauh lebih bernilai daripada segala imbalan materi yang mungkin datang dan pergi.

However, despite these accomplishments, we at PPATK acknowledge that we are not yet perfect. There are still shortcomings to be addressed and gaps to be filled. Thus, we continue to learn, improve, and uphold integrity as our guiding principle in every step we take.

To quote the wise words of Hoegeng, "Complete your duties with honesty, for we can still eat rice with salt." Hoegeng, a police figure renowned for his integrity, emphasized the importance of honesty in duty, even if it does not yield great material rewards. Despite the temptations of wealth, honesty remains the foundation for doing what is right and morally sound.

PPATK remains steadfast in resisting short-term gains or conveniences that compromise integrity. As the guardian of national finances, preventing money laundering and terrorist financing, PPATK firmly believes that maintaining high integrity is far more valuable than any material reward that may come and go.

Jakarta, 31 Desember 2024 | Jakarta, 31 December 2024

**Kepala Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan**
Head of Indonesian Financial Transaction Reports and
Analysis Center

IVAN YUSTIAVANDANA

LIPUTAN KHUSUS
SPECIAL REPORT

Integritas PPATK Mengawal Asta Cita Indonesia

PPATK's Integrity in Guarding Indonesia's 'Asta Cita'

APA ITU ASTA CITA?

WHAT IS ASTA CITA?

Asta Cita adalah istilah yang merujuk pada delapan cita-cita atau tujuan dasar yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Asta Cita ini berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan negara.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas serta 8 program hasil terbaik cepat. Semata untuk mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Asta Cita refers to the eight core aspirations or fundamental goals envisioned for Indonesia, as outlined in the Preamble of the 1945 Constitution (UUD 1945). These aspirations serve as guiding principles for national governance and development, forming the foundation for government policies and initiatives.

The administration of President Prabowo Subianto and Vice President Gibran Rakabuming Raka has adopted eight missions of Asta Cita, alongside 17 priority programs and eight rapid-result initiatives. These efforts are aimed at realizing the vision of Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 (Advancing Indonesia Together Towards Golden Indonesia 2045).

01

Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Strengthening the ideology of Pancasila, democracy, and human rights (HAM)

02

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Enhancing national defense and security while promoting self-reliance in food, energy, water, creative economy, green economy, and blue economy

03

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

Expanding quality employment opportunities, fostering entrepreneurship, developing the creative industry, and continuing infrastructure advancements

04

Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Strengthening human resource development (SDM), science, technology, education, health, sports achievements, gender equality, and the empowerment of women, youth, and persons with disabilities

05

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Advancing downstream industrialization to increase domestic value-added production

06

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Developing from the grassroots, focusing on rural development, economic equalization, and poverty eradication

07

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

Reinforcing political, legal, and bureaucratic reforms, while intensifying the fight against corruption and drug abuse

08

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Promoting harmony with nature, environment, and cultural heritage while fostering interfaith tolerance to achieve a just and prosperous society

Misi Asta Cita

The Eight Missions of Asta Cita

Peran Rezim APUPPT dalam Asta Cita

THE ROLE OF THE ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTER-TERRORISM FINANCING (AML/CTF) REGIME IN ASTA CITA

Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APUPPT) berperan krusial dalam mewujudkan Asta Cita Indonesia. Dengan memastikan bahwa keuangan negara bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme, negara dapat menciptakan keadilan sosial, kemakmuran umum, dan kemerdekaan yang lebih kuat. PPATK, bersama lembaga negara lainnya, berkomitmen untuk mendukung tercapainya cita-cita bangsa Indonesia dengan menjaga sistem keuangan yang bersih dan transparan, demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.

KONTRIBUSI UTAMA REZIM APU/PPT TERHADAP ASTA CITA:

- Memastikan Sistem Keuangan yang Transparan dan Bersih.
 - Salah satu pilar utama Asta Cita adalah menjaga sistem keuangan yang bebas dari kegiatan terlarang seperti pencucian uang dan pendanaan teroris.
 - Rezim APU dan PPT memastikan bahwa transaksi keuangan sesuai dengan standar hukum, meningkatkan stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor.

The Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) regime plays a critical role in achieving Indonesia's Asta Cita vision. By ensuring that the nation's financial system remains free from money laundering and terrorist financing activities, the country can uphold social justice, general prosperity, and stronger national sovereignty.

Indonesia's Financial Intelligence Unit (PPATK), in collaboration with other state institutions, is committed to safeguarding the integrity of the financial system. This commitment supports sustainable development while fostering public trust in governance.

KEY CONTRIBUTIONS OF THE AML/CTF REGIME TO ASTA CITA:

- Ensuring a Transparent and Clean Financial System
 - One of Asta Cita's key pillars is maintaining a financial system free from illicit activities such as money laundering and terrorist financing.
 - The AML/CTF regime ensures that financial transactions comply with legal standards, enhancing economic stability and investor confidence.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
 - a. Pencucian uang dan pendanaan teroris sering kali mengalihkan sumber daya negara dan menghalangi keadilan ekonomi.
 - b. Sistem keuangan yang diatur dengan baik mencegah dana gelap mendistorsi pertumbuhan ekonomi dan memastikan bahwa dana pembangunan sampai ke tangan penerima manfaat yang tepat.
3. Memperkuat Keamanan dan Kedaulatan Nasional
 - a. Aliran keuangan ilegal dapat mendanai kegiatan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban umum.
 - b. Dengan mencegah transaksi keuangan ilegal, rezim APU/PPT membantu menjaga kedaulatan Indonesia dari ancaman internal dan eksternal.
4. Menegakkan Keadilan Sosial dan Pemerataan Ekonomi
 - a. Praktik keuangan ilegal berkontribusi pada ketidaksetaraan, menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan masyarakat luas
 - b. Sistem APU/PPT yang efektif memastikan bahwa peluang dan sumber daya ekonomi didistribusikan secara adil, sehingga mendorong kemakmuran nasional.
5. Mengoptimalkan Manajemen Keuangan Nasional
 - a. Pemantauan arus keuangan yang efektif mencegah misalokasi sumber daya negara dan memperkuat manajemen fiskal
2. Promoting Inclusive and Sustainable Economic Growth
 - a. Money laundering and terrorist financing often divert state resources and hinder economic fairness.
 - b. A well-regulated financial system prevents illicit funds from distorting economic growth and ensures that development funds reach the intended beneficiaries.
3. Strengthening National Security and Sovereignty
 - a. Illegal financial flows can fund activities that threaten national stability and public order.
 - b. By preventing illicit financial transactions, the AML/CTF regime helps safeguard Indonesia's sovereignty against internal and external threats.
4. Upholding Social Justice and Economic Equity
 - a. Illicit financial practices contribute to inequality, benefiting a select few at the expense of the broader population.
 - b. An effective AML/CTF system ensures that economic opportunities and resources are distributed fairly, fostering national prosperity.
5. Optimizing National Financial Management
 - a. Effective monitoring of financial flows prevents misallocation of state resources and strengthens fiscal management.
 - b. Transparent financial practices support long-term economic planning and poverty alleviation efforts.
- b. Praktik keuangan yang transparan mendukung perencanaan ekonomi jangka panjang dan upaya pengentasan kemiskinan.
6. Membangun Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan
 - a. Pemerintah yang menjunjung tinggi transparansi dalam pengelolaan keuangan akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari warganya.
 - b. Langkah-langkah APU/PPT yang kuat memperkuat stabilitas politik dan sosial dengan memastikan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan.
7. Memerangi Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
 - a. Korupsi sering dikaitkan dengan pencucian uang dan salah urus keuangan
 - b. Dengan mengatasi masalah ini, rezim APU/PPT mendukung upaya antikorupsi Indonesia yang lebih luas dan memperkuat integritas kelembagaan.
8. Mendukung Visi Indonesia 2045
 - a. Pencapaian seratus tahun Indonesia pada tahun 2045 bertujuan untuk memposisikan Indonesia sebagai negara yang makmur, adil, dan berdaya saing global
 - b. Kerangka kerja APU/PPT yang kuat memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan, sehingga memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
6. Building Public Trust in Governance
 - a. A government that upholds transparency in financial management earns greater trust from its citizens.
 - b. Strong AML/CTF measures reinforce political and social stability by ensuring accountability in financial governance.
7. Combating Corruption and Abuse of Power
 - a. Corruption is often linked to money laundering and financial mismanagement.
 - b. By addressing these issues, the AML/CTF regime supports Indonesia's broader anti-corruption efforts and strengthens institutional integrity.
8. Supporting Indonesia's Vision for 2045
 - a. Indonesia's centennial milestone in 2045 aims to position the country as a prosperous, just, and globally competitive nation.
 - b. A robust AML/CTF framework ensures that financial resources are used for sustainable development, reinforcing Indonesia's global standing.

Pentingnya Integritas dalam Asta Cita

THE IMPORTANCE OF INTEGRITY IN ACHIEVING ASTA CITA

Integritas merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Tanpa integritas, tujuan utama seperti keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kedaulatan nasional tidak akan tercapai sepenuhnya. Sistem tata kelola pemerintahan yang berakar pada transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa warga negara merasa terlindungi, diberdayakan, dan diberi kesempatan yang sama untuk maju.

Mengapa Integritas Sangat Penting bagi Asta Cita:

- Memastikan bahwa kebijakan keuangan dijalankan demi kepentingan publik.
- Mencegah korupsi sistemik yang dapat menggagalkan tujuan pembangunan nasional.
- Membangun sistem tata kelola yang akuntabel yang mendorong kemakmuran yang berkelanjutan.

Pemerintah yang berkomitmen terhadap integritas akan menciptakan negara yang stabil, adil, dan makmur, memperkuat aspirasi jangka panjang Indonesia untuk pembangunan dan kepemimpinan global.

Integrity is a fundamental pillar in realizing Indonesia's national aspirations. Without integrity, key objectives such as social justice, general welfare, and national sovereignty cannot be fully achieved. A governance system rooted in transparency and accountability ensures that citizens feel protected, empowered, and given equal opportunities to progress.

Why Integrity is Crucial for Asta Cita:

- Ensures that financial policies are executed in the public's best interest.
- Prevents systemic corruption that could derail national development goals.
- Builds an accountable governance system that fosters sustainable prosperity.

A government committed to integrity will create a stable, fair, and prosperous nation, strengthening Indonesia's long-term aspirations for development and global leadership.



Integritas merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia

Integrity is a fundamental pillar in realizing Indonesia's national aspiration

ilustrasi : Dall-E



Chapter 1 Higher Purpose

Ibarat pelita yang menerangi jalan Indonesia, PPATK menjaga agar setiap transaksi keuangan tetap pada jalur yang benar. Dengan integritas sebagai penuntun, PPATK menghalau bayang-bayang gelap pencucian uang, membangun fondasi keuangan yang kokoh, dan memastikan cita-cita bangsa ini menuju masa depan yang terang dan sejahtera.

Like a guiding lantern illuminating Indonesia's path, PPATK safeguards every financial transaction, ensuring it stays on the right course. With integrity as its principle, PPATK wards off the dark shadows of money laundering, strengthening the foundations of the nation's financial system and paving the way for a bright and prosperous future.

Visi & Misi

Vision & Mission

SEJAK amanat diberikan dan sumpah jabatan diikrarkan, kami bertekad penuh semangat untuk melaksanakan mandat tersebut. Kami memilih bahan terbaik: Integritas, sebagai elemen fundamental dalam membangun rumah ini. Visi memberi arah, misi memberikan langkah-langkah konkret, dan integritas memastikan semuanya dibangun dengan cara yang benar, adil juga transparan. Ketiganya bekerja bersama untuk menciptakan rumah yang memberi rasa aman dan nyaman, serta bertahan menghadapi segala tantangan.

Tanpa integritas, baik visi maupun misi bisa kehilangan makna dan dampaknya, bahkan berpotensi merusak pilar-pilar yang menopang reputasi (rumah) kami. Dengan integritas yang kokoh, organisasi tidak hanya mampu mencapai tujuan, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dan langgeng dengan penghuni (pegawai), mitra, dan pemangku kepentingan lainnya.



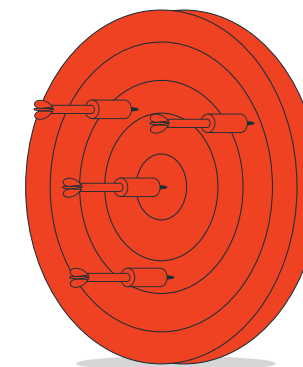
FROM the moment we received our mandate and took the oath of office, we were passionately committed to fulfilling our responsibilities. We selected the finest cornerstone—integrity—as the foundation upon which to build this house. Vision provides direction, mission offers concrete steps, and integrity ensures that everything is constructed properly, fairly, and transparently. Together, these elements create a home that offers security, comfort, and resilience against all challenges.

Without integrity, both vision and mission risk losing their significance and impact, potentially even undermining the pillars that uphold our reputation (our home). With a strong foundation of integrity, organizations can not only achieve their objectives but also foster enduring relationships with their members (employees), partners, and stakeholders.

VISI (Vision)

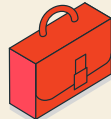
Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Achieving economic stability and the integrity of Indonesia's financial system through the prevention and eradication of money laundering, paving the way for a sovereign, self-reliant, and resilient Indonesia, built on the spirit of mutual cooperation.



MISI (Mission)

- 

Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Enhancing the impact of analytical findings, examination results, research outcomes, and policy recommendations in the fight against money laundering and terrorist financing.
- 

Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional.
Strengthening stakeholder participation and synergy at both national and international levels.
- 

Meningkatkan keandalan sistem informasi.
Advancing the reliability of information systems.
- 

Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.
Improving the capability of anti-money laundering resources and the institutional governance of PPATK.

Pada akhirnya, visi dan misi ini lebih dari sekadar strategi organisasi; ia adalah harapan untuk mewujudkan sistem keuangan Indonesia yang stabil, berintegritas, mencegah pencucian uang, dan menjadi cerminan aspirasi serta perjuangan bangsa.

Ultimately, this vision and mission extend beyond being an organizational strategy—they represent our hope for a stable and trustworthy Indonesian financial system. They also reflect the aspirations and struggles of the nation as we collectively work toward a brighter future.

Integritas sebagai Pilar Utama dalam Menjalankan Mandat

Integrity as the Cornerstone of Fulfilling Our Mandate

Ibarat sebuah akar pohon yang menancap ke dalam tanah, integritas adalah sumber kekuatan yang menopang setiap langkah yang kita ambil dalam menjalankan mandat. Tanpa integritas, segala upaya akan layu dan rapuh, seperti pohon yang tumbuh tanpa akar yang kuat. Mandat yang diemban dalam sebuah organisasi yang menjunjung tinggi integritas—kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan etika—adalah ibarat perjalanan panjang yang harus dilalui dengan kompas moral yang tepat. Dalam konteks ini, integritas bukan hanya nilai pribadi yang harus melekat pada setiap individu, tetapi juga fondasi tak terlihat yang harus dipertahankan dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil untuk mengemban amanah tersebut.

Like the roots of a tree deeply embedded in the soil, integrity is the source of strength that supports every step we take in fulfilling our mandate. Without integrity, all efforts would wither and falter, much like a tree that grows without strong roots. A mandate carried out within an organization that upholds integrity—honesty, transparency, accountability, and ethics—resembles a long journey that must be navigated with the right moral compass. In this context, integrity is not merely a personal value that must be ingrained in each individual, but an invisible foundation that must be upheld in every decision and action taken to carry out this entrusted responsibility.



TUGAS Roles

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang

PPATK is entrusted with the critical task of preventing and combating money laundering.

Sumber: UU No. 8 Tahun 2010

FUNGSI Functions

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain.

In performing its duties, PPATK operates under the following core functions:

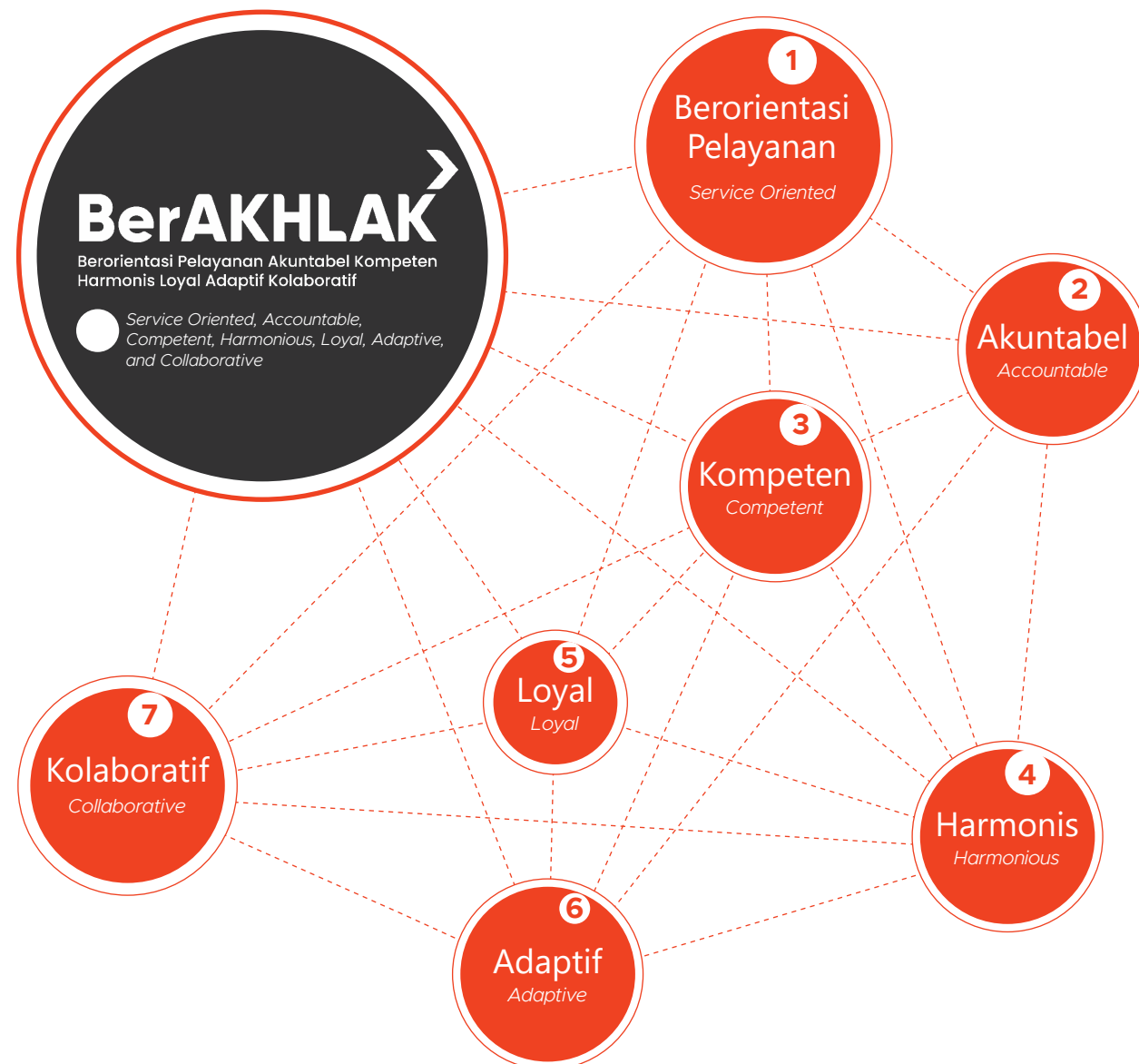
1. Preventing and eradicating money laundering offenses.
2. Managing and utilizing data and information obtained by PPATK.
3. Supervising the compliance of reporting entities.
4. Analyzing or examining reports and information on financial transactions that may indicate money laundering and/or other criminal activities.

PPATK diibaratkan sebagai seorang penjaga gerbang yang setia, menjaga pintu masuk sistem keuangan Indonesia. Mandat yang diembannya adalah kunci untuk menjaga agar hanya transaksi yang sah dan aman yang dapat melintas. Dalam menjalankan tugasnya, integritas adalah salah satu bahan utama dari kunci tersebut untuk menjaga setiap celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

PPATK can be likened to a vigilant gatekeeper, steadfastly safeguarding the integrity of Indonesia's financial system. Its mandate acts as the key to ensuring that only legitimate and secure transactions are allowed to pass through. In fulfilling this role, integrity remains a vital element, guarding against every vulnerability that criminals might exploit.

Core Value of Civil Servant

Budaya Kerja ASN



Core Value of Civil Servant

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Service Oriented, Accountable, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative

Berorientasi Pelayanan

Service Oriented

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.
- *Understand and fulfill the needs of the community;*
- *Friendly, dexterous, solutive and reliable;*
- *Continuous improvement.*

Akuntabel

Accountable

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- *Performing duties honestly, responsibly, carefully, with discipline and integrity;*
- *Utilising state assets and properties responsibly, effectively and efficiently;*
- *Avoiding abuse of authority.*

Kompeten

Competent

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- *Improving personal competence to meet ever-changing challenges;*
- *Assisting others to learn;*
- *Performing tasks with the best quality.*

Harmonis

Harmonious

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- *Respects everyone regardless of their background;*
- *Love to help others;*
- *Building a conducive work environment.*

Loyal

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- *Upholding the ideology of Pancasila, the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, to be loyal to the State of the Republic of Indonesia and the legitimate government;*
- *Preserving the reputation of civil servant, leaders, agencies, and the state;*
- *Guarding office and state secrets.*

Adaptif

Adaptive

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.
- *Adaptive to change*
- *Innovative and Creative*
- *Proactive*

Kolaboratif

Collaborative

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.
- *Provide opportunities for various parties to contribute;*
- *Open to working together to generate added value;*
- *Utilizing various resources for a common goal.*



STRUKTUR ORGANISASI

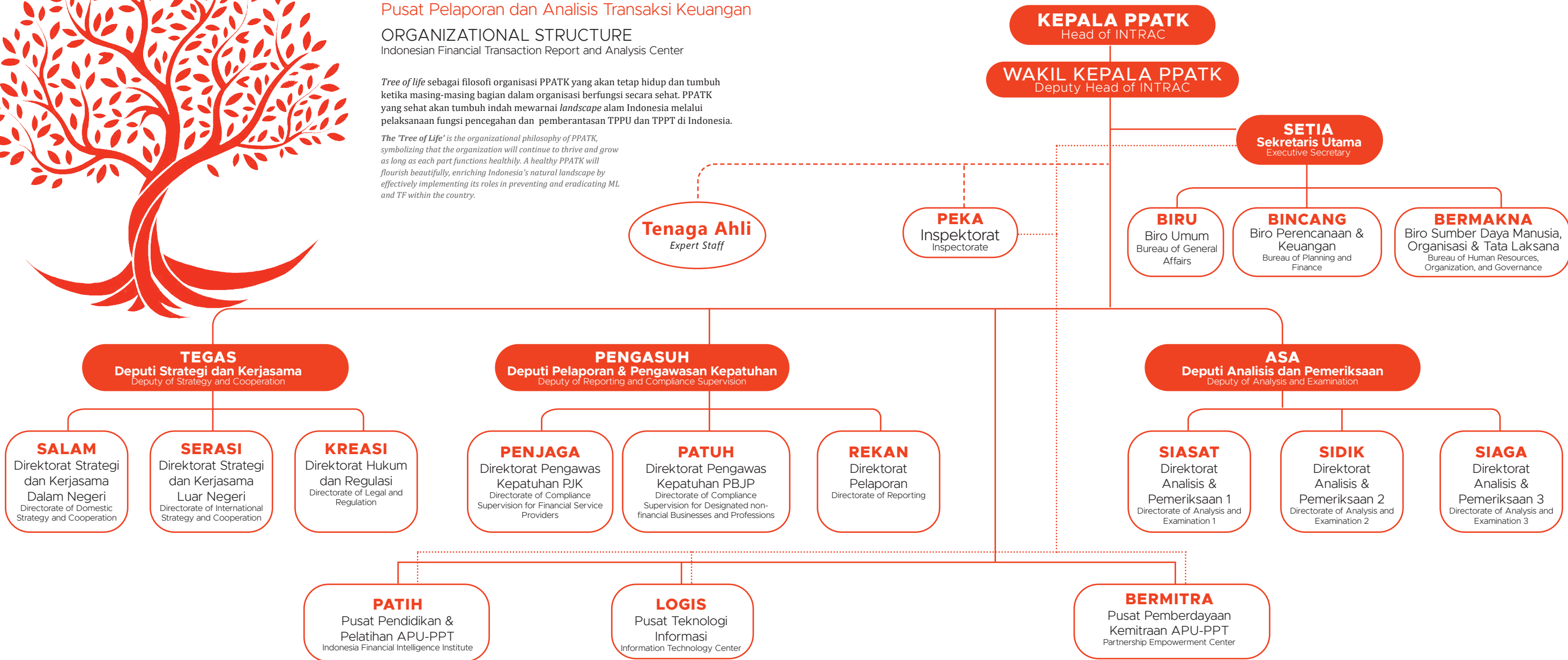
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center

Tree of life sebagai filosofi organisasi PPATK yang akan tetap hidup dan tumbuh ketika masing-masing bagian dalam organisasi berfungsi secara sehat. PPATK yang sehat akan tumbuh indah mewarnai *landscape* alam Indonesia melalui pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia.

The 'Tree of Life' is the organizational philosophy of PPATK, symbolizing that the organization will continue to thrive and grow as long as each part functions healthily. A healthy PPATK will flourish beautifully, enriching Indonesia's natural landscape by effectively implementing its roles in preventing and eradicating ML and TF within the country.





Chapter 2

House of Integrity

Di dalam sebuah rumah integritas, setiap dindingnya dibangun dengan kejujuran, setiap atapnya menjulang tinggi dengan tanggung jawab, dan lantainya bersih dengan transparansi. Di rumah integritas, tidak ada ruang untuk ketidakjujuran atau penyimpangan, karena setiap sudutnya menyimpan komitmen yang mendalam untuk selalu berpegang pada nilai-nilai luhur.

Within the house of integrity, every wall should be built with honesty, its roof stands tall with responsibility, and its floors remain spotless with transparency. In this house, there is no place for dishonesty, for every corner holds a deep commitment to upholding noble values.

HOUSE OF INTEGRITY

SEJARAH RUMAH PPATK

HOME SWEET HOME

“HOUSE OF INTEGRITY” (rumah integritas) -begitulah kami menyebutnya, merupakan wujud komitmen PPATK untuk memastikan bahwa seluruh sistem keuangan Indonesia dikelola dengan penuh integritas, bebas dari praktik korupsi, pencucian uang, serta aktivitas ilegal lainnya. Komitmen ini diwujudkan dengan membangun sebuah rumah integritas yang kokoh, dengan fondasi nilai-nilai moral dan etika yang kuat, sehingga mampu bertahan menghadapi ujian waktu dengan berbagai tantangan yang ada.

PPATK dibentuk pada 15 Maret 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pembentukan lembaga ini sebagai respon pemerintah Indonesia terhadap tantangan global yang semakin berkembang. Saat ini dan di masa depan, praktik kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta proliferasi senjata pemusnah massal terus menjadi ancaman serius. Berdasarkan amanah dalam undang-undang tersebut, PPATK diberikan wewenang untuk menganalisis dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dapat mengindikasikan pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Sebelum PPATK beroperasi secara penuh, sebagian tugas dan kewenangan terkait Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dilaksanakan oleh Unit Khusus Investasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia. Pada Oktober 2002, Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gede Made Sadguna diangkat sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK berdasarkan Keputusan Presiden No. 201/M/2002.

THE “HOUSE OF INTEGRITY”—this is what we call it. It represents PPATK’s unwavering commitment to ensuring that Indonesia’s financial system operates with absolute integrity, free from corruption, money laundering, and other illicit activities. This commitment is realized by constructing a resilient house of integrity, one built upon a foundation of strong moral and ethical values, capable of withstanding the tests of time and challenges it faces.

PPATK was established on March 15, 2002, under Law No. 15 of 2002 on Money Laundering Crimes (TPPU). Its formation was Indonesia’s response to the evolving global challenges of the time. Today and in the future, crimes like money laundering, and terrorism financing remain serious threats. As mandated by law, PPATK is entrusted with analyzing and reporting suspicious financial transactions indicative of these crimes.

Before PPATK was fully operational, some of the responsibilities related to financial service providers were managed by Bank Indonesia’s Special Banking Investment Unit (UKIP). On October 2002, Dr. Yunus Husein and Dr. I Gede Made Sadguna were appointed as the first Head and Deputy Head of PPATK through Presidential Decree No. 201/M/2002. This milestone marked the crucial foundation of PPATK’s house of integrity.

Pengangkatan ini menjadi tonggak awal yang sangat penting dalam memperkuat fondasi rumah integritas PPATK.

RUMAH INTEGRITAS PERTAMA PPATK

Kegiatan operasional awal PPATK berlangsung di sebuah ruang rapat kecil yang dijadikan kantor darurat. Tidak ada ruang kerja khusus maupun fasilitas kantor yang memadai pada saat itu, ditambah dengan terbatasnya anggaran sehingga tidak memungkinkan perekrutan pegawai. Hanya ada dua orang staf Direktorat Hukum Bank Indonesia yang mendukung operasional lembaga ini.

“The show must go on” meski dengan keterbatasan yang ada, PPATK tetap harus berpacu dengan waktu yang terbatas. Karena berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU TPPU menyebutkan enam bulan setelah Kepala dan Wakil Kepala diangkat, PPATK harus sudah menjalankan fungsinya.

THE FIRST HOUSE OF INTEGRITY

PPATK’s initial operations were modest, taking place in a small meeting room repurposed as an improvised office. There were no designated workspaces or sufficient office facilities. Budget limitations further constrained recruitment efforts, leaving only two staff members from Bank Indonesia’s Legal Directorate to support operations.

Despite these limitations, PPATK faced a strict deadline: under Article 45, Paragraph (2) of the TPPU Law, it was required to function fully within six months of the appointment of its leadership.

Dr. Yunus Husein dan Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Akt diangkat sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK Kedua

Dr Yunus Husein and Prof Dr Gunadi, M.Sc., Akt were appointed as Head and Deputy Head of PPATK respectively



Seiring berjalannya waktu, selama berkantor di lantai 4 Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih, perhatian dan dukungan berbagai pihak terhadap eksistensi PPATK semakin meningkat. Kepala PPATK Yunus Husein mengungkapkan selama ini PPATK tidak memiliki kantor tetap untuk menjalankan tugasnya. Sebagai lembaga independen dan *Financial Intelligence Unit* (FIU), PPATK dituntut untuk memiliki kantor terpisah dari instansi lain guna menjaga integritas dan independensinya.

Namun, pengesahan beberapa Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan operasional PPATK terus tersendat. Kemudian di tahun 2006, Menteri Keuangan sudah menyediakan anggaran Rp29.278.432.000 untuk pembelian tanah, tetapi pencarian lahan untuk tempat berkantor baru juga sulit, sehingga PPATK mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan menggunakan tanah kosong bekas aset BPPN di Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta. Keinginan tersebut terwujud setelah Menteri Keuangan memberikan persetujuan melalui surat No. 190/MK.06/2006 (3 Mei 2006) dan surat No. 5758/MK/06/2006 (7 Agustus 2006). Gedung PPATK diresmikan pada 27 November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

MENETAPKAN TONGGAK INTEGRITAS

Langkah awal untuk menetapkan integritas di “rumahnya”, PPATK menyusun pedoman umum yang dibutuhkan oleh Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB). Di tengah keterbatasan personel dan kesibukan menata kelembagaan, PPATK berhasil mengeluarkan enam pedoman, termasuk yang mengatur tata cara identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan prosedur pelaporannya.

Pada 2004, terjadi penambahan tiga Wakil Kepala PPATK untuk masa jabatan 2004-2008: Drs. Priyanto Soewarno

In time, as operations moved to the fourth floor of Bank Indonesia's Kebon Sirih building, the organization gained increasing support and recognition. However, Head of PPATK Yunus Husein expressed the urgent need for a permanent, independent office, emphasizing that, as an autonomous Financial Intelligence Unit (FIU), PPATK must maintain its integrity and independence.

Efforts to secure funding and office space were fraught with delays. While the Ministry of Finance allocated a budget of IDR 29.3 billion in 2006 for land acquisition, identifying a suitable location proved challenging. Eventually, PPATK requested the use of a vacant former asset of the Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) at Jalan Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta. This request was approved in May and August 2006 through two letters from the Ministry of Finance. The PPATK building was officially inaugurated on November 27, 2007, by President Susilo Bambang Yudhoyono.

LAYING THE FOUNDATIONS OF INTEGRITY

To establish its integrity, PPATK began by developing essential guidelines for financial institutions. Amid the challenges of limited personnel and the complexities of institutional organization, PPATK successfully issued six key guidelines, including procedures for identifying and reporting suspicious financial transactions.

In 2004, the government appointed three Deputy Heads of PPATK for the 2004–2008 term: Drs. Prinyanto Soewarno (Administration), Irjen Pol. Drs. Susno Duaji, SH, M.Sc (Law and Compliance), and Bambang Setiawan, SE, Ekt, MBA (Technology and Information). Their inauguration before the Chief Justice of the Supreme Court on August 29, 2004, underscored PPATK's commitment to its legal mandate. Dr. Yunus

(Administrasi), Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, M.Sc (Hukum dan Kepatuhan), dan Bambang Setiawan, SE, Ekt, MBA (Teknologi dan Informasi). Sebelumnya, Wakil Kepala PPATK dijabat oleh Dr. I Gede Made Sadguna yang bertanggung jawab di bidang riset dan kerjasama antar lembaga. Ketiga Wakil Kepala PPATK tersebut mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI pada 29 Agustus 2004 sesuai dengan amanat UU TPPU. Pada 8 November 2006, Dr. Yunus Husein diangkat kembali sebagai Kepala PPATK, dan wakilnya yang semula dijabat oleh Dr. I Gede Made Sadguna di bidang kerjasama antar lembaga digantikan Prof. Gunadi.

Struktur kepemimpinan yang kuat dan terpercaya memungkinkan PPATK menjalankan tugasnya secara independen dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Integritas pimpinan akan meresap ke seluruh organisasi, menciptakan lingkungan yang transparan, profesional, dan bebas korupsi. Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala sesuai prosedur hukum mencerminkan komitmen PPATK untuk menjaga independensi dan efektivitas lembaga, sekaligus menguatkan integritas dalam melaksanakan tugasnya.

MERAWAT DAN MELENGKAPI HUNIAN

Seperti halnya sebuah rumah yang membutuhkan perhatian dan pemeliharaan, rumah integritas PPATK juga memerlukan perawatan secara berkala. Perawatan dan pemeliharaan perlengkapan rumah integritas PPATK mencerminkan upaya untuk menjaga kualitas dan kesesuaian operasional lembaga dalam menghadapi tantangan tugasnya.

Selain itu, perlengkapan rumah integritas PPATK juga mencakup fasilitas yang mendukung kerja profesionalisme, di mana setiap elemen lembaga dilengkapi dengan perangkat yang memadai dan terkini untuk mendeteksi dan mencegah potensi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Husein was reappointed as Head of PPATK in 2006, with Prof. Gunadi succeeding Dr. I Gede Made Sadguna as Deputy Head for Research and Inter-Agency Cooperation.

This strong leadership structure enabled PPATK to function independently in combating money laundering and terrorism financing. The integrity of its leaders permeated the organization, fostering an environment of transparency, professionalism, and corruption-free governance.

NURTURING AND STRENGTHENING THE HOME OF INTEGRITY

Just like a house that requires care and maintenance, PPATK's house of integrity also needs regular upkeep. The continuous care and preservation of this home reflect the institution's commitment to maintaining operational quality and readiness in the face of evolving challenges.

Beyond maintenance, PPATK's house of integrity is also equipped with the necessary tools and facilities to support professionalism. Every element of the institution is furnished with up-to-date resources, ensuring its capability to detect and prevent potential money laundering and terrorist financing activities effectively.

LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pada tahun 2024, UKPBJ PPATK mencapai Indeks Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 3,325 dari target 3,75. Pencapaian ini didukung oleh kinerja yang sangat baik pada aspek waktu dengan realisasi di atas 80% dan aspek tingkat layanan dengan tingkat kepuasan stakeholder mencapai 4,37 (internal) dan 4,66 (eksternal).

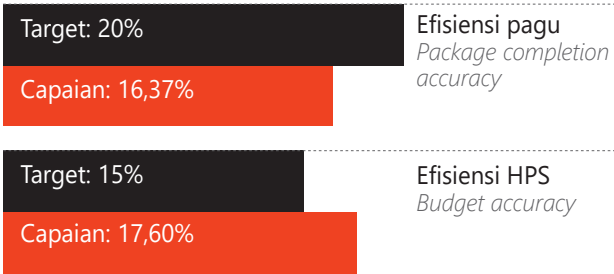
PENCAPAIAN UTAMA UKPBJ PPATK

Key achievements of UKPBJ

01 Aspek Waktu
Timeliness (20%)



02 Aspek Biaya
Cost Efficiency (25%)



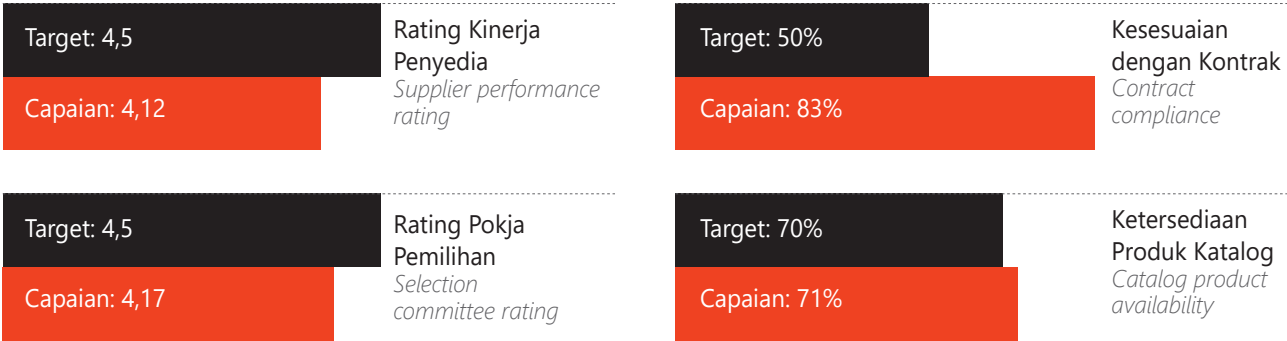
PROCUREMENT ACHIEVEMENTS IN 2024

In 2024, PPATK's Procurement Services Unit (UKPBJ) achieved a Procurement Service Index of 3.325 out of the target 3.75. This success was driven by outstanding performance in timeliness, with over 80% of targets met, and stakeholder satisfaction ratings of 4.37 (internal) and 4.66 (external).

03 Aspek Tingkat Layanan
Service Levels (25%)



04 Aspek Kualitas
Quality (30%)



REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PPATK TAHUN 2024
PPATK PROCUREMENT REALISATION IN 2024

Realisasi Pengadaan Per Metode Pemilihan
Realisation by Selection Method

No	Metode/ Method	Pengumuman Pengadaan Procurement Announcement	Realisasi Realization	Persentase Percentage
1	E-Purchasing	144	124	86,1%
2	Pengadaan Langsung Direct Procurement	253	212	83,8%
3	Dikecualikan Excluded	49	37	75,5%
4	Penunjukan Langsung Direct Appointment	10	9	90%
5	Tender	6	3	50%
6	Seleksi Selection	4	3	75%
		466	388	

Dengan menjaga perawatan dan perlengkapan yang tepat, rumah integritas PPATK dapat terus beroperasi dengan kredibilitas tinggi dalam menjaga keamanan dan integritas sistem keuangan Indonesia.

By ensuring proper care and resourcing, PPATK's house of integrity continues to operate with credibility, safeguarding the integrity and security of Indonesia's financial system.

PERAN INSAN DALAM MENJAGA RUMAH INTEGRITAS

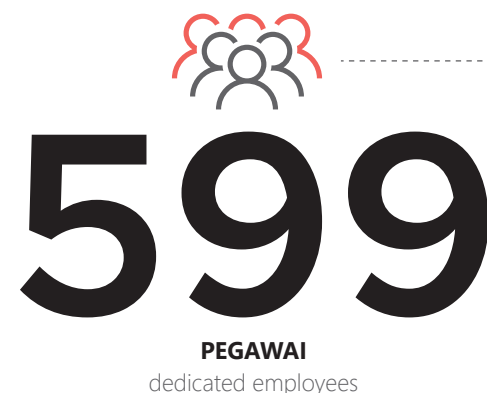
THE ROLE OF INDIVIDUALS IN SAFEGUARDING THE HOUSE OF INTEGRITY

SETIAP individu di PPATK, mulai dari pimpinan hingga staf, memiliki peran krusial dalam menjaga integritas lembaga. Mereka dilatih untuk mengelola data, mengawasi, dan melakukan analisis transaksi mencurigakan, serta berkomitmen untuk menegakkan prinsip anti korupsi dan anti pencucian uang yang mendukung terciptanya rezim anti-pencucian uang di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional, serta teruji integritasnya. PPATK membutuhkan SDM yang mampu menangani berbagai laporan dan pelapor dengan beragam latar belakang, mencakup kondisi geografis yang luas serta beragamnya produk jasa keuangan. Saat ini, PPATK didukung oleh 599 pegawai yang siap menghadapi tantangan tersebut dalam menjaga integritas sistem keuangan Indonesia.

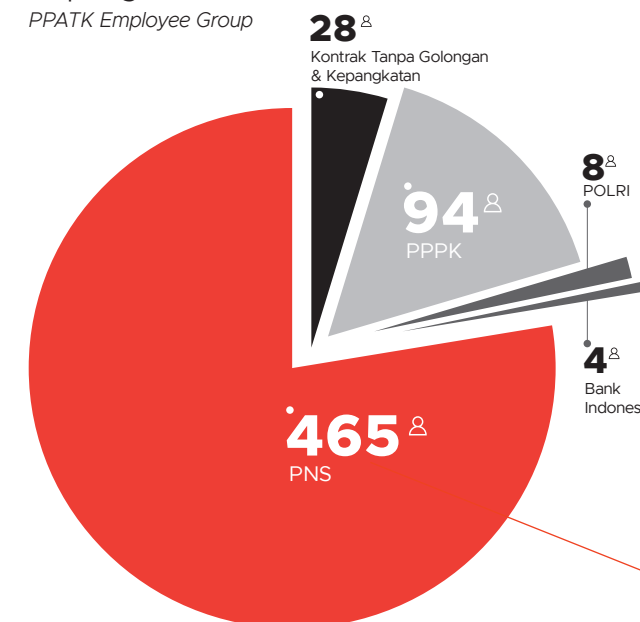
IN the heart of PPATK, every individual—from the leadership to the staff—plays a crucial role in upholding the integrity of the institution. They are trained to manage data, monitor, and analyze suspicious transactions, all while committing themselves to enforce anti-corruption and anti-money laundering principles, which support the creation of a robust anti-money laundering regime in Indonesia.

For this mission to succeed, PPATK requires competent and professional human resources, individuals whose integrity has been tested. The institution needs personnel who can handle a wide range of reports and informants from various backgrounds, spanning across vast geographical regions and diverse financial service products. Today, PPATK is supported by 599 dedicated employees, each prepared to face the challenges of safeguarding Indonesia's financial system.



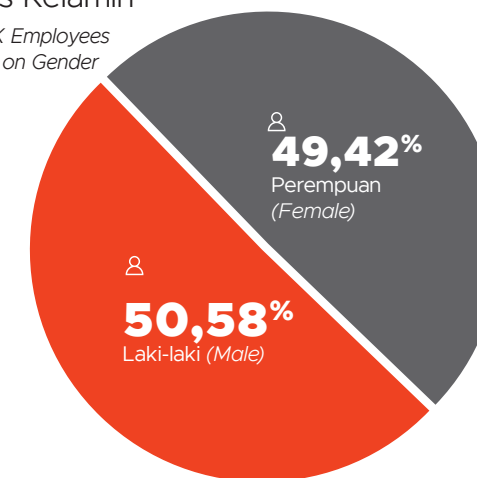
Sumber: Data PPATK diolah (2024)

Statistik Golongan/
Kepangkatan
PPATK Employee Group



Pegawai PPATK Berdasarkan
Jenis Kelamin

PPATK Employees
Based on Gender



465
RINCIAN PNS PPATK
PPATK Civil Servant Details

1 **Pemkab Cianjur**
Government of Kabupaten Cianjur

3 **Badan Pusat Statistik**
Statistics Indonesia

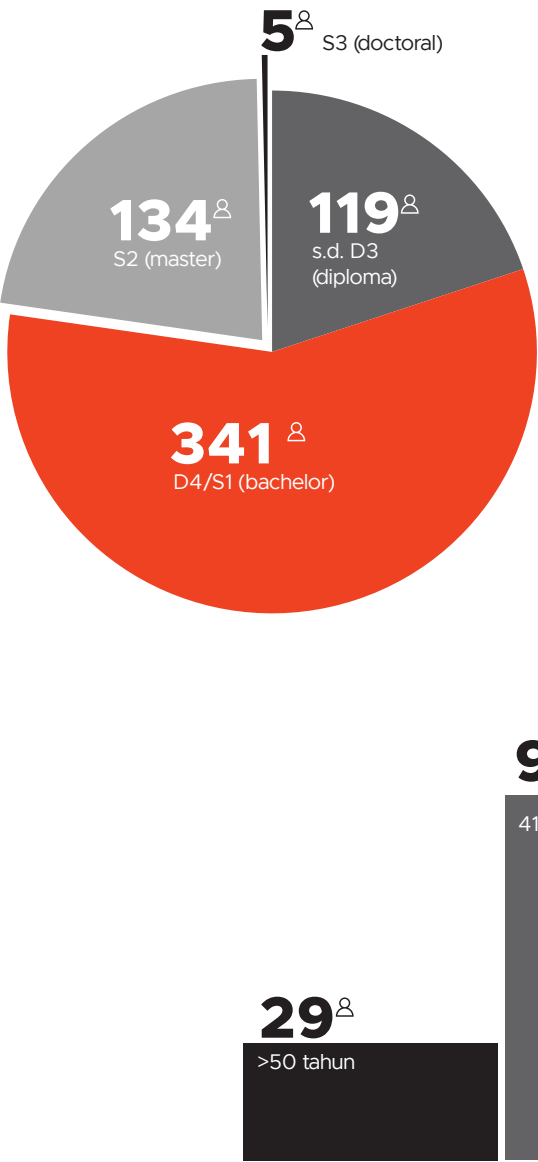
8 **Kementerian Hukum dan HAM**
Ministry of Law and Human Rights

4 **Kejaksaan Agung**
Ministry of Finance

5 **Kementerian Keuangan**
Ministry of Finance

444
PNS Organik PPATK
Permanent employees

Statistik Pendidikan Pegawai
Education Statistics of Employees



Statistik Demografi Rentang
Usia Pegawai
*Demographic Statistics Age Range of
Employees*



Sumber: Data PPATK diolah (2024)

PENGUATAN INSAN PPATK
STRENGTHENING THE PEOPLE OF PPATK

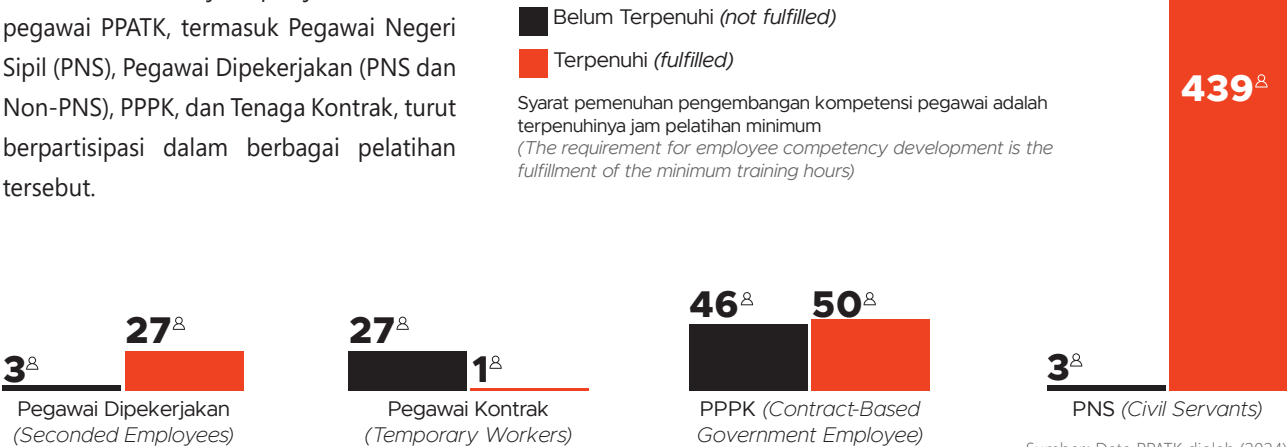
UNTUK meneguhkan tonggak integritas di rumahnya, PPATK senantiasa memperkuat potensi para pegawai melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. PPATK berusaha agar setiap pegawai memiliki kemampuan bekerja dengan jujur dan professional.

Berbagai program pengembangan pegawai telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024, mencakup program berkelanjutan maupun yang baru. Terdapat 4.511 pelatihan yang diikuti, baik yang diselenggarakan oleh pihak eksternal maupun oleh PPATK sendiri serta yang telah memenuhi Jam Pelajaran (JP) maupun yang belum memenuhi jam pelajaran. Seluruh pegawai PPATK, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Dipekerjakan (PNS dan Non-PNS), PPPK, dan Tenaga Kontrak, turut berpartisipasi dalam berbagai pelatihan tersebut.

TO reinforce the foundation of integrity within its institution, PPATK continuously enhances the potential of its employees through ongoing training and competency development. The organization strives to ensure that every employee upholds professionalism and honesty in their work.

Throughout 2024, PPATK has implemented various employee development programs, both ongoing and newly introduced. A total of 4,511 training sessions were attended, organized by both external institutions and PPATK itself, including sessions that met the required learning hours and those that did not. All PPATK personnel—Civil Servants (PNS), Seconded Employees (both PNS and Non-PNS), and Contract-Based Government Employee—actively participated in these training initiatives.

Statistik Pengembangan
Kompetensi Pegawai
Employee Competency Development Statistics



Sumber: Data PPATK diolah (2024)

PPATK bukan hanya menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai internalnya, namun juga para *stakeholder* yang terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, aparat penegak hukum, dan institusi terkait lainnya.

Beyond internal training, PPATK also provides capacity-building programs for key stakeholders involved in the prevention and eradication of money laundering, terrorist financing, and the proliferation of weapons of mass destruction. These training sessions aim to enhance the knowledge and expertise of external entities such as financial institutions, law enforcement agencies, and regulatory bodies.

Tahun 2024, Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK telah melaksanakan 47 pelatihan dengan menggunakan skema pembelajaran yang fleksibel, yaitu *online learning*, *offline learning* (tatap muka), serta *blended learning* (kombinasi *online* dan *offline*). Kegiatan pelatihan ini melibatkan 1.935 peserta dari berbagai kategori, sbb:

- Pelatihan bagi Pihak Pelapor sebanyak 22 kali dengan total 987 peserta;
- Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum (Apgakum) sebanyak 17 kali dengan total 662 peserta;
- Pelatihan bagi Internal PPATK 6 kali pelatihan dengan total 199 peserta;
- Pelatihan bagi Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) 2 kali pelatihan dengan total 87 peserta.

In 2024, the PPATK Center for Education and Training on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (APUPPT) conducted 47 training programs through flexible learning formats, including online learning, in-person sessions, and blended learning (a combination of both). A total of 1,935 participants took part in these sessions, categorized as follows:

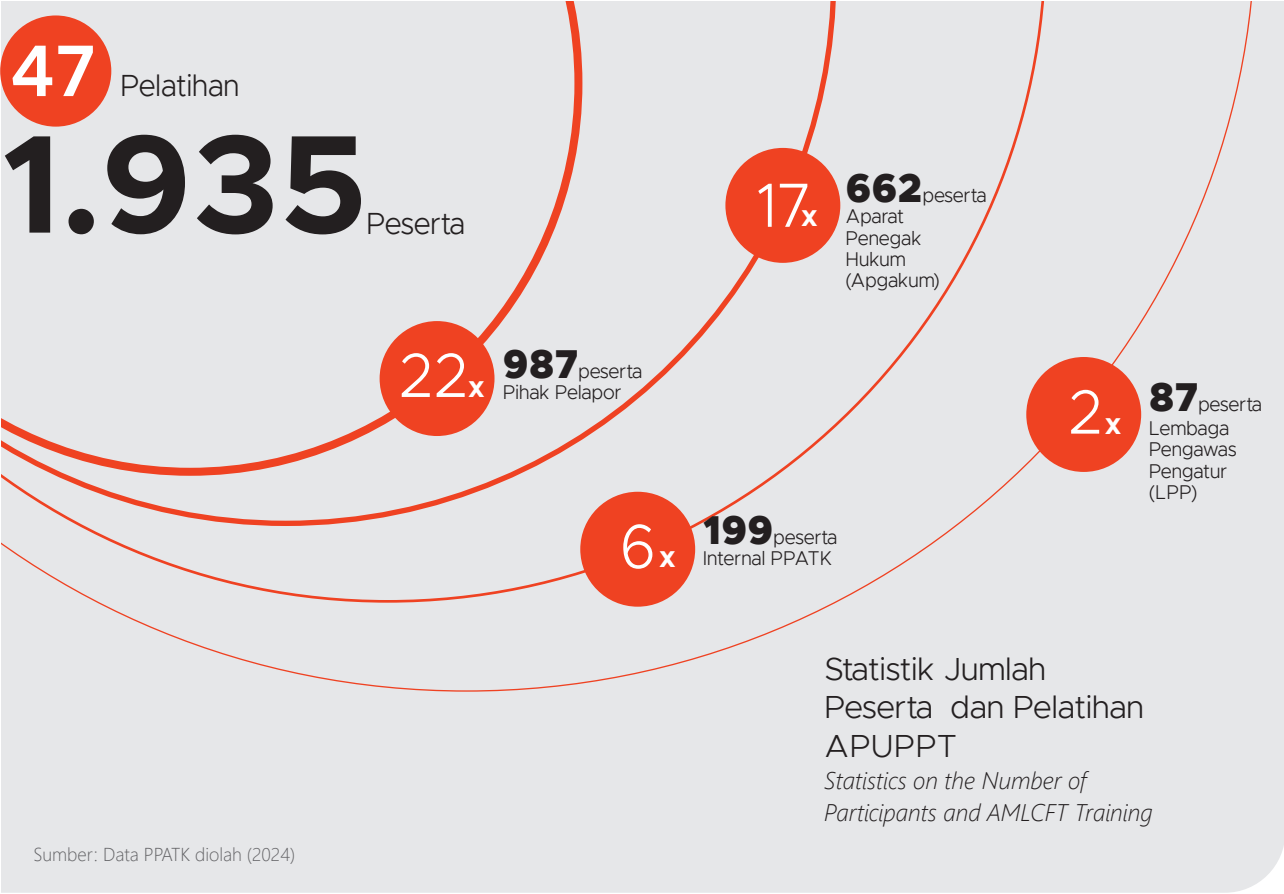
- Training for Reporting Parties: 22 sessions with 987 participants;
- Training for Law Enforcement Agencies (LEAs): 17 sessions with 662 participants;
- Internal PPATK Training: 6 sessions with 199 participants;
- Training for Supervisory and Regulatory Authorities (LPPs): 2 sessions with 87 participants.

By expanding its training initiatives, PPATK ensures that all relevant stakeholders are equipped with the knowledge and skills necessary to detect and address suspicious transactions effectively.

These programs play a crucial role in upholding the integrity of the institution. PPATK remains committed to ensuring that every decision and action taken reflects the values of honesty, transparency, and accountability. A strong foundation of integrity serves as the institution's driving force in safeguarding Indonesia's financial system from the threats of financial crime.

Dengan memperluas cakupan pelatihan, PPATK mengupayakan agar seluruh pihak yang terlibat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendeteksi dan menangani transaksi mencurigakan dengan efektif.

Program-program di atas berperan dalam memelihara integritas di dalam rumah lembaga ini. PPATK memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Rumah integritas PPATK yang solid menjadi kekuatan dalam menjalankan misi lembaga untuk menjaga sistem keuangan Indonesia dari ancaman kejahatan keuangan.



SUMBER DAYA KEUANGAN

FINANCIAL RESOURCES

Sumber daya keuangan PPATK yang mencakup anggaran, memiliki kekuatan besar dalam mendukung tugas dan fungsi strategis lembaga. Sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, anggaran yang tepat, efektif, dan efisien menjadi pilar utama dalam memastikan keberhasilan setiap program dan kebijakan yang dijalankan.

Anggaran keuangan PPATK dapat memperkuat kapasitas operasional untuk melakukan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan, meningkatkan kemampuan teknologi informasi dalam mendeteksi pola transaksi, serta memperluas jaringan kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan keuangan lintas negara. Sumber daya ini juga memberikan keleluasaan bagi PPATK untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, melalui pelatihan dan peningkatan keahlian para analis dan staf yang terlibat dalam tugas krusial.

Selain itu, anggaran yang dialokasikan juga berfungsi sebagai pendorong inovasi di dalam lembaga, memungkinkan PPATK untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi, serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja lembaga. Dengan anggaran yang kuat, PPATK memastikan bahwa setiap langkah yang diambil

Like the lifeblood that sustains a body, PPATK's financial resources—particularly its budget—serve as the driving force behind its strategic mission. As a central institution in the fight against money laundering and the financing of terrorism, PPATK relies on a well-managed, effective, and efficient budget to ensure the success of its programs and policies.

With the right financial support, PPATK strengthens its operational capacity to analyze suspicious financial transactions, enhances its technological capabilities to detect transaction patterns, and expands international cooperation to combat cross-border financial crimes. These resources also empower PPATK to invest in human capital, providing continuous training and skill development for analysts and staff who play a critical role in safeguarding the integrity of the financial system.

Beyond daily operations, the allocated budget acts as a catalyst for innovation, allowing PPATK to adapt to technological advancements and fortify its infrastructure for greater efficiency and effectiveness. A well-managed financial foundation ensures that every step taken in combating financial crimes is carried out with the highest level of accountability and transparency.

dalam memberantas kejahatan keuangan dapat dilaksanakan dengan akuntabilitas yang tinggi dan transparansi yang jelas kepada publik.

Dalam laporan tahun 2024, laporan Keuangan PPATK disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan PPATK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.274.534.261,00. Realisasi Belanja PPATK untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp266.404.815.683,00 atau mencapai 99,77% dari alokasi anggaran sebesar Rp267.207.371.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

URAIAN DESCRIPTION	ANGGARAN SEMULA INITIAL BUDGET	ANGGARAN SETELAH REVISI REVISED BUDGET	REALISASI BELANJA ACTUAL EXPENDITURE	% REALISASI ANGGARAN BUDGET REALIZATION
1	2	3	4	5=4/3
BELANJA PEGAWAI (<i>Employee Expenses</i>)	140.368.909.000,	177.201.534.000,	177.088.426.719,	99,94
BELANJA BARANG (<i>Goods & Service Expenditure</i>)	97.906.197.000,	87.924.717.000,	87.259.482.589,	99,24
BELANJA MODAL (<i>Capital Expenditure</i>)	5.494.520.000,	2.081.120.000,	2.056.906.375,	98,84
JUMLAH BELANJA (<i>Total Expenditure</i>)	243.769.626.000,	267.207.371.000,	266.404.815.683,	99,77

In its 2024 financial report, PPATK adheres to Government Regulation No. 71 of 2010 on Government Accounting Standards (SAP), ensuring sound financial management in the public sector. The report includes the Budget Realization Statement, which compares planned and actual expenditures and revenues from January 1 to December 31, 2024.

For the period ending December 31, 2024, PPATK recorded Non-Tax State Revenue of IDR 1,274,534,261. Meanwhile, its expenditures reached IDR 266,405,523,788, achieving 99.98% of the allocated budget of IDR 267,207,371,000. A summary of the Budget Realization Report for the period ending December 31, 2024, is presented below.

Realisasi Belanja Periode Akhir 31 Desember 2024

Budget Realisation Report for the Period Ended 31 December 2024

99,77%

MENDANAI PERLAWANAN KEJAHATAN KEUANGAN

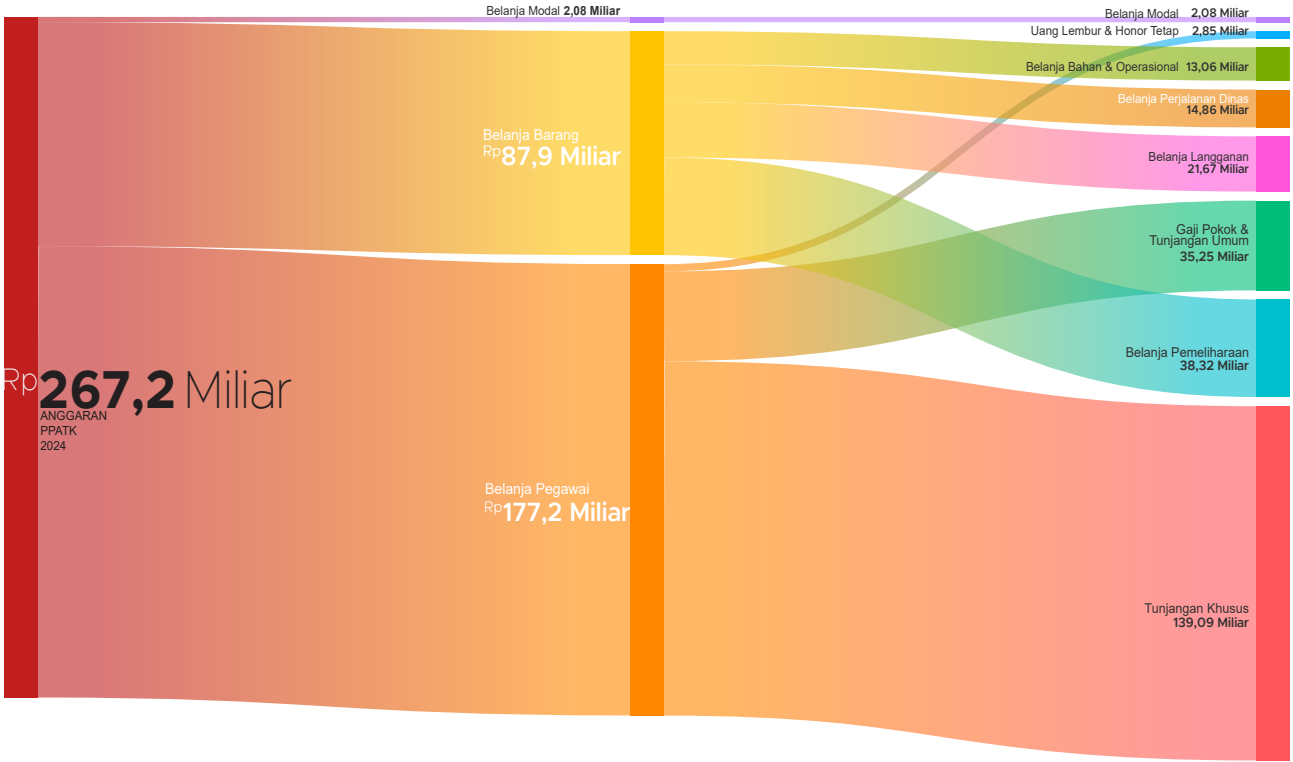
Anggaran bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan sumber daya vital yang memastikan PPATK menjalankan tugasnya menjaga integritas sistem keuangan negara. Pada tahun 2024, PPATK menerima alokasi anggaran sebesar Rp267,2 miliar, yang terbagi dalam tiga kategori utama: belanja barang Rp87,9 miliar, belanja pegawai Rp177,2 miliar, dan belanja modal Rp2,08 miliar.

Belanja barang mendukung kebutuhan operasional, mulai dari perawatan gedung hingga fasilitas kerja. Belanja pegawai menopang sumber daya manusia agar tetap kompetitif dan profesional. Sementara belanja modal, meskipun lebih kecil, menjadi investasi dalam aset jangka panjang.

FUNDING THE FIGHT AGAINST FINANCIAL CRIME

A budget is not just numbers in a financial report; it is a vital resource that enables PPATK to fulfill its mission of safeguarding the integrity of the national financial system. In 2024, PPATK received an allocated budget of IDR 267.2 billion, divided into three main categories: goods expenditure (IDR 87.9 billion), personnel expenditure (IDR 177.2 billion), and capital expenditure (IDR 2.08 billion).

Goods expenditure supports operational needs, from building maintenance to workplace facilities. Personnel expenditure ensures that human resources remain competitive and professional. Meanwhile, although smaller in portion, capital expenditure serves as a long-term investment in essential assets.



Grafik (Sankey Chart) Kekuatan Anggaran Lembaga Tahun 2024

Sankey Chart of Institutional Budget Strength in 2024

Pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran menjadi kunci efektivitas lembaga. Dengan strategi yang baik, PPATK dapat terus mengukuhkan perannya di tingkat nasional maupun internasional dalam memberantas kejahatan keuangan. Setiap rupiah bukan hanya angka, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih kuat dan aman.

Transparent and well-targeted budget management is key to the institution's effectiveness. With the right strategy, PPATK can continue strengthening its role both nationally and internationally in combating financial crimes. Every rupiah is not just a figure but a responsibility that must be managed with full accountability to create a stronger and more secure financial system.

NERACA

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
Per 31 Desember 2024 - Unaudited (Dalam Rupiah)

NAMA AKUN <i>Account Name</i>	"JUMLAH Amount"		"Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)"	
	2024	2023	Jumlah /Amount	%
ASET (ASSET)				
Aset Lancar (Current Assets)	13.886.372.569,	6.010.564.571	7.875.807.998	131,03
Aset Tetap (Fixed Assets)	477.087.333.475,	496.053.113.127	(18.965.779.652)	(3,82)
Aset Lainnya (Other Assets)	20.374.708.388,	18.872.648.333	1.502.060.055	7,96
JUMLAH ASET (TOTAL ASSETS)	511.348.414.432,	520.936.326.031	(9.587.911.599)	(1,84)
KEWAJIBAN (LIABILITIES)				
Kewajiban Jangka Pendek (Current Liabilities)	9.887.270.401,	1.639.222.662	8.248.047.739	503,17
JUMLAH KEWAJIBAN (TOTAL LIABILITIES)	9.887.270.401,	1.639.222.662	8.248.047.739	503,17
EKUITAS (EQUITY)				
Equity	501.461.144.031,	519.297.103.369	(17.835.959.338)	(3,43)
TOTAL EQUITY	501.461.144.031,	519.297.103.369	(17.835.959.338)	(3,43)
TOTAL LIABILITES & EQUITY	511.348.414.432,	520.936.326.031	(9.587.911.599)	(1,84)

Sumber: Data PPATK diolah (2024)

BALANCE SHEET

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center
As of December 31, 2024 - UNAUDITED (Amounts in Rupiah)

PENJAGA PINTU RUMAH INTEGRITAS

THE GATEKEEPERS OF THE HOUSE OF INTEGRITY

DALAM rumah integritas yang diampu PPATK, arsip adalah pelindung yang diam namun teguh. Ibarat penjaga yang setia menjaga pintu masuk menuju ruang-ruang rahasia. Arsip-arsip ini, meskipun tampak sederhana, menyimpan cerita dan bukti yang menghubungkan titik-titik yang tersembunyi dalam transaksi. Mereka adalah jejak-jejak yang tidak dapat diabaikan, seperti tapak kaki yang tertinggal di pasir yang mengarah pada fakta. Setiap arsip yang tercatat, baik itu digital maupun fisik, adalah sebuah potret dari momen waktu yang telah berlalu, namun juga menjadi cermin yang memantulkan tindakan dan keputusan masa depan. Ketika disusun dengan cermat, arsip menjadi jaring pengaman yang memastikan tidak ada kebenaran yang hilang dan tidak ada langkah yang tertinggal.

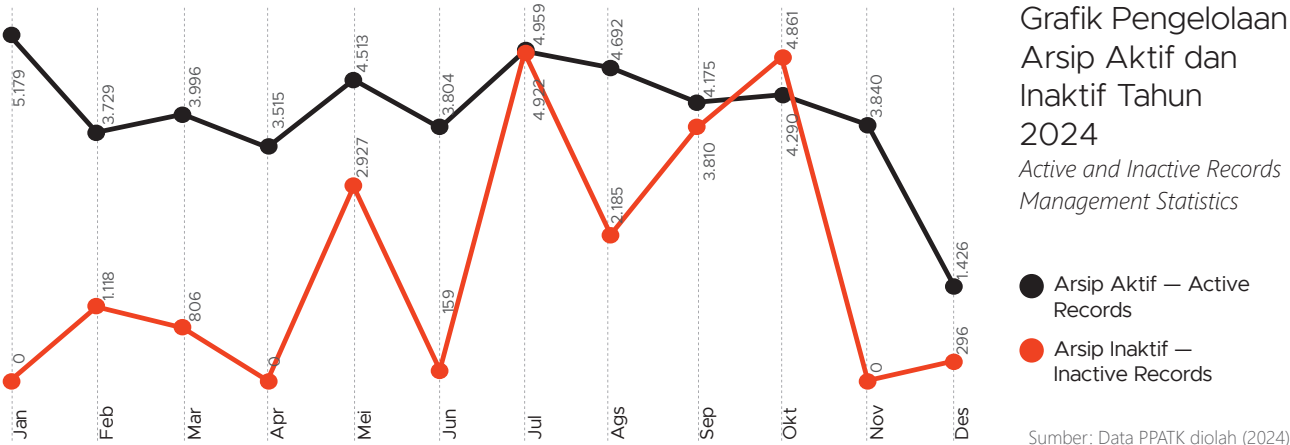
Pengelolaan arsip dilaksanakan oleh Biro Umum PPATK. Sepanjang tahun 2024, naskah yang tercipta pada Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

WITHIN the walls of PPATK’s house of integrity, archives stand as silent yet unwavering guardians. They are like loyal sentinels safeguarding the gateway to hidden chambers of truth. Though seemingly modest, these archives hold stories and evidence that weave together the hidden threads of financial transactions. They are traces, like footprints in the sand, pointing toward facts. Each archived record, whether digital or physical, captures a snapshot of a moment in time and serves as a mirror reflecting actions and decisions that shape the future. When meticulously organized, these archives become a safety net, ensuring no truth is lost, and no step is overlooked.

The responsibility for managing these archives lies with PPATK’s General Affairs Bureau. In 2024, a remarkable 48,118 documents were created within the Dynamic Archival Information System (SIKD). Additionally, the Archival Unit

sebanyak 48.118 naskah. Kemudian, Arsip Inaktif yang dikelola oleh Unit Kearsipan periode Tahun 2024 sebanyak 21.084 berkas. Biro Umum juga melakukan Penyusutan arsip berupa Pemusnahan Arsip Inaktif yang berasal dari Biro Perencanaan dan Keuangan periode Tahun 2007 s.d. 2012 yang sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara, sebanyak 31 nomor yang terdiri dari 32 berkas. Selain itu telah dilaksanakan pula Penyerahan Arsip Statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sebanyak 36 berkas arsip. Arsip yang diserahkan oleh PPATK berupa arsip penanganan pandemi COVID-19 dengan media kertas dan elektronik (foto).

managed 21,084 inactive files from the same year. The Bureau also carried out a significant reduction process, including the destruction of inactive archives originating from the Planning and Finance Bureau, covering the years 2007 to 2012. These records, having exceeded their retention period and deemed irrelevant by the Retention Schedule (JRA), were destroyed in alignment with regulations and with assurance that they bore no legal relevance to any ongoing cases—amounting to 31 entries consisting of 32 files. Furthermore, the Bureau transferred 36 archival files of historical value to the National Archives of the Republic of Indonesia. Among these were records documenting PPATK’s role in handling the COVID-19 pandemic, preserved in both paper and electronic formats, including photographs.



Seperti pelita yang menerangi jalan yang gelap, arsip memberikan penerangan dalam proses audit dan evaluasi, menjaga transparansi dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh PPATK.

Like a lantern illuminating a darkened path, archives serve as a guiding light during audits and evaluations, safeguarding transparency in every action taken by PPATK.

48.118

Arsip Aktif - *Active Records*

21.084

Arsip Inaktif - *Inactive Records*

36

Penyerahan Arsip Statis — *Transfer of Permanent Records*

32

Pemusnahan Arsip — *Records Disposal*

Sumber: Data PPATK diolah (2024)

DENYUT TEKNOLOGI INFORMASI DI JANTUNG PPATK

THE PULSE OF INFORMATION TECHNOLOGY AT THE HEART OF PPATK

Teknologi informasi (TI) adalah jantung dari integritas PPATK, memainkan peran vital dalam memastikan setiap aktivitas berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Layaknya jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, TI memompa data dan informasi penting ke berbagai bagian sistem, memungkinkan analisis yang tajam, pengambilan keputusan yang cepat, serta tindak lanjut yang efektif untuk menghadapi ancaman keuangan.

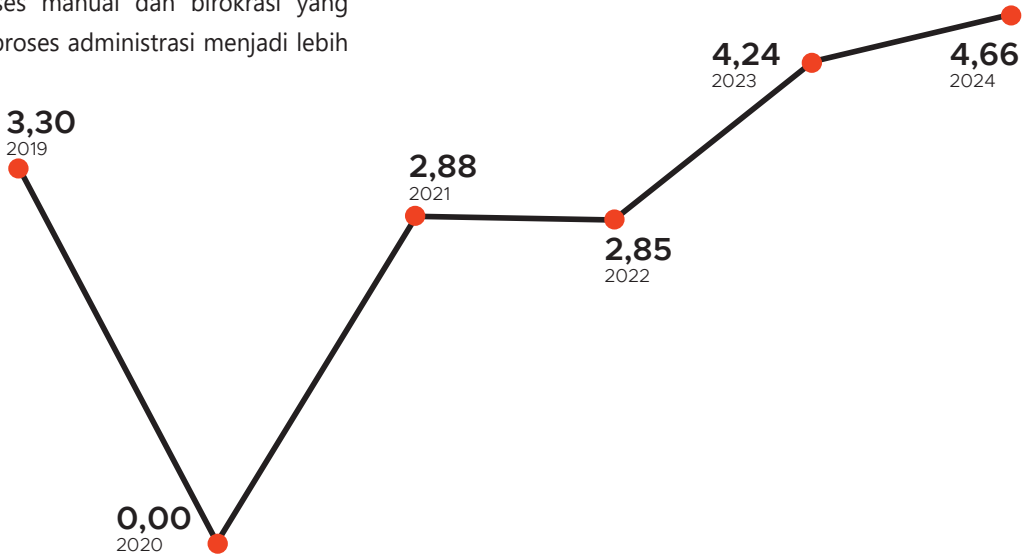
Tahun 2024 adalah momen bersejarah bagi PPATK. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indikator yang mengukur efisiensi digitalisasi dalam birokrasi, mencapai angka 4,66. SPBE penting diterapkan untuk mengurangi proses manual dan birokrasi yang berbelit-belit, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien.

In the heart of PPATK, there's a rhythm that never falters. It's not a heartbeat in the traditional sense, but one that pumps life into every corner of the organization. This heartbeat is powered by Information Technology (IT), the invisible force that drives the integrity, transparency, and accountability that define PPATK's mission.

Imagine the heart as the lifeblood of a body, constantly circulating blood to keep everything moving. For PPATK, that lifeblood is data—pulsing through the system, guiding every decision, every analysis, and every step taken to protect the nation from financial threats. Just as the heart ensures the body's survival, IT ensures the survival of PPATK's mission, keeping everything in motion with precision and speed.

Grafik
Indeks Nilai
SPBE
SPBE Index Score

Sumber: Data PPATK diolah (2024)



Namun, cerita ini tidak berhenti di situ. Sejak 2019, PPATK terus meningkatkan tata kelola TI-nya yang tercermin dalam Indeks Tata Kelola TI (*Information Technology Governance*). Indeks Tata Kelola TI merupakan suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas dan kualitas pengelolaan Teknologi Informasi (TI) dalam suatu organisasi.

Tahun 2024 menjadi puncak keberhasilan dengan indeks tertinggi, 4,09, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa setiap proses TI di organisasi ini dilakukan dengan standar terbaik. Dari dokumentasi hingga komunikasi, semuanya dikelola dengan rapi, mencerminkan budaya kerja yang transparan dan akuntabel.

Teknologi informasi dalam PPATK adalah jantung yang tak pernah berhenti berdetak. Ia memastikan dan melindungi data-data, demi menciptakan sebuah fondasi yang kuat untuk sebuah sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Tabel Indeks Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance Index

Tahun/Year	Nilai/Score
2019	3,10
2020	3,20
2021	2,88
2022	2,85
2023	4,02
2024	4,09

Sumber: Data PPATK diolah (2024)

The year 2024 marked a defining moment in this journey. A moment when the organization's commitment to innovation and efficiency bore fruit. The Electronic-Based Government System (SPBE) Index—a measure of how effectively the bureaucracy has embraced digitalization—reached an impressive score of **4.66**. It wasn't just a number; it was a testament to the relentless efforts to cut through red tape and bureaucracy, to streamline processes and create an environment where every administrative step is quicker, simpler, and more efficient.

But the journey didn't stop there. Since 2019, PPATK had been building something bigger: a solid structure of IT governance, one that aligned with the highest standards of transparency and accountability. The Information Technology Governance Index, which measures the effectiveness of IT management, reflected this growth, reaching a remarkable score of 4.09 in 2024—PPATK's highest achievement yet. It wasn't just about technology—it was about culture. A culture where every system, every process, was documented, communicated, and executed with the utmost care.

In PPATK, technology is more than just a tool. It is the heartbeat of an organization that stands guard against financial crime. It protects the lifeblood of the system: data. And in doing so, it creates a foundation that is strong, transparent, accountable, and unwavering.

Through every pulse of data, PPATK continues to work toward building a system that adapts to the evolving challenges ahead. Like a heartbeat that quietly sustains life, the organization remains committed to its mission, humbly supporting the efforts to safeguard financial integrity and contribute to a just and transparent system for all.

PENGAWAS INTEGRITAS

GUARDIANS OF INTEGRITY

INSPEKTORAT PPATK adalah penjaga setia yang mengawasi rumah integritas dengan penuh ketelitian dan kewaspadaan. Seperti seorang arsitek yang memastikan setiap batu bata terpasang dengan sempurna, Inspektorat memastikan setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil lembaga, tetap sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dan transparansi.

Mereka adalah mata yang tidak pernah terpejam, mengawasi setiap sudut rumah untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimasuki oleh ketidakwajaran. Bagi penjaga pintu yang setia, mereka menilai dan memverifikasi, menjaga agar hanya yang benar dan sah yang dapat melewati ambang batas.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkomitmen untuk selalu meningkatkan peran dan layanan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan PPATK. Sebagai penjaga rumah integritas, Inspektorat berkomitmen untuk memperkuat peran dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam menjaga keamanan dan transparansi rumah ini.

Hal ini sejalan dengan tema besar yang diusung Inspektorat dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Tahun 2024, yaitu “Mewujudkan Integritas dan Efektivitas Peran PPATK Pada Tahun Politik Melalui *Excellent Supervision Services* Berbasis Teknologi Informasi”. Pada kegiatan tersebut, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, bersama dengan Plh. Inspektur, Nelson Manalu, menetapkan Kebijakan Pengawasan dan Program

Like vigilant sentinels standing watch over a house built on integrity, the PPATK Inspectorate serves as the unwavering guardian of transparency and accountability. Just as an architect ensures that every brick is perfectly laid, the Inspectorate meticulously oversees every policy, decision, and action taken within the institution, ensuring they remain firmly aligned with the principles of honesty and openness.

Their eyes never close, scanning every corner to detect any irregularities that may attempt to slip through unseen. Like steadfast gatekeepers, they scrutinize and verify, allowing only what is right and lawful to pass the threshold. Their role as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is not just a duty but a commitment—one of continuous improvement, ensuring that the oversight and services they provide to all stakeholders within PPATK remain sharp, relevant, and adaptive to the ever-evolving landscape.

This commitment is reflected in the core theme of the 2024 Inspectorate Supervision Coordination Meeting: “Realizing Integrity and Enhancing PPATK’s Role in the Political Year Through Excellent Supervision Services Based on Information Technology.” During this event, PPATK Head Ivan Yustiavandana, together with Acting Inspector Nelson Manalu, laid out the 2024 Supervision



Inspektorat PPATK adalah penjaga setia yang mengawasi rumah integritas dengan penuh ketelitian dan kewaspadaan

The PPATK Inspectorate serves as the unwavering guardian of transparency and accountability

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat 2024, yang menjadi arah dan acuan pelaksanaan pengawasan Inspektorat di tahun 2024.

Ibarat mengawasi setiap sudut rumah melalui kamera canggih, Inspektorat memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan untuk memastikan semua aktivitas berjalan sesuai aturan. Aplikasi *e-Consult*, bagaikan alat komunikasi yang memperkuat keterhubungan antara penjaga rumah dan penghuni, memungkinkan konsultasi yang lebih mudah dan transparan. Lebih lanjut, *Whistleblowing System* dan *Sentiment Analysis* menjadi

Policy and Annual Supervision Work Program (PKPT)—a strategic blueprint guiding the Inspectorate’s oversight efforts throughout the year.

Like high-tech surveillance cameras monitoring every corner of a house, the Inspectorate harnesses the Supervisory Management Information System to ensure all activities remain compliant with regulations. The *e-Consult* application acts as a direct communication bridge between the guardians and the institution’s members, enabling seamless and transparent consultations. Meanwhile, the *Whistleblowing System* and

“alarm” yang siaga, memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan dan melindungi rumah integritas dari ancaman yang mungkin menggerogoti. Dengan pemanfaatan teknologi ini, Inspektorat menjaga agar rumah PPAK tetap aman, terhindar dari penyimpangan, dan berdiri teguh di tengah dinamika politik yang penuh tantangan.

Pada tahun 2024, Inspektorat juga telah mengawasi program-program prioritas di lingkungan PPAK, seperti:

NO	GIAT PENGAWASAN
1	Audit atas Proses Bisnis Layanan Umum PPAK
2	Audit atas Proses Bisnis Manajemen <i>Good Public Governance</i>
3	Audit atas Proses Bisnis Analisis dan Pemeriksaan
4	Audit atas Proses Bisnis Strategi dan Kerja Sama
5	Audit atas Proses Bisnis Layanan Pengelolaan Perbendaharaan PPAK
6	Audit atas Pengelolaan Kepegawaian PPAK
7	Audit atas Pengelolaan <i>File Storage</i> PPAK
8	<i>Probity Audit</i> Pembangunan Studio Multimedia PPAK
9	Pemantauan Status Tindak Lanjut HA/HP/ Informasi PPAK
10	Pemantauan Media Sosial Pegawai PPAK
11	Reviu Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di PPAK
12	Pemeriksaan terkait Judi <i>Online</i> yang di lingkungan PPAK
13	Evaluasi atas Penerapan Nilai-nilai Organisasi oleh Pejabat dan Pegawai PPAK

Sumber: Data PPAK diolah (2024)

Sentiment Analysis function as ever-alert alarms, providing early warnings of potential deviations and safeguarding the house of integrity from internal and external threats.

Through the strategic use of technology, the Inspectorate ensures that PPAK remains secure, resilient, and unyielding in the face of political turbulence—standing firm as the ultimate bastion of integrity.

In 2024, the Inspectorate has also overseen priority programmes within PPAK, such as:

NO	SUPERVISION PROGRAMME
1	Audit of General Service Business Processes at PPAK
2	Audit of Good Public Governance Management Business Processes
3	Audit of Analysis and Examination Business Processes
4	Audit of Strategy and Cooperation Business Processes
5	Audit of Treasury Management Services Business Processes at PPAK
6	Audit of Human Resource Management at PPAK
7	Audit of File Storage Management at PPAK
8	Probity Audit for the Development of PPAK Multimedia Studio
9	Monitoring the Follow-Up Status of HA/HP/ Information at PPAK
10	Monitoring of PPAK Employees’ Social Media Activity
11	Review of Procurement Contracts for Goods/Services at PPAK
12	Inspection Related to Online Gambling within PPAK
13	Evaluation of Organizational Value Implementation by PPAK Officials and Employees





Chapter 3

Contributing Integrity

Integritas ibarat kompas yang menuntun langkah, fondasi yang menguatkan bangunan cita-cita, dan akar kuat yang menjaga setiap pohon keputusan agar tetap teguh di jalan yang benar. Para kontributor integritas adalah prajurit yang memastikan bahwa perjalanan menuju tujuan besar tidak tersesat, bersih, jujur, dan penuh tanggung jawab.

Integrity is like a compass that guides our steps, a foundation that strengthens the structure of our aspirations, and a strong root that keeps every decision tree firm on the right path. Contributors of integrity are the warriors who ensure that the journey toward a great goal stays on course—clean, honest, and full of responsibility.

Kontributor Integritas

Contributing Integrity



INTEGRITAS bagaikan fondasi yang kokoh di tengah derasnya arus tantangan. Di dunia yang penuh gejolak ini, kepatuhan dari pihak pelapor dan laporan pengaduan masyarakat PPATK seperti pilar yang menjaga agar nilai kejujuran dan tanggung jawab tetap tegak. Setiap laporan yang disampaikan adalah percikan api yang menyulut kesadaran kolektif, membakar kemauan untuk bertindak dengan prinsip yang benar. Melalui suara-suara yang muncul dari pelaporan dan pengaduan, kita membangun benteng kuat yang menghalau segala bentuk tindakan yang merusak integritas bangsa. Kepatuhan dalam melaporkan bukan hanya kewajiban, tetapi juga kontribusi untuk menciptakan ruang yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari praktek yang mencemari.

INTEGRITY is like a solid foundation, standing firm amidst the relentless currents of challenges. In this turbulent world, compliance from reporting entities and public complaints to PPATK serve as pillars that uphold the values of honesty and accountability. Every report submitted is a spark that ignites collective awareness, fueling the determination to act with the right principles. Through the voices raised in reporting and complaints, we construct a strong fortress that repels any actions that threaten the nation's integrity. Compliance in reporting is not merely an obligation—it is a contribution toward creating a cleaner, more transparent space, free from corrupt practices.

Pilar yang Menopang Rumah Kebenaran

The Pillars That Uphold the House of Truth

DI BALIK setiap upaya penegakan integritas dalam sistem keuangan Indonesia, terdapat pihak pelapor individu dan institusi yang berdiri sebagai penjaga awal. Mereka adalah mata yang tajam dan suara yang lantang, memastikan bahwa kebenaran tidak tenggelam dalam riuh rendah kejahatan finansial.

Tidak mudah menjadi pihak pelapor. Dibutuhkan keberanian untuk mengungkap sesuatu yang mencurigakan, meskipun terkadang berada di bawah bayang-bayang risiko. Namun, justru dalam keberanian itulah nilai integritas menjadi nyata. Setiap laporan transaksi mencurigakan yang mereka kirimkan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pernyataan tegas bahwa kebenaran lebih kuat dari kecurangan.

Pihak pelapor adalah perpanjangan tangan keadilan. Mereka menyaring, menelaah, dan mengidentifikasi pola yang bisa saja mengancam kestabilan keuangan negara. Dalam setiap laporan yang mereka sampaikan, ada pesan mendalam bahwa kejahatan tidak akan pernah dibiarkan berkembang tanpa perlawanan.

Dalam peran ini, PPATK melalui Direktorat Pelaporan adalah juru bangun yang mengelola bahan-bahan yang diterima dari pihak pelapor. Laporan transaksi mencurigakan adalah 'batu bata utama' dalam merancang analisis yang kuat untuk memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme (TPPT). Setiap laporan adalah potongan puzzle yang, bila disatukan dengan cermat, membentuk gambaran besar transaksi.

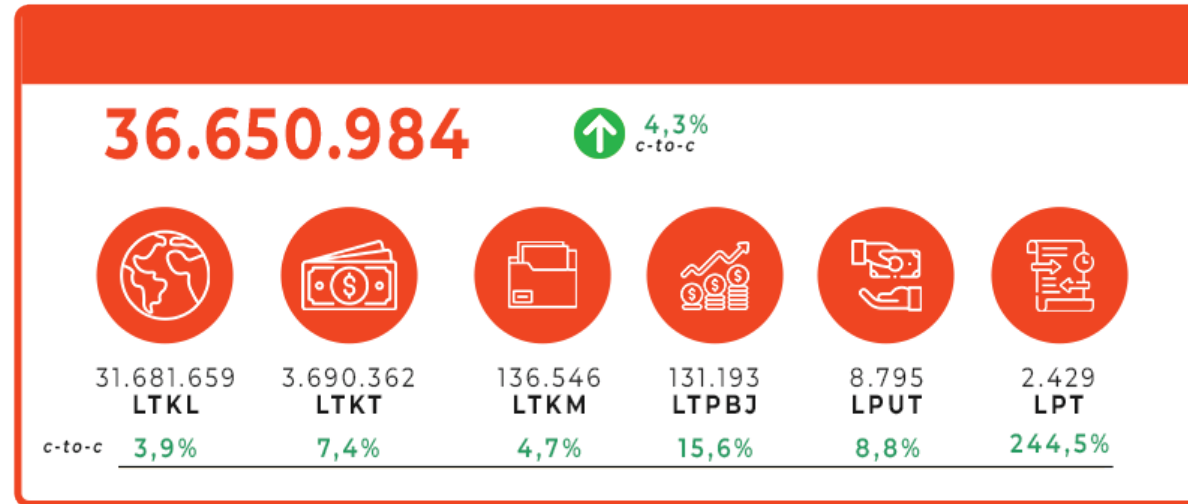
BEHIND every effort to uphold integrity in Indonesia's financial system stand the reporting entities—individuals and institutions who serve as the first line of defense. They are the sharp eyes and resolute voices, ensuring that truth is not drowned out by the clamor of financial crime.

Being a reporting entity is no easy task. It takes courage to expose suspicious activities, often under the looming shadow of risk. Yet, it is in this very act of bravery that integrity finds its true meaning. Every suspicious transaction report they submit is more than just an administrative document—it is a firm declaration that truth is stronger than deception.

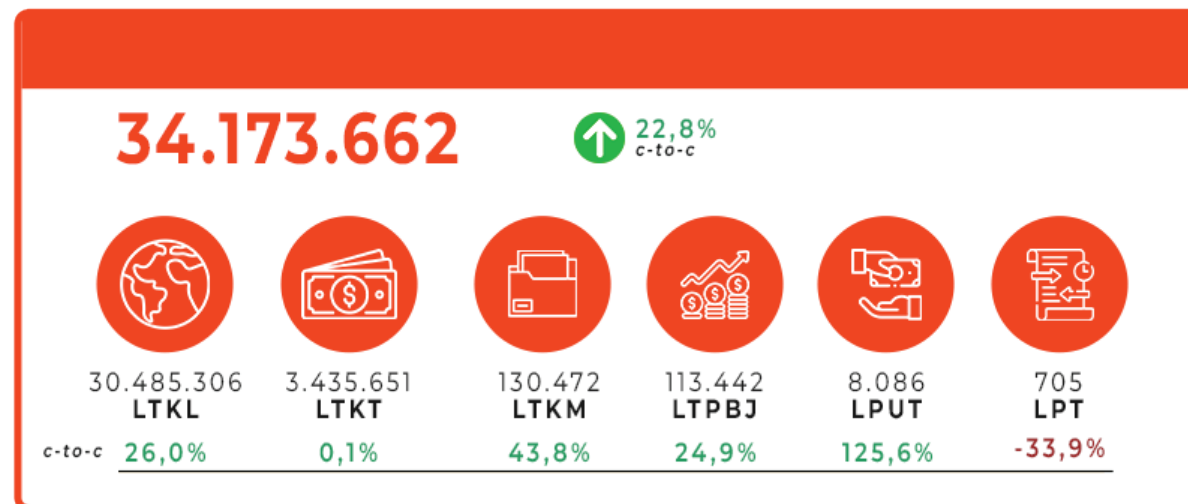
These reporters are the extended hands of justice. They filter, analyze, and uncover patterns that could threaten the stability of the nation's financial system. Within every report they submit lies a powerful message: crime will never be allowed to flourish unchallenged.

In this role, PPATK, through the Directorate of Reporting, serves as the master builder, carefully managing the materials received from reporting entities. Suspicious transaction reports are the "cornerstones" in constructing robust analyses to combat and prevent money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT). Each report is a puzzle piece that, when meticulously assembled, reveals the bigger picture of justice.

Statistik Laporan yang Diterima PPATK Tahun 2024



Statistik Laporan yang Diterima PPATK Tahun 2023



Perubahan c-to-c merupakan perbandingan Jan-Des 2024 terhadap Jan-Des 2023
C-to-C growth compares the period from January to December 2024 with the same period in 2023

Patuh itu Baik: Menjaga Garis Lurus

Compliance is Virtue: Upholding the Straight Path



DALAM ekosistem keuangan yang luas, ada begitu banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang ingin menyalahgunakan sistem. Direktorat Kepatuhan hadir untuk menutup celah-celah itu. Melalui pembinaan terhadap lembaga pelapor, evaluasi sistem kepatuhan, dan penguatan regulasi, mereka memastikan bahwa kejahatan finansial tidak menemukan ruang untuk berkembang.

Namun, menegakkan kepatuhan bukan sekadar memastikan laporan masuk tepat waktu atau prosedur dipatuhi. Ini tentang membangun budaya kejujuran di setiap level. Setiap kebijakan yang diterapkan, setiap audit yang dilakukan, dan setiap rekomendasi yang diberikan bukan hanya sekadar tugas administratif, tetapi langkah konkret dalam membangun tembok integritas yang kokoh.

IN the vast financial ecosystem, countless gaps can be exploited by those seeking to manipulate the system. The Directorate of Compliance stands as the safeguard, sealing these vulnerabilities. Through guidance for reporting institutions, compliance system evaluations, and regulatory reinforcement, they ensure that financial crime finds no space to thrive.

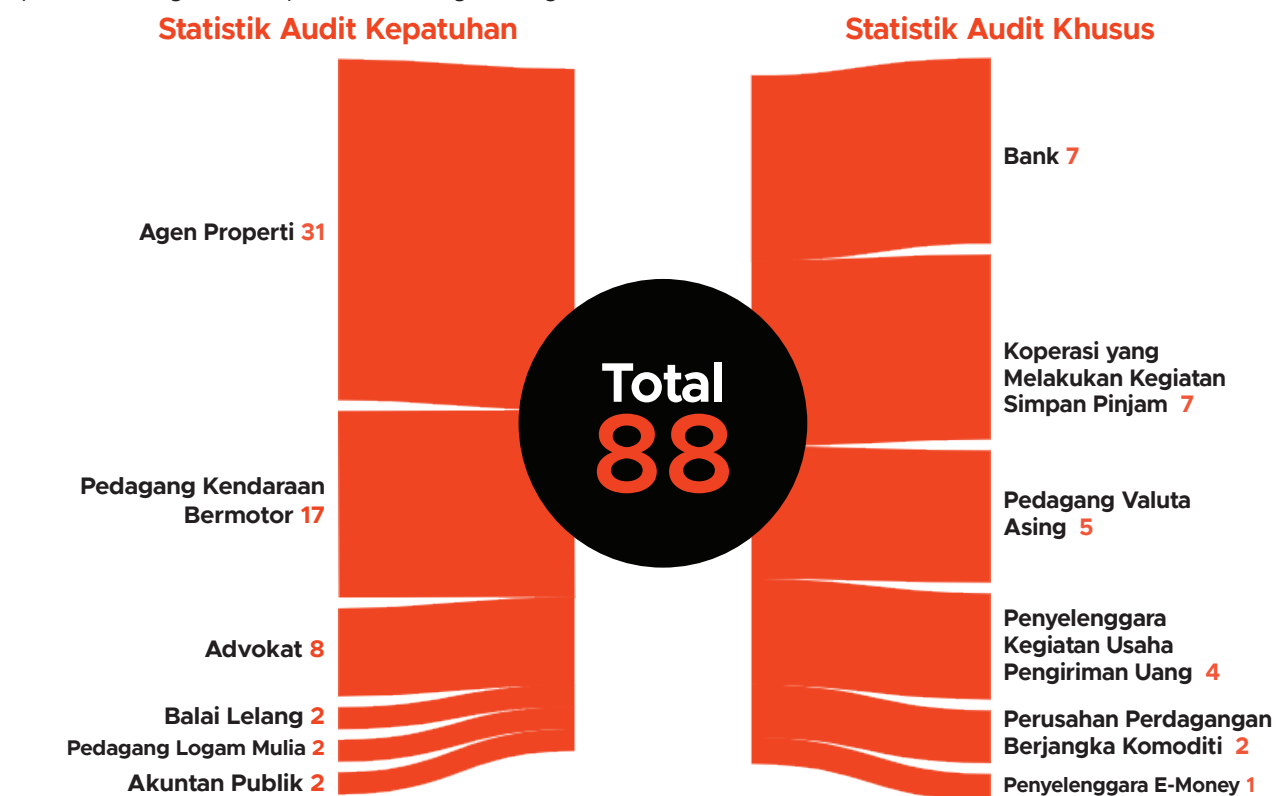
However, enforcing compliance is more than just ensuring timely reports or adherence to procedures. It is about cultivating a culture of honesty at every level. Every policy implemented, every audit conducted, and every recommendation issued is not merely an administrative task—it is a concrete step in building an unshakable wall of integrity.

Memperkuat Pilar Rumah: Pembinaan Pihak Pelapor

Strengthening the Pillars of the House: Guiding the Reporting Entities

PPATK secara konsisten memperbaiki struktur rumah melalui audit, asistensi, bimbingan teknis, dan pengenaan sanksi. Tahun 2024, PPATK telah melaksanakan 88 audit yang terdiri dari 26 audit pada sektor Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan 62 audit pada sektor Penyedia Barang/ Jasa dan Profesi (PBJP). Audit ini memastikan bahwa setiap pilar berdiri tegak sesuai panduan undang-undang.

PPATK continuously reinforces the foundation of integrity through audits, assistance, technical guidance, and the imposition of sanctions. In 2024, PPATK conducted 88 audits, comprising 26 audits in the Financial Services Providers (PJK) sector and 62 audits in the Goods/Services Providers and Professions (PBJP) sector. These audits ensure that every pillar stands firm, aligned with legal mandates.

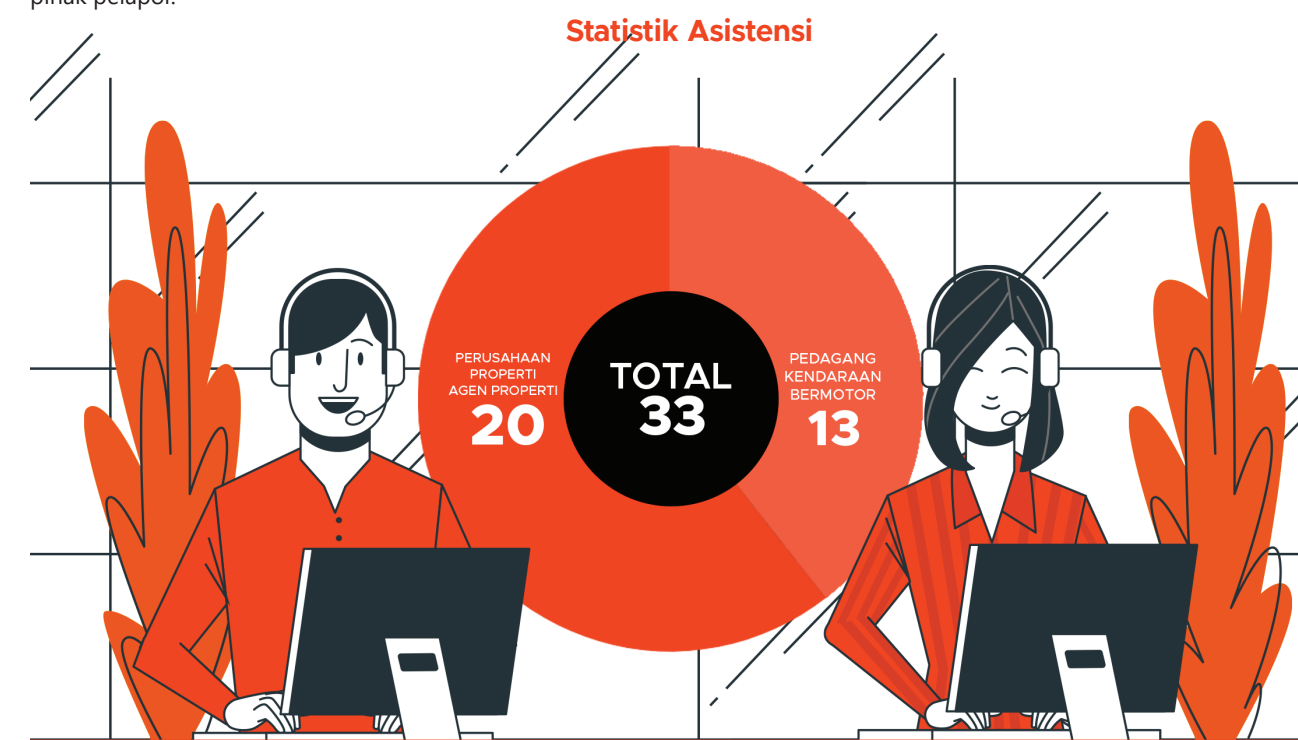


Setelah audit, PPATK menyampaikan rekomendasi kepada Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) untuk memperbaiki atau memberi sanksi pada pilar yang tidak patuh. Dalam beberapa kasus, PPATK sebagai LPP langsung menangani pembinaan hingga pengenaan sanksi untuk memastikan setiap elemen rumah tetap selaras dengan nilai integritas.

Tugas lain sebagai LPP, PPATK juga melaksanakan pemantauan pilar-pilar melalui survei aktivitas usaha. Kegiatan asistensi dilakukan terhadap pilar pihak pelapor yang tidak memberikan feedback atas kegiatan survei aktivitas berusaha. Adapun tujuan kegiatan asistensi adalah untuk memastikan keberlangsungan kegiatan usaha pihak pelapor dengan mengunjungi secara langsung ke kantor pihak pelapor.

Following the audits, PPATK provides recommendations to the Supervisory and Regulatory Authorities (LPP) to either implement corrective measures or impose sanctions on non-compliant pillars. In certain cases, where PPATK itself serves as the LPP, it directly oversees the guidance process and enforces sanctions to ensure that every element of the house remains aligned with the principles of integrity.

As part of its role as an LPP, PPATK also monitors these pillars through business activity surveys. Assistance is provided to reporting entities that fail to respond to these surveys, ensuring their continued compliance. This assistance includes direct visits to the entities' offices to verify their business operations and reinforce the integrity of the system.



Mengisi Rumah dengan Pengetahuan: Bimbingan Teknis

Filling the Home with Knowledge: Technical Guidance

BIMBINGAN teknis adalah upaya untuk memberikan wawasan dan keterampilan kepada pihak pelapor. Layaknya mengajari penghuni rumah cara menjaga keamanan, bimbingan ini membantu pihak pelapor memahami prinsip mengenali pengguna jasa, tata cara pelaporan di aplikasi goAML, dan langkah-langkah penerapan program APUPPT.

TECHNICAL guidance is an initiative aimed at providing reporting entities with the necessary knowledge and skills. Just like teaching residents how to safeguard their home, this guidance helps reporting entities understand the principles of customer due diligence, the reporting procedures in the goAML application, and the steps for implementing the AML/CFT program effectively.

Statistik Bimbingan Teknis



Menjaga Ketegasan dalam Rumah: Sanksi dan Teguran

Filling the Home with Knowledge: Technical Guidance

DALAM menjaga rumah integritas, PPATK juga memiliki mekanisme penegakan aturan. Pada tahun 2023, PPATK mengenakan sanksi berupa teguran tertulis kepada 245 pihak pelapor, denda administratif kepada 217 pihak pelapor dan pengumuman publik 3 pihak pelapor. Untuk pelanggaran serius, surat peringatan hingga pengumuman publik diberikan, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang diabaikan.

IN safeguarding the house of integrity, PPATK also upholds a strict enforcement mechanism. In 2023, PPATK issued written warnings to 245 reporting entities, administrative fines to 217, and public announcements for 3 entities. For more serious violations, warning letters and public announcements were made, ensuring that no breach goes unnoticed or unaddressed.

SANKSI KEWAJIBAN PELAPORAN

TEGURAN TERTULIS 239

- 151 PERUSAHAAN PROPERTI (PROPERTY AGENT)
- 85 PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR (MOTOR VEHICLE DEALER)
- 3 PEDAGANG LOGAM MULIA (PRECIOUS METALS TRADER)

DENDA ADMINISTRATIF 217

- 128 PERUSAHAAN PROPERTI (PROPERTY AGENT)
- 88 PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR (MOTOR VEHICLE DEALER)
- 1 PEDAGANG LOGAM MULIA (PRECIOUS METALS TRADER)

SANKSI PENGAWASAN KEPATUHAN

TEGURAN TERTULIS 6

- 4 PERUSAHAAN PROPERTI (PROPERTY AGENT)
- 2 PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR (MOTOR VEHICLE DEALER)

DENDA ADMINISTRATIF 3

- 2 PERUSAHAAN PROPERTI (PROPERTY AGENT)
- 1 PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR (MOTOR VEHICLE DEALER)

Ketika Publik Bersuara: Peran Pengaduan Masyarakat

When the Public Speaks: The Role of Public Complaints



LAPORAN Pengaduan Masyarakat (Dumas) memiliki peran penting dalam menjaga fondasi "rumah integritas." Setiap aduan yang diterima berfungsi sebagai sinyal awal yang memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merusak sistem keuangan dan ekonomi. Dumas tidak hanya menjadi medium pengungkapan kebenaran, tetapi juga wujud nyata partisipasi masyarakat dalam membangun sistem yang bebas dari kejahatan finansial. Dengan adanya laporan ini, PPATK dapat memperluas cakupan analisis, menggali lebih dalam pola-pola tindak pidana, serta menjadikan setiap aduan sebagai langkah awal dalam menegakkan integritas dan keadilan.

Selain Pihak Pelapor yang menjadi pilar kokoh dalam rumah integritas, Dumas juga sebagai salah satu pilar awal untuk memulai analisis. Setiap laporan Dumas menjadi bahan pelengkap dalam penguatan dugaan tindak pidana pencucian uang. Laporan Dumas ini memperkaya gambaran besar dan semakin memperkuat dinding pengawasan, menjadikan rumah integritas PPATK semakin kokoh dalam menjaga keamanan dan keadilan. Ada 3 gerbang utama yang dimiliki Dumas dalam menerima tiap laporan yaitu Tatap muka, surat, email, dan WhatsApp.

PUBLIC Complaint Reports (PCR) play a crucial role in upholding the foundation of PPATK's House of Integrity. Each complaint serves as an early warning signal, reinforcing law enforcement efforts against financial crimes that threaten the stability of the financial and economic system. More than just a means of uncovering the truth, PCR embodies public participation in building a financial system free from illicit activities. These reports enable PPATK to broaden its analytical scope, uncover patterns of financial crime, and use each complaint as the first step toward strengthening integrity and justice.

Beyond reporting entities, which serve as key pillars in maintaining financial oversight, PCR acts as an initial trigger for financial intelligence analysis. Each complaint serves as an additional piece of intelligence, enhancing efforts to detect and verify potential money laundering offenses. Public complaints contribute to a more comprehensive understanding of financial activities, enhancing PPATK's ability to detect and combat financial crimes effectively.

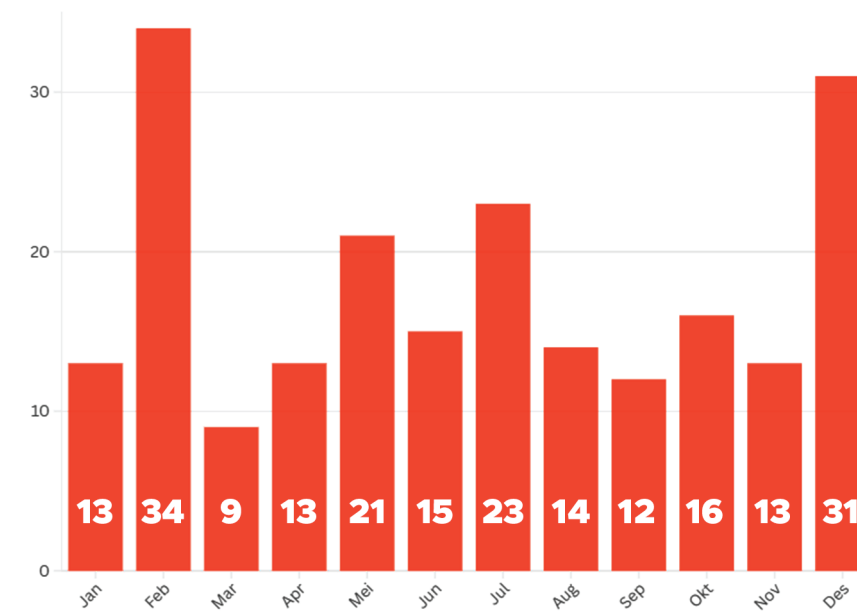
PPATK processes PCR through three main channels: face-to-face submissions, postal mail, and email.

Statistik Laporan Pengaduan Masyarakat 2024

214 LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
PUBLIC COMPLAINTS REPORTS

JENIS LAPORAN TYPE OF REPORT

INDIVIDU/INDIVIDUAL **96** LEMBAGA/ORGANIZATION **119**



Penerimaan laporan pengaduan masyarakat tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan jumlah terbanyak 34 laporan. Adapun frekuensi laporan terendah terjadi pada bulan Maret 2024 dengan jumlah 9 laporan.

The highest number of complaints was recorded in February and December 2024, with 34 reports each month, while the lowest number of reports occurred in March 2024, with only 9 complaints.

Statistik FIR Agregat Nasional

National Aggregate FIR Statistics

NILAI FIR (*Financial Integrity Rating*) on ML/TF secara Agregat Nasional tahun 2024 mencapai 6,42 (baik). Adapun nilai masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

- PJK Bank sebesar 8,10 (sangat baik)
- PJK Non-Bank sebesar 4,63 (cukup baik)
- PBJ dan Profesi sebesar 4,98 (cukup baik)

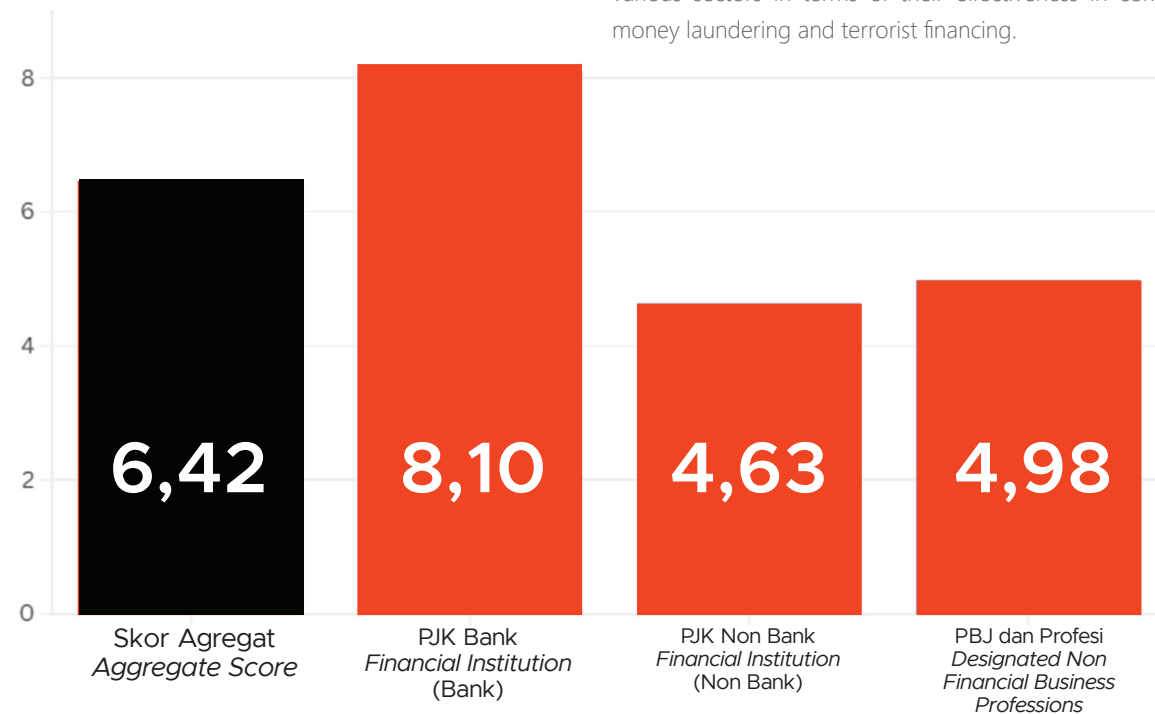
Pernyataan ini mencerminkan tingkat integritas keuangan secara keseluruhan di berbagai sektor dalam hal efektivitasnya dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.

THE FINANCIAL INTEGRITY RATING (FIR) for Money Laundering (ML) / Terrorist Financing (TF) at the national aggregate level for 2024 is 6.42 (Good). The ratings for each sector are as follows:

Banking Financial Services (PJK Bank) at 8.10 (Very Good)
Non-Banking Financial Services (PJK Non-Bank) at 4.63 (Fairly Good)

Designated Non Financial Business Professions (PBJ dan Profesi) at 4.98 (Fairly Good)"

This statement reflects the overall financial integrity levels of various sectors in terms of their effectiveness in combating money laundering and terrorist financing.



Statistik Laporan Layanan Bantuan 2024

11.418

JUMLAH INTERAKSI 2024
ALL INTERACTION 2024

LAYANAN BANTUAN MELALUI WHATSAPP BUSINESS
HELPLINE VIA WHATSAPP BUSINESS

9484

JUMLAH PERCAKAPAN
NUMBER OF CONVERSATION

LAYANAN BANTUAN MELALUI TELEFON
HELPLINE VIA PHONE

97

JUMLAH PANGGILAN
NUMBER OF CALLS

LAYANAN BANTUAN MELALUI EMAIL
HELPLINE VIA EMAIL

1837

JUMLAH EMAIL
NUMBER OF EMAIL





Chapter 4

Product of Integrity

Produk integritas PPATK seperti kompas moral yang mengarahkan setiap langkah lembaga dalam menjaga kepercayaan dan keamanan sistem keuangan. Ibarat aliran sungai yang jernih, setiap hasil kerja PPATK mengalirkan transparansi dan keadilan, memastikan bahwa fondasi integritas tetap kokoh untuk menghadang kejahatan dan menjaga kestabilan ekonomi.

PPATK integrity products help to keep the financial system safe and secure. They make sure that everything is done fairly and openly, which helps to prevent crime and keep the economy stable.

PRODUK INTEGRITAS

PRODUCT OF INTEGRITY

PPATK menghasilkan berbagai produk intelijen yang sangat vital dalam menjaga integritas sistem keuangan negara. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mendeteksi dan mencegah tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta kejahatan keuangan lainnya, PPATK tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengolah informasi tersebut menjadi produk-produk intelijen yang berguna bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

Ada sejumlah produk intelijen yang dihasilkan dari Rumah Integritas PPATK; yaitu Laporan Hasil Analisis (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Penyampaian Informasi, Penyampaian Data Transaksi Mencurigakan, Laporan Evaluasi, Analisis Tren Kejahatan Keuangan, Indikator dan Risiko Profil serta Pelaporan Perkembangan Kasus.

Produk-produk intelejen PPATK ini seperti buah karya yang dihasilkan dari ketekunan dan kecermatan, sebuah produk integritas yang lahir dari proses pengawasan yang mendalam. Setiap kata, angka, dan temuan yang terkandung di dalamnya bukan hanya sekadar data, melainkan potongan informasi yang disusun dengan hati-hati, membentuk potret menyeluruh tentang tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan keuangan lainnya. Laporan ini bukan hanya sekadar laporan—ia adalah jembatan antara fakta dan tindakan, sebuah karya yang menuntun pada langkah-langkah preventif dan korektif yang dapat mengubah situasi menjadi lebih baik.

PPATK produces critical intelligence products that serve as the backbone of efforts to uphold the integrity of the national financial system. As the Financial Intelligence Unit (FIU) of Indonesia, PPATK plays a pivotal role in detecting and preventing money laundering, terrorism financing, and other financial crimes. Beyond merely collecting data, PPATK transforms raw financial information into actionable intelligence, equipping law enforcement agencies and relevant authorities with the insights needed to disrupt illicit financial flows.

At the heart of PPATK's intelligence operations lies the House of Integrity, where a suite of intelligence products is meticulously crafted. These include Financial Intelligence Reports (Laporan Hasil Analisis - LHA), Examination Reports (Laporan Hasil Pemeriksaan - LHP), Intelligence Disclosures, Suspicious Transaction Data Reports, Evaluation Reports, Financial Crime Trend Analyses, Risk and Indicator Profiles, and Case Development Updates.

Each of these products represents a fusion of analytical rigor and institutional integrity—an outcome of comprehensive financial oversight. Every figure, statement, and finding embedded in these reports is not merely data; they are carefully structured intelligence pieces that offer a panoramic view of illicit financial activities. These reports bridge the gap between intelligence and action, serving as a strategic

Selama Tahun 2024, PPATK telah menyampaikan 1.351 laporan kepada Aparat penegak hukum dan/atau kementerian/lembaga baik atas inisiatif PPATK maupun atas permintaan dari APH, Kementerian/Lembaga. Laporan tersebut terdiri dari Hasil Analisis sebanyak 804, Hasil Pemeriksaan sebanyak 19 dan Informasi sebanyak 528. Guna mendukung pelaksanaan analisis dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud, selama periode 2024 PPATK telah menyampaikan permintaan data dan informasi kepada Pihak Pelapor sebanyak 11.526 permintaan, diantaranya kepada Penyedia Jasa Keuangan Bank, Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dan kepada regulator dan/atau instansi lainnya.

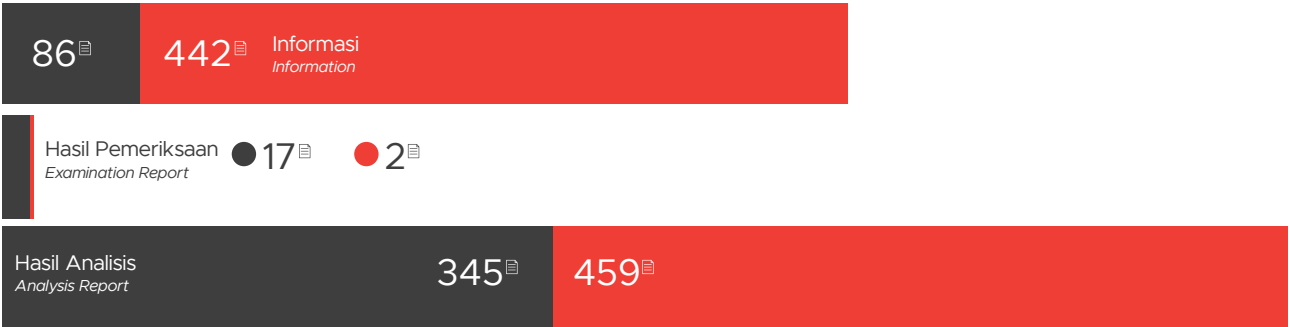
compass that guides preventive and corrective measures to fortify the financial system against exploitation.

In 2024, PPATK disseminated 1,351 intelligence reports to law enforcement agencies (LEAs) and government institutions, either proactively or upon request. This includes 804 Financial Intelligence Reports (LHA), 19 Examination Reports (LHP), and 528 Intelligence Disclosures. To support its analytical and investigative functions, PPATK also submitted 11,526 data and information requests to reporting entities, including banking institutions, non-bank financial service providers, regulators, and other relevant stakeholders.

1.351 Statistik Produk Intelijen Keuangan Tahun 2024

Financial Intelligence Product Statistics in 2024

Sumber: Data PPATK diolah (2024)



Keterangan - Explanation:

- Proaktif: HA, HP dan Informasi proaktif yang disusun berdasarkan laporan yang diterima oleh PPATK
Proactive: Financial Intelligence Products prepared based on STR received by PPATK.
- Reaktif: HA, HP dan informasi reaktif yang disusun berdasarkan permintaan dari stakeholder.
Reactive: Financial Intelligence Products prepared in response to requests from stakeholders.

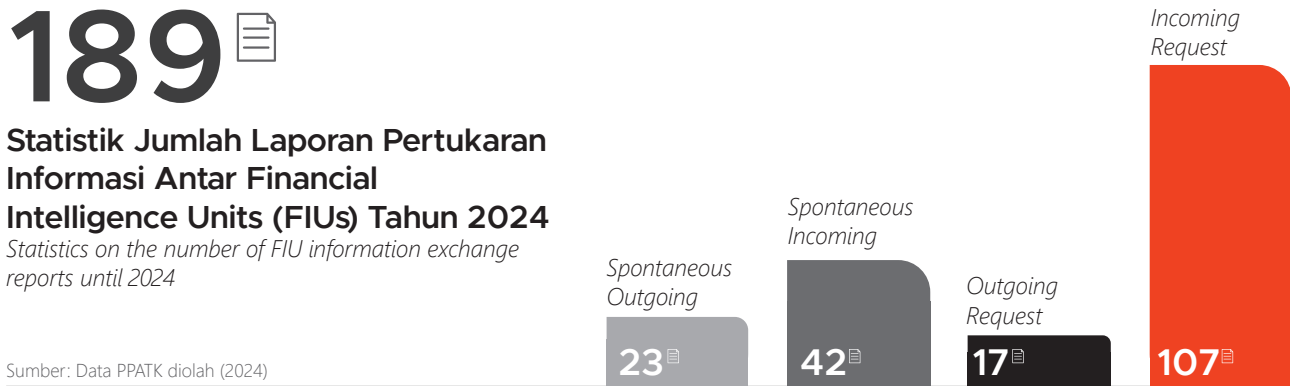
Sumber: Data PPATK diolah (2024)

11.526

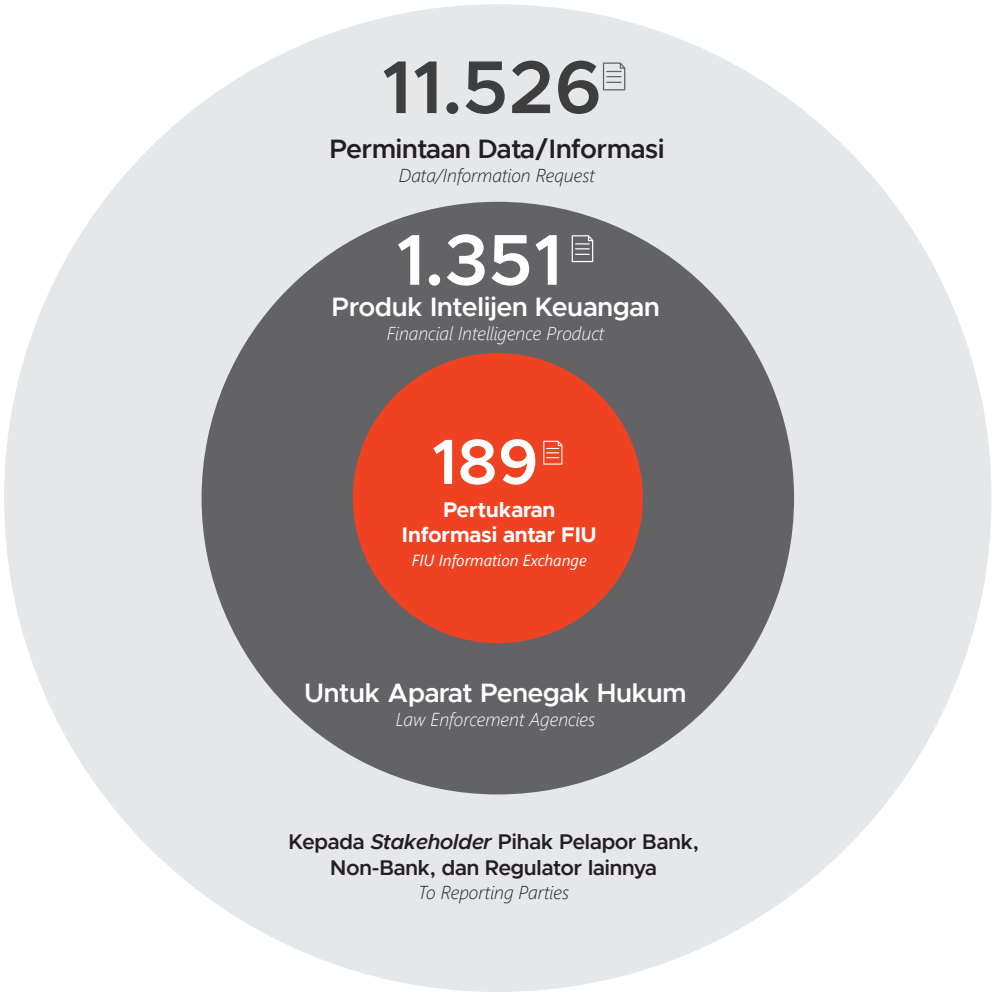
Statistik Jumlah Permintaan Data/Informasi Tahun 2024

Statistics on the Number of Data/Information Requests in 2024

Sumber: Data PPATK diolah (2024)



- Keterangan:**
- **Spontaneous Outgoing:** PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara proaktif.
 - **Spontaneous Incoming:** PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain.
 - **Outgoing Request:** PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta.
 - **Incoming Request:** PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta.
- Description:**
- **Spontaneous Outgoing:** PPATK proactively provides information to other FIUs.
 - **Spontaneous Incoming:** PPATK receives proactive information from other FIUs.
 - **Outgoing Request:** PPATK sends a request for information to another FIU.
 - **Incoming Request:** PPATK receives a request for information from another FIU.



Disamping itu, selama periode tahun 2024 PPATK juga aktif melaksanakan pertukaran informasi dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) di luar negeri dengan menyampaikan dan/atau menerima informasi berupa *Spontaneous Outgoing*, *Spontaneous Incoming*, *Outgoing Request*, dan *Incoming Request*.

Furthermore, PPATK remains deeply engaged in international intelligence collaboration. Throughout 2024, it actively exchanged financial intelligence with foreign Financial Intelligence Units (FIUs), facilitating both spontaneous and requested intelligence sharing through outgoing and incoming requests. This global cooperation underscores PPATK's commitment to strengthening cross-border financial transparency and combating transnational financial crimes.

PERAN PPATK DALAM PENEGAKAN HUKUM

PPATK’S ROLE IN LAW ENFORCEMENT

Mendasarkan pada Laporan Hasil Analisis/Pemeriksaan/ Informasi sebagaimana diuraikan di atas, selama periode Januari s.d Desember 2024 diketahui bahwa nominal transaksi yang diidentifikasi sebagai transaksi terkait dugaan tindak pidana asal seluruhnya sebesar Rp1.459.646.282.207.290,00 dimana nominal transaksi terkait dugaan tindak pidana korupsi memiliki nilai terbesar, diikuti dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan perjudian dengan rincian sebagai sebagai berikut:

Based on the Financial Intelligence Reports, Examination Reports, and Intelligence Disclosures outlined above, from January to December 2024, PPATK identified a total transaction value of IDR 1,459,646,282,207,290 linked to suspected predicate offenses. Among these, transactions related to corruption accounted for the largest portion, followed by suspected offenses in tax crimes and gambling, with the following breakdown:

Total Nominal Transaksi terkait Dugaan Tindak Pidana Asal pada Tahun 2024

Total Transaction Amount related to Suspected Criminal Offences of Origin in 2024

Rp**1.459**triliun

01

67,43%

Rp**984 triliun**

dari **Tindak Pidana Korupsi**
from *Corruption Crime*

02

20,64%

Rp**301 triliun**

dari **Kasus Perpajakan**
of *Taxation Cases*

03

4,67%

Rp**68 triliun**

dari **Kasus Perjudian**
of *Gambling Cases*

Sumber: Data PPATK diolah (2024)

No	Dugaan Tindak Pidana Asal <i>Predicate Crime</i>	Output			Nominal Transaksi Dugaan Tindak Pidana Asal (Rp) <i>Transaction Amount Related to Predicate Crime (IDR)</i>
		HA	HP	INF	
1	Korupsi/ <i>Corruption</i>	240	6	50	984.226.099.977.105
2	Perpajakan/ <i>Tax</i>	141	2	1	301.311.638.549.565
3	Perjudian/ <i>Gambling</i>	58	1	2	68.225.788.654.573
4	Perbankan / <i>Banking</i>	14	0	9	28.759.908.879.792
5	Lingkungan Hidup/ <i>Environmental Crime</i>	21	0	4	23.864.042.602.095
6	Tindak Pidana Lainnya/ <i>Other Criminal Offense</i>	9	2	29	15.921.642.421.462
7	Penipuan/ <i>Fraud</i>	101	0	12	14.736.271.177.570
8	Narkotika/ <i>Narcotics</i>	119	2	6	9.750.160.931.018
9	Penggelapan/ <i>Embezzlement</i>	18	1	1	3.379.167.515.546
10	Pasar Modal/ <i>Capital Market</i>	9	2	2	2.490.639.357.973
11	Pertambangan/ <i>Mining</i>	4	1	0	1.744.445.803.795
12	Pemilu/ <i>Election</i>	0	0	43	1.588.191.771.019
13	Kehutanan/ <i>Forestry</i>	1	1	1	1.219.340.935.632
14	ITE/ <i>Electronic Information and Transaction</i>	18	0	3	1.096.284.646.207
15	Pendanaan Terorisme / <i>Terrorism Financing</i>	25	1	91	578.540.528.471
16	Penyelundupan Tenaga Kerja / <i>Labour Smuggling</i>	3	0	0	211.416.421.853
17	Penyuapan/ <i>Bribery</i>	5	0	4	152.726.873.341
18	Cukai/ <i>Excise</i>	2	0	0	132.526.443.300
19	Di Bidang Kelautan dan Perikanan/ <i>Marine & Fisheries</i>	1	0	1	102.279.203.456
20	Kepabeanan/ <i>Custom</i>	3	0	0	66.449.199.730
21	Perdagangan Orang/ <i>Human Trafficking</i>	4	0	1	37.498.819.681
22	Perdagangan Senjata Gelap/ <i>Illicit Arms Trade</i>	3	0	0	30.880.240.457
23	Penyelundupan Migran/ <i>Migrant Smuggling</i>	0	0	3	9.270.046.390
24	Prostitusi/ <i>Prostitution</i>	4	0	0	8.383.872.263
25	Gratifikasi/ <i>Gratification</i>	1	0	0	2.687.335.000
JUMLAH		804	19	263	1.459.646.282.207.290

Sumber: Data PPATK diolah (2024)

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS (HA) DAN HASIL PEMERIKSAAN (HP)

FOLLOW-UP OF ANALYSIS RESULTS (HA) AND EXAMINATION RESULTS (HP)

PPATK secara rutin melakukan pemantauan pemanfaatan atas Produk Intelijen Keuangan yang telah disampaikan ke Apgakum dan Instansi terkait. Selama periode Januari 2020 s.d Desember 2024, PPATK telah menerima 3.075 *feedback* tindak lanjut atas 6.096 Produk Intelijen Keuangan yang telah disampaikan. Sebesar 50,44% Produk Intelijen Keuangan PPATK telah ditindaklanjuti oleh Apgakum dan instansi terkait dengan kasus yang diproses minimal sampai dengan penyelidikan atau yang dipersamakan dan bernilai tambah bagi penyidik dalam pengembangan kasus serta bermanfaat untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Disamping itu terdapat 4 Hasil Pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana yang ditindaklanjuti melalui penegakan hukum dan perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*). Atas 4 perkara tersebut, ada tambahan penerimaan negara melalui pembayaran denda sebesar Rp7.300.000.000,00 dan uang pengganti sebesar Rp63.310.000.000,00 dan USD 30.000, serta sejumlah aset berupa tanah, bangunan dan kendaraan bermotor. PPATK juga berperan aktif dalam upaya pengembalian uang negara melalui Satgas BLBI.

PPATK routinely monitors the utilization of Financial Intelligence Products that have been submitted to law enforcement agencies and relevant institutions. Between January 2020 and December 2024, PPATK received 3,075 feedback responses regarding 6,096 Financial Intelligence Products that had been disseminated. A total of 50.44% of PPATK's Financial Intelligence Products were followed up by law enforcement agencies and relevant institutions, with cases progressing at least to the investigation stage or equivalent. These products provided added value to investigators in case development and contributed to optimizing state revenue.

Additionally, four Examination Reports indicating criminal offenses were followed up through legal enforcement, with the cases reaching a final and binding verdict (*in kracht*). As a result of these cases, the state received additional revenue from fines amounting to IDR 7.3 billion and compensation payments of IDR 63.31 billion and USD 30,000, along with various seized assets, including land, buildings, and motor vehicles. PPATK also actively participates in state asset recovery efforts through the BLBI Task Force.

50,44% | **3.075**
feedback tindak lanjut
follow-up feedback
 dari **6.096** Produk Intelijen Keuangan yang telah disampaikan
out of 6,096 Financial Intelligence Products that have been delivered



PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

TEMPORARY SUSPENSION OF TRANSACTIONS

Adapun terkait kegiatan Penghentian Sementara Transaksi yang telah dilakukan PPATK pada Januari s.d Desember 2024 terhadap 18.040 rekening dengan total dana yang dihentikan sejumlah Rp1,84 triliun sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

The following are the Temporary Transaction Freezing activities carried out by PPATK from January to December 2024, involving 18,040 accounts with a total frozen fund amounting to IDR 1.84 trillion, as detailed in the table below:

NO	TINDAK PIDANA (Criminal Offense)	REKENING (Accounts)	Nominal Henti Sementara (Rp) Temporary Frozen Amount (IDR)
1	Perjudian (Gambling)	15.181	626.934.730.856
2	Korupsi (Corruption)	1.108	447.798.278.943
3	Di Bidang Perpajakan (Tax-related Offenses)	80	317.259.924.217
4	Di Bidang Perbankan (Banking-related Offenses)	1.270	312.673.787.542
6	Penipuan dan/atau Penggelapan (Fraud and/or Embezzlement)	212	130.649.351.898
7	Narkotika (Narcotics)	129	6.634.345.384
8	TP Lainnya (Other Crimes)	58	2.290.370.922
9	Pendanaan Terorisme (Terrorism Financing)	2	166.302

Sumber: Data PPATK diolah (2024)

Penghentian Sementara Transaksi Tahun 2024

Temporary Suspension of Transactions in 2024



KORUPSI PADA LEMBAGA PERADILAN

CORRUPTION IN THE JUDICIARY

PPATK menganalisis transaksi aliran dana terkait kasus dugaan penyuapan hakim atas vonis bebas yang dikeluarkan terhadap pelaku penganiayaan. Pelaku penganiayaan merupakan anak mantan anggota DPR yang diduga menganiaya pasangannya hingga meninggal dunia. Kasus ini mendapat perhatian publik dan proses penanganannya diliput oleh berbagai media massa. Atas kasus ini, Komisi Yudisial telah menyampaikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pemecatan atas ketiga hakim yang terlibat karena telah terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Berdasarkan penelusuran transaksi pada rekening tiga orang hakim pada rentan waktu terjadinya perkara sampai dengan putusan, diketahui bahwa terdapat banyak transaksi setoran tunai dan penukaran valas tanpa disertai *underlying* yang jelas. Terkait kasus ini PPATK telah menyampaikan 5 Hasil Analisis dengan nominal perputaran dana mencapai Rp16.341.959.483,00 dan perkiraan nominal terkait Tindak Pidana Asal sebesar Rp3,5 miliar.

The Financial Intelligence Unit (PPATK) conducted an analysis of financial transactions linked to allegations of bribery involving judges who issued an acquittal for an assault perpetrator. The perpetrator, the son of a former parliament member, was accused of assaulting his partner, resulting in their death. This case garnered significant public attention, with extensive media coverage on its legal proceedings. In response, the Judicial Commission recommended to the Supreme Court the dismissal of the three judges involved, citing severe violations of judicial ethics and conduct guidelines.

A review of transactions within the bank accounts of the three judges during the timeframe of the case—from its emergence to the final verdict—revealed numerous cash deposits and foreign exchange transactions without clear underlying sources. In light of these findings, PPATK has issued five Analysis Reports detailing financial movements totaling IDR 16,341,959,483, with an estimated IDR 3.5 billion linked to the predicate offense.



Terdapat banyak transaksi setoran tunai dan penukaran valas tanpa disertai *underlying* yang jelas. Terkait kasus ini PPATK telah menyampaikan **5 Hasil Analisis** dengan nominal perputaran dana mencapai **Rp16.34 miliar** dan perkiraan nominal terkait Tindak Pidana Asal sebesar **Rp3,5 miliar**.

there were many cash deposit and foreign exchange transactions without clear underlying. Related to this case, PPATK has submitted 5 Analysis Results with a nominal turnover of funds reaching Rp16,34 billion and an estimated nominal related to the Original Crime of Rp 3.5 billion.

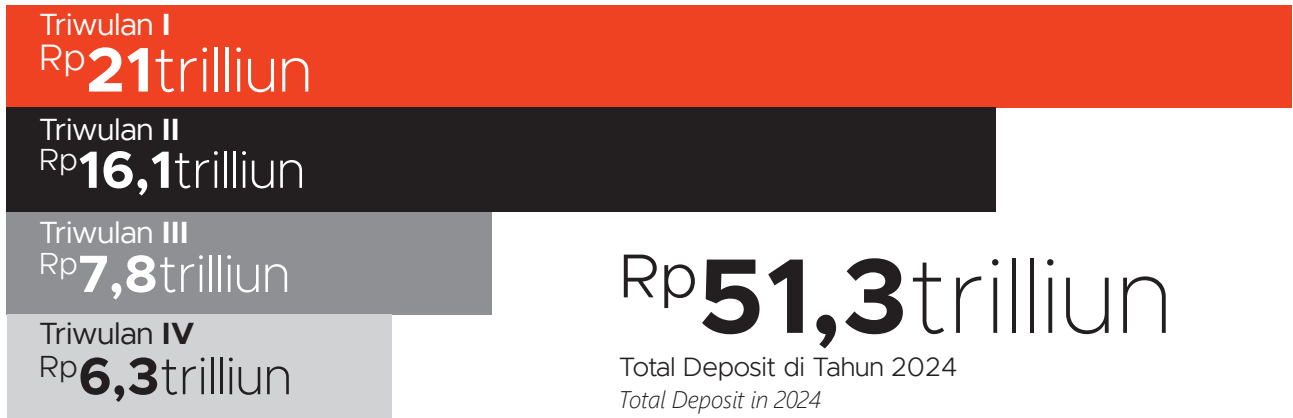
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

ONLINE GAMBLING

PPATK mengidentifikasi aktivitas perjudian online dengan total perputaran dana sebesar Rp359.813.614.827.891,00 dalam 209.572.573 kali transaksi. Jumlah pemain perjudian online diketahui sebanyak 16.381.384 orang, dimana sebanyak 9.787.749 pemain bertransaksi melalui perbankan dan *e-wallet* dengan total deposit sebesar Rp26.897.321.438.390,00 dan melalui QRIS sebesar Rp24.439.898.645.401,00. Adapun rincian transaksi deposit perjudian daring per triwulan selama tahun 2024 sebagai berikut:

Statistik Deposit Tahun 2024 (Rp)

Deposit Statistics Year 2024 (IDR)



PPATK identified online gambling activities with a total turnover of Rp359,813,614,827,891 in 209,572,573 transactions. The number of online gambling players is known to be 16,381,384 people, of which 9,787,749 players transacted through banking and e-wallets with a total deposit of IDR 26,897,321,438,390 and through QRIS of IDR 24,439,898,645,401. The details of online gambling deposit transactions per quarter during 2024 are as follows:

PPATK disamping berperan dalam menyampaikan informasi kepada apgakum, juga terlibat aktif menangani judi online melalui Satgas Perjudian Daring. Dalam aktivitas perjudian ini tidak hanya melibatkan masyarakat umum tetapi juga anggota TNI, POLRI, dan ASN kementerian/instansi pusat.

Mempertimbangkan dampak luas dari aktivitas judi online ini, menjadi perhatian serius dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginstruksikan untuk membentuk *Desk* Pemberantasan Perjudian Daring yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga termasuk PPATK. Untuk mempercepat gerak penanganannya, PPATK telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi Digital (KOMDIGI) dan Operator Seluler untuk melakukan upaya pencegahan melalui mekanisme pengiriman SMS *Broadcast* mengenai aspek pidana dari perjudian online kepada seluruh nomor *handphone* pemain yang sudah teridentifikasi.

In addition to its role in providing information to law enforcement agencies, PPATK is also actively involved in handling online gambling through the Online Gambling Task Force. This gambling activity involves not only the general public but also members of the TNI, POLRI, and ASN of ministries/central agencies.

Considering the wide impact of this online gambling activity, it has become a serious concern of President Prabowo Subianto's administration. The President instructed to establish an Online Gambling Eradication Desk involving various ministries and institutions including PPATK. To accelerate its handling, PPATK has coordinated with the Ministry of Digital Communication (KOMDIGI) and Mobile Operators to carry out prevention efforts through the mechanism of sending SMS Broadcasts regarding the criminal aspects of online gambling to all mobile phone numbers of identified players.

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

HUMAN TRAFFICKING

PPATK telah menyampaikan 5 Hasil Analisis dan Informasi terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang kepada Kepolisian dan Instansi lain. Berdasarkan Hasil Analisis diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh para pihak yang diduga merupakan sindikat perdagangan orang terkait dengan *scam* atau penipuan *online* berbasis di Kamboja dan Laos. Dugaan tersebut didasarkan pada keterangan atau *remark* transaksi yang menunjukkan kegiatan perekrutan, penampungan dan pemberangkatan para korban TPPO dengan nilai nominal indikasi TPPO sebesar Rp 141 miliar dan USD 5 Juta.

Teridentifikasi dana yang diduga dari hasil perdagangan orang di Kamboja diterima melalui rekening Bank Kamboja, yang kemudian dana tersebut digunakan untuk membeli aset kripto USDT (*United States Dollar Tether*) sebesar total USD295.373 ekuivalen Rp4.578.281.500,00 melalui Virtual Asset Service Provider (VASP) luar negeri. Pada hari yang sama sebagian aset USDT tersebut dijual kembali dengan pembayaran Rupiah sebesar total Rp2.592.678.322,00 ke rekening sindikat di Indonesia, dengan menggunakan metode *peer to peer* (p2p) VASP luar negeri.

PPATK has submitted 5 Analysis Results and Information related to alleged human trafficking offences to the Police and other Agencies. Based on the results of the analysis, it is known that the criminal act of trafficking in persons was carried out by parties suspected of being a trafficking syndicate related to online scams or fraud based in Cambodia and Laos. The allegation is based on information or transaction remarks that show recruitment, shelter and departure activities of TPPO victims with a nominal value of indications of TPPO of IDR 141 billion and USD 5 million.

Identified funds suspected of being the proceeds of trafficking in Cambodia were received through a Cambodian Bank account, which were then used to purchase USDT (United States Dollar Tether) crypto assets totalling USD295,373 equivalent to IDR4,578,281,500 through an overseas Virtual Asset Service Provider (VASP). On the same day some of the USDT assets were resold with Rupiah payments totalling IDR2,592,678,322 to syndicate accounts in Indonesia, using the peer to peer (P2P) method of the offshore VASP.



5

Hasil Analisis dan Informasi Terkait TPPO
Human Trafficking Information and Analysis Results

Nilai Nominal Transaksi
Nominal Value of Transaction

Rp**141 miliar** &
USD**5 juta**





Chapter 5

Network of Integrity

Jaringan integritas PPATK bagaikan jaring pengaman yang mengikat setiap elemen lembaga dengan ketelitian, kejujuran, dan keterbukaan. Melalui jaringan ini, PPATK membangun struktur pengawasan yang kokoh, memastikan bahwa setiap langkah lembaga terlindungi dari ancaman kejahatan finansial, dan menciptakan sistem yang terpercaya dan berdaya tahan.

The integrity network of PPATK functions like a safety net, binding every element of the institution with precision, honesty, and transparency. Through this network, PPATK builds a robust oversight structure, ensuring that every step of the institution is safeguarded against financial crime threats while creating a reliable and resilient system.

Kolaborasi Menjaga Negeri

Collaboration to Protect the Nation

TAHUN 2024 menjadi panggung bagi PPATK untuk merangkai tali kepercayaan dan menjahit jaring pengaman dalam menghadapi kejahatan finansial. Melalui Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, PPATK meluncurkan Rencana Aksi Strategi Nasional 2024, sebuah kompas yang membimbing langkah hingga lima tahun ke depan. Integrasi program Anti Pencucian Uang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menjadi pilar kokoh, membuktikan bahwa setiap benang strategi dirajut untuk menguatkan tenda perlindungan negeri.

Langkah ini bukan sekedar visi, tetapi upaya untuk memanfaatkan teknologi canggih guna memerangi kejahatan finansial yang semakin kompleks. PPATK menelusuri shadow economy di sektor Sumber Daya Alam, membongkar gelapnya kejahatan finansial di sektor kehutanan dan pertambangan yang kini semakin merajalela.

Kesuksesan ini tercipta dari simfoni kolaborasi. Dalam satu tahun, 11 Nota Kesepahaman menjadi untai nada, menyelaraskan harmoni dengan lembaga hukum, keuangan, dan teknologi informasi. Sementara itu, tangan PPATK terus menabuh genderang perang melawan kejahatan siber dan narkoba, menegaskan tekad untuk menguatkan benteng hukum negeri. Edukasi juga menjadi lentera yang menyinari jalan. Melalui Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko), hampir seribu individu dipersenjatai dengan wawasan untuk menghadapi bayangan ancaman modern. Penerapan Targeted Financial Sanction menjadi panah tajam yang menembus entitas teroris, mengukuhkan komitmen menjaga tanah air tetap aman.

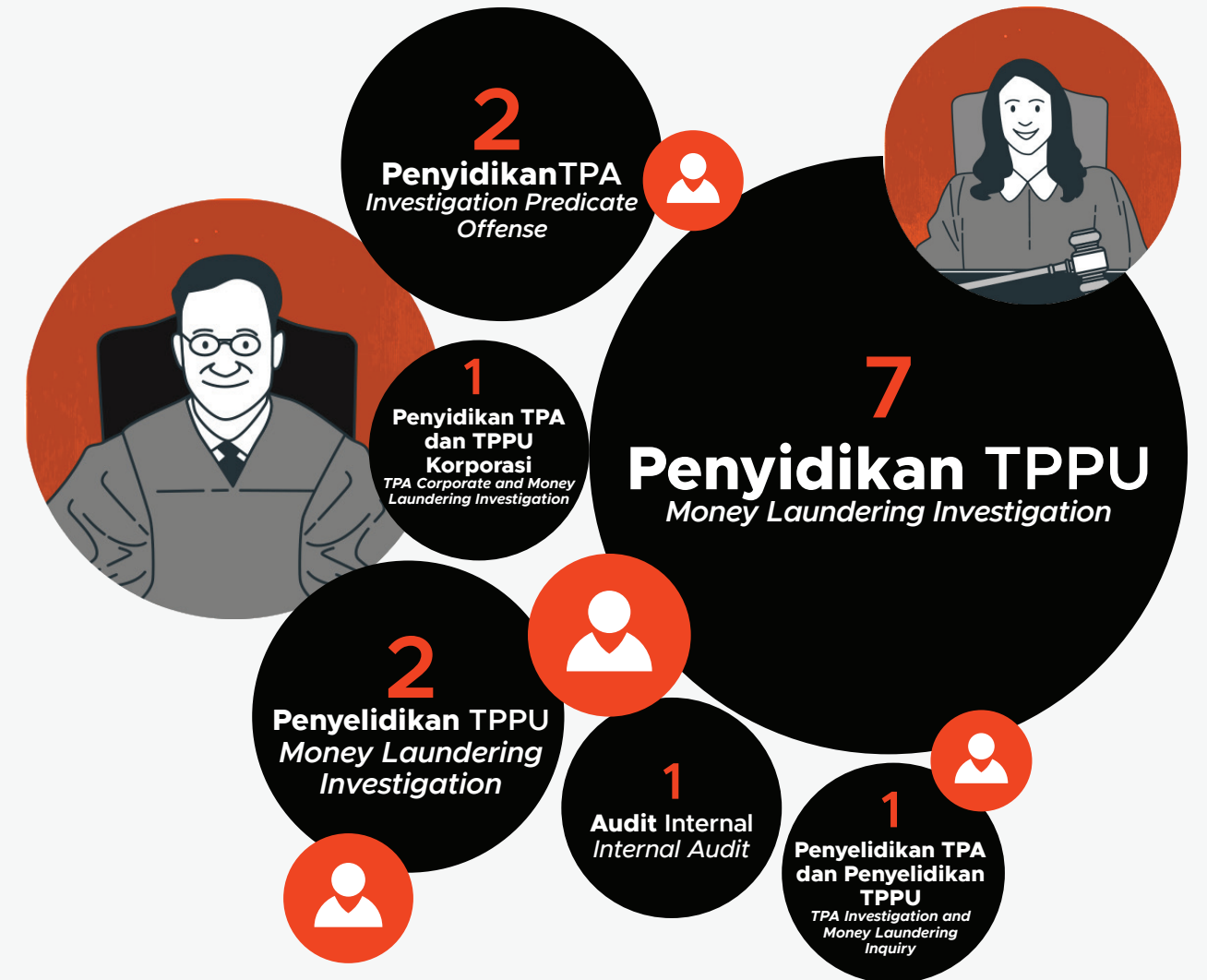
THE YEAR 2024 marked a pivotal moment for PPATK, a year of weaving trust and strengthening the safety net against financial crimes. Through the Directorate of Strategy and Domestic Cooperation, PPATK launched the 2024 National Strategy Action Plan—a guidance for the nation’s efforts over the next five years. The integration of Anti-Money Laundering (AML) programs into the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) stands as a firm pillar, proving that every strategic thread is woven to reinforce the nation’s protective shield.

This step transcends mere vision. It’s a determined quest to harness cutting-edge technology in the battle against ever-more intricate financial crimes. PPATK embarks on an investigative journey through the shadow economy of the natural resources sector, unmasking the dark undercurrents of financial malfeasance that are spreading unchecked within the forestry and mining industries. Success was achieved through a symphony of collaboration. In just one year, 11 Memoranda of Understanding (MoUs) were signed, harmonizing efforts with legal, financial, and information technology institutions. At the same time, PPATK intensified its offensive against cybercrime and narcotics-related financial flows, reaffirming its unwavering commitment to fortifying the nation’s legal defenses.

Education also became a beacon of enlightenment. Through the Risk-Based Mentoring Program (Promensisko), nearly a thousand individuals were equipped with the knowledge to confront modern threats. Meanwhile, the implementation of Targeted Financial Sanctions became a sharp arrow piercing through terrorist-linked entities, solidifying the commitment to safeguarding the homeland.

Statistik Asistensi Penanganan Perkara

Assistance Handling Case Statistics



Statistik Pemberian Keterangan Ahli 2024

Expert Testimony Provision Statistics 2024



Statistik MoU 2024

MoU Statistics 2024

DI tahun 2024, untuk memperkuat jaringan pertahanan dalam memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU), PPAK telah menjalin berbagai kemitraan strategis dengan kementerian dan lembaga. Sepanjang perjalanan tahun ini, dari Januari hingga Desember, tercatat 11 Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang menjadi ikatan kokoh antar pihak.

LIKE a solid foundation, integrity serves as one of the primary pillars supporting every mandate we undertake. Without integrity, a mandate risks collapsing, much like a structure without a strong foundation. Fulfilling an organizational mandate requires upholding the principles of integrity—honesty, transparency, accountability, and ethics. In this context, integrity is not only a personal value that every employee must embody but also a collective foundation that must be preserved in every decision and action taken to fulfill our responsibilities.



Orkestrasi Informasi yang Menjaga Kepercayaan Publik

Orchestration of Information that Maintains Public Trust

KINERJA institusi yang gemilang ibarat mesin orkestra yang harmonis, di mana setiap elemen memainkan perannya dengan sempurna. Begitu pula peran kehumasan, yang menjadi jembatan penghubung antara institusi dan masyarakat, terlihat dalam perjalanan sepanjang tahun 2024. Dalam rentang waktu 1 Januari hingga 31 Desember, PPATK menorehkan 24.942 ekspos di berbagai media.

Media online menjadi sumber arus deras informasi dengan 23.221 berita, sementara media cetak mencatatkan jejak 1.248 artikel. Televisi, layaknya pilar visual, menayangkan 473 pemberitaan. Namun, radio seolah mengambil jeda dari panggung ini. Di dunia maya, pikiran-rakyat.com, tribunnews.com, dan kompas.com menjadi pelopor yang membunyikan genderang isu PPATK. Sedangkan media cetak seperti Rakyat Merdeka dan Harian Ekonomi Neraca menjaga nyala obor pemberitaan. Metro TV, bak pemimpin orkestra, memimpin dengan program Metro Pagi Primetime sebagai medium utama di layar kaca. Harmoni pemberitaan ini menyuarkan nada positif yang mendominasi 86,4% narasi, diikuti irama netral 13,4%, dan hanya secercah nada negatif 0,23%. Isu judi online dan refleksi kerja PPATK 2023 menjadi simfoni utama yang menggema di ruang publik.

Figur internal Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjadi komposer utama dalam isu judi online, sementara dari luar panggung utama, Menteri Koinfo Budi Arie Setiadi menjadi solois yang mengiringi narasi tersebut. Kehumasan PPATK, ibarat konduktor andal, sukses mengorkestrasi pemberitaan dengan sentuhan yang mencerminkan kepercayaan dan tanggung jawab institusi.

THE STELLAR performance of an institution is like a well-conducted orchestra, where every element plays its part in perfect harmony. Such is the role of public relations—acting as the bridge between the institution and the public—evident throughout PPATK's journey in 2024. From January 1 to December 31, PPATK recorded an impressive 24,942 media exposures across various platforms.

Online media served as the primary conduit of information, with 23,221 news articles, while print media left its mark with 1,248 published pieces. Television, as a powerful visual medium, broadcasted 473 reports. Meanwhile, radio seemed to take a step back from the spotlight. In the digital sphere, Pikiran-Rakyat.com, Tribunnews.com, and Kompas.com emerged as the leading voices amplifying PPATK-related issues. Print media outlets such as Rakyat Merdeka and Harian Ekonomi Neraca kept the flames of reporting alive, while Metro TV, like a lead conductor, took center stage with its Metro Pagi Primetime program as the main broadcast platform. This harmony of coverage resonated with a predominantly positive tone, comprising 86.4% of the narratives, followed by neutral reports at 13.4%, with only a faint whisper of negative sentiment at 0.23%. The dominant themes that echoed in the public sphere revolved around online gambling issues and reflections on PPATK's 2023 performance.

Internally, PPATK's Head, Ivan Yustiavandana, took on the role of lead composer in discussions on online gambling, while from outside the institution, Minister of Communication and Informatics, Budi Arie Setiadi, provided a complementary solo voice to the narrative. Like a masterful conductor, PPATK's public relations team orchestrated the news landscape with precision, ensuring that every note reflected the institution's integrity and responsibility.

Statistik Sentimen Pemberitaan Tahun 2024

News Sentiment Statistics 2024



SELAMA tahun 2024, puncak pemberitaan tentang PPATK terjadi pada bulan Juni dengan sentimen positif mengalir mencapai 4.669 artikel, sementara hanya ada 279 berita netral dan tak satupun yang berisi sentimen negatif. Pemberitaan ini dipicu oleh perbincangan hangat mengenai maraknya judi *online*, yang menarik perhatian banyak pihak. Secara keseluruhan, sentimen positif mendominasi pemberitaan dengan persentase mencapai 86,4%, sementara sentimen netral dan negatif menyusul jauh di belakang, masing-masing dengan 13,4% dan 0,23%

THROUGHOUT 2024, the peak of media coverage on PPATK occurred in June, with a strong flow of positive sentiment reaching 4,669 articles, while there were only 279 neutral reports and none containing negative sentiment. This surge in coverage was driven by heated discussions on the widespread issue of online gambling, which captured significant public attention. Overall, positive sentiment dominated the news, accounting for 86.4%, while neutral and negative sentiments trailed far behind at 13.4% and 0.23%, respectively.





Kolaborasi Lintas Batas

Cross-Border Collaboration

PPATK melalui Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional sepanjang tahun 2024 telah menjadi pilar kokoh dalam memperkuat hubungan internasional dan pertukaran informasi antar negara. Seperti kompas yang memandu kapal di lautan gelap, PPATK sigap mengarahkan Indonesia menuju pusat perhatian di forum-forum global. Tak hanya menjadi tuan rumah dalam pertemuan internasional, namun juga PPATK memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan FATF, memfasilitasi kerja sama yang erat dengan berbagai negara, dan mendalami masalah-masalah keuangan global yang menyentuh setiap sisi dunia.

Dalam upaya memperbaiki sistem keuangan dunia yang rawan disalahgunakan, PPATK memainkan peran kunci. Seperti penjaga gerbang yang memastikan hanya yang layak yang melangkah masuk, PPATK membantu negara-negara seperti Laos dan Timor Leste memperbaiki sistem pelaporan transaksi dan mengatasi masalah pendanaan terorisme serta pencucian uang. Keberhasilan Indonesia dalam mengangkat Timor Leste ke dalam keanggotaan The Egmont Group adalah contoh nyata dari kerja keras ini.

Tidak hanya itu, PPATK juga menjadi motor penggerak dalam proyek internasional, seperti pembuatan indikator transaksi keuangan mencurigakan terkait eksploitasi seksual anak. Setiap langkah yang diambil oleh PPATK, seperti benang merah yang menghubungkan titik-titik di dunia, memperkuat jaringan pertukaran informasi global, membangun keamanan finansial, dan memastikan dunia lebih terlindungi dari ancaman kejahatan lintas batas.

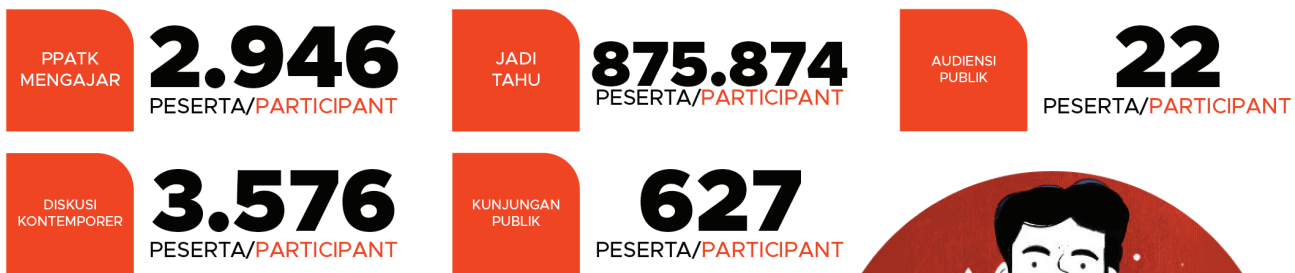
THROUGHOUT 2024, PPATK, through the Directorate of Strategy and International Cooperation, has stood as a steadfast pillar in strengthening international relations and facilitating cross-border information exchange. Like a compass guiding a ship through dark waters, PPATK has actively steered Indonesia into the global spotlight, not only by hosting international meetings but also by leading the Indonesian delegation at FATF meetings, fostering close cooperation with various nations, and delving into pressing global financial issues that impact every corner of the world.

In the mission to fortify the global financial system against misuse, PPATK has played a pivotal role. Like a vigilant gatekeeper ensuring that only the deserving gain entry, PPATK has assisted countries such as Laos and Timor-Leste in enhancing their transaction reporting systems and tackling issues related to terrorism financing and money laundering. A testament to these efforts is Indonesia's success in securing Timor-Leste's membership in The Egmont Group, marking a significant milestone in international financial cooperation.

Beyond this, PPATK has also been a driving force in international projects, such as developing financial transaction indicators to detect cases of child sexual exploitation. Each initiative undertaken by PPATK acts as a red thread connecting dots across the world—strengthening the global information exchange network, fortifying financial security, and ensuring that the world is better protected against transnational crimes.

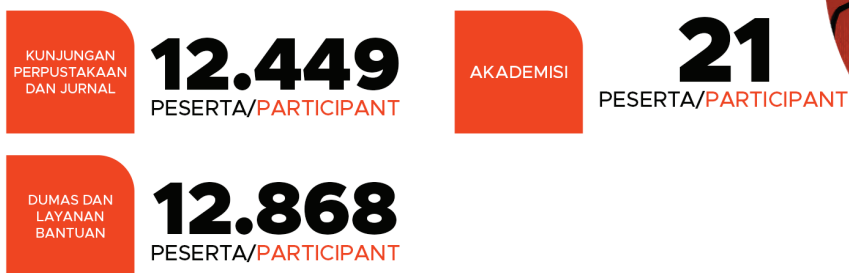
Mendidik Publik

Educating the Public



Menyebarkan Literasi

Spreading Literacy





Chapter 6

Result of Integrity

Setelah melalui perjalanan penuh tantangan demi penegakan integritas, PPATK yakin hasil yang diraih akan selalu berkualitas dan membawa manfaat nyata bagi negeri. Target kinerja yang tercapai adalah buah dari komitmen pada prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi. Meski meraih berbagai penghargaan dan hasil pengukuran kinerja memuaskan, PPATK tetap teguh, tidak berpuas diri, dan terus mengedepankan integritas, karena integritas adalah harga mati.

After overcoming challenges in upholding integrity, PPATK remains committed to delivering meaningful results for the nation. Every achievement reflects its dedication to honesty, accountability, and transparency. Despite receiving awards and strong performance ratings, PPATK stays vigilant, never complacent, and holds integrity as its highest priority.

Hasil Usaha Integritas dalam Mengawal Keuangan Negara

The Outcomes of Integrity Efforts in Protecting State Finances

DI DALAM rumah ini, Statistik Tindak Lanjut HA/HP periode 2020-2024 memberikan pandangan jelas atas apa yang terjadi, menunjukkan lebih dari separuh produk intelijen keuangan yang disampaikan telah membawa dampak positif dalam pengembangan kasus. Statistik Penghentian Sementara Transaksi menghalangi potensi ancaman, menutup 18.003 rekening mencurigakan dengan total senilai Rp1,84 triliun.

Kontribusi Potensi Asset Recovery seperti ruang penyimpanan yang aman, di mana PPATK berhasil memulihkan harta negara melalui pembayaran denda, uang pengganti, dan aset-aset yang dipulihkan dari tindak pidana. Pemberian Keterangan Ahli terutama dalam tindak pidana pengelolaan tambang dan Produk Kajian Hukum 2024 juga menjadi pilar yang memperkuat dinding rumah ini, memastikan setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pemahaman hukum yang jelas dan akurat. Indeks Efektivitas 2024 yang meningkat menjadi 7,93 menjadi bukti rumah ini semakin stabil, dengan fondasi yang semakin kuat dalam melawan tantangan. Di samping itu, Awards & Recognition yang diterima menunjukkan bahwa rumah integritas ini tak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga di luar, sebagai benteng yang kokoh melawan kejahatan finansial.

IN 2024, PPATK stood as a stronghold of integrity, built on transparency and honesty. The Follow-Up Statistics of Analysis and Examination Results provided a clear picture of its impact, showing that more than half of the financial intelligence products contributed positively to case developments. Meanwhile, the Temporary Transaction Suspension mechanism successfully blocked suspicious transactions worth Rp1.74 trillion, USD 731 million, and USDT 13,957, preventing potential threats.

Asset recovery efforts served as a secure vault, ensuring the return of state wealth through fines, restitution, and recovered assets from criminal activities. Additionally, Expert Testimony and Legal Studies particularly in criminal cases related to mining management in 2024 acted as pillars that strengthened the institution, ensuring that every decision was based on a clear and accurate legal foundation. The rise of the Integrity Index to 7.93 demonstrated PPATK's growing resilience in facing financial crime challenges. Furthermore, the awards and recognitions it received underscored its credibility, not only within the country but also internationally, solidifying its role as a steadfast guardian against financial crime.

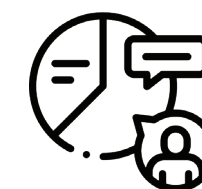
Menelusuri Perjalanan Kasus: Dari Analisis hingga Keputusan

Tracking Case Progress: From Analysis to Decision

PPATK secara rutin dan sistematis melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan produk intelijen keuangan yaitu Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) yang telah diberikan kepada Aparat Penegak Hukum (APGAKUM) dan berbagai instansi terkait lainnya. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk intelejen PPATK digunakan secara efektif oleh pihak-pihak yang berwenang, dalam rangka mendukung penyelidikan, penyidikan, atau tindakan hukum lainnya.

Selain itu, pemantauan ini juga dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana produk intelijen tersebut memberikan dampak positif dalam upaya pengungkapan tindak pidana, baik yang berkaitan dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun kejahatan ekonomi lainnya.

Melalui pemantauan rutin ini, PPATK berperan penting dalam meningkatkan koordinasi antar instansi serta memastikan bahwa data dan informasi yang telah disampaikan dapat memberikan kontribusi optimal dalam penegakan hukum dan pengelolaan keuangan negara.



3.075

Feedback tindak lanjut atas Produk Inteligen Keuangan Januari 2020 - 2024

Top follow-up feedback Financial Intelligence Products January 2020 - 2024

PPATK routinely and systematically monitors the utilization of financial intelligence products, namely the Analysis Results (HA) and Examination Results (HP), which have been provided to law enforcement agencies (APGAKUM) and other relevant institutions.

This monitoring aims to ensure that PPATK's intelligence products are effectively used by the authorized parties to support investigations, inquiries, or other legal actions. Additionally, it is conducted to evaluate the extent to which these intelligence products have a positive impact on uncovering criminal offenses, including money laundering, terrorism financing, and other economic crimes.

Through this regular monitoring, PPATK plays a crucial role in enhancing inter-agency coordination and ensuring that the data and information provided contribute optimally to law enforcement and financial governance.

Rp 7.3 Miliar

Rp 63.3 Miliar

USD 30.000



Penerimaan Negara dan Pembayaran Denda didapat dari 4 Hasil Pemeriksaan

State Revenue and Fine Payments are obtained from 4 Examination Results.

Statistik Penghentian Sementara Transaksi

Statistics of Temporary Transaction Suspension

ADAPUN terkait kegiatan Penghentian Sementara Transaksi yang telah dilakukan PPAK pada Januari s.d Desember 2024 terhadap 18.003 rekening dengan total dana yang dihentikan sejumlah Rp1,84 triliun, USD 731 juta, USDT 13.957 dengan detail sebagai berikut :

Tindak Pidana Perjudian Gambling Crime	15.181 Rekening/Account	626.934.730.856 IDR
Tindak Pidana Korupsi Corruption Crime	1.108 Rekening/Account	447.798.278.943 IDR 731.487.567 USD 112.593 SGD 47.106 AUD 10.000 EUR 508.441.203 CHN
Tindak Pidana Narkotika Narcotics Crime	129 Rekening/Account	6.634.345.384 IDR
TP Penipuan/Penggelapan Fraud/ Embezzlement Crime	212 Rekening/Account	130.649.351.898 IDR
Tindak Pidana Perbankan Banking Crime	1.270 Rekening/Account	312.673.787.542 IDR 13.957 USDT 823 USD

FROM January to December 2024, PPAK issued Temporary Transaction Suspensions on 18,003 accounts, with a total frozen fund amounting to IDR 1.84 trillion, USD 731 million, and 13,957 USDT, with the following details:

Tindak Pidana Perpajakan Taxation Crime	80 Rekening/Account	317.259.924.217 IDR 500.000 JPY 80.858 SGD 19.805 USD
Tindak Pidana ITE ITE Crime	5 Rekening/Account	2.283.970 IDR
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Terrorism Financing Crime	2 Rekening/Account	166.302 IDR
Tindak Pidana Lainnya Others Crime	58 Rekening/Account	2.290.370.922 IDR



Kontribusi Potensi Penerimaan Negara/ Asset Recovery

Contribution to Potential State Revenue/Asset Recovery

HASIL ANALISIS atau Pemeriksaan disamping digunakan dalam penegakan hukum, juga dimanfaatkan untuk memperkuat Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan pada Hasil Analisis dan Pemeriksaan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak selama periode tahun 2024, jumlah penerimaan negara yang berasal dari pemanfaatan Hasil Analisis dan Pemeriksaan sebesar Rp 1.259.727.447.104,00

Disamping itu terdapat 4 Hasil Pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana yang ditindaklanjuti melalui penegakan hukum dan perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Atas 4 perkara tersebut, ada tambahan penerimaan negara melalui pembayaran denda sebesar Rp 7.300.000.000,00 dan uang pengganti sebesar Rp 63.310.000.000,00 dan USD 30.000, serta sejumlah aset berupa tanah, bangunan dan kendaraan bermotor. PPAK juga berperan aktif dalam upaya pengembalian uang negara melalui Satgas BLBI.

THE RESULTS of Analysis or Examination are not only used for law enforcement but also support the Directorate General of Taxes in carrying out its duties and functions related to state revenue from the taxation sector. Based on the Analysis and Examination Results submitted to the Directorate General of Taxes during 2024, state revenue generated from these findings amounted to IDR 1,259,727,447,104.

Additionally, four Examination Results indicated criminal offenses and were followed up through legal enforcement, with the cases reaching final and binding verdicts (in kracht). These four cases contributed additional state revenue through fines amounting to IDR 7,300,000,000, compensation payments of IDR 63,310,000,000 and USD 30,000, as well as assets in the form of land, buildings, and motor vehicles. PPAK also plays an active role in the recovery of state funds through the Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) Task Force.



Produk Kajian Hukum 2024

2024 Legal Study Report



PADA tahun 2024, PPATK telah mengeluarkan berbagai produk hukum untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam operasionalnya. Di antaranya adalah Peraturan PPATK yang meliputi berbagai aspek, mulai dari tata cara pengenaan sanksi administratif hingga pedoman penyelenggaraan layanan administrasi pimpinan. Salah satu peraturan yang penting adalah Peraturan PPATK Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, yang bertujuan untuk menegakkan kewajiban pelaporan dan memastikan sistem pelaporan keuangan berjalan dengan transparansi.

Selain itu, terdapat juga peraturan mengenai sistem akuntabilitas kinerja dan pelatihan untuk pejabat fungsional analisis transaksi keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. PPATK juga memperkenalkan Surat Edaran terkait larangan gratifikasi yang bertujuan menjaga integritas dan etika kerja di lingkungan institusinya. Tidak ketinggalan, peraturan mengenai indikator transaksi keuangan mencurigakan terkait Green Financial Crime yang menunjukkan upaya PPATK dalam menghadapi tantangan baru di dunia keuangan.

IN 2024, PPATK has issued various legal products to enhance efficiency and accountability in its operations. These include PPATK Regulations covering various aspects, from procedures for imposing administrative sanctions to guidelines for organizing leadership administrative services. One of the key regulations is PPATK Regulation Number 01 of 2024 on Procedures for Imposing Administrative Sanctions, aimed at enforcing reporting obligations and ensuring financial reporting systems operate transparently.

Additionally, there are regulations on performance accountability systems and training for financial transaction analysis functional officers, designed to improve employee competence. PPATK has also introduced a Circular Letter on the prohibition of gratuities, which aims to uphold integrity and work ethics within the institution. Furthermore, a regulation on indicators of suspicious financial transactions related to Green Financial Crime demonstrates PPATK's efforts in addressing emerging challenges in the financial sector.

Indeks Efektifitas

Effectiveness Index

BERLAYAR di lautan reformasi birokrasi, PPATK mengemudikan kapalnya menuju perairan yang lebih jernih, di mana transparansi dan efektivitas menjadi mercusuar yang menerangi perjalanan. Indeks Efektivitas (IE) menjadi kompas utama, menandai arah sejauh mana strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme telah mengakar di Indonesia.

Di tahun 2022, layar mulai berkembang, dan PPATK menorehkan pencapaian dengan nilai IE sebesar 7,47—sebuah indikasi bahwa arah angin reformasi telah berpihak. Setahun kemudian, gelombang perubahan semakin kuat, membawa PPATK ke kategori sangat efektif dengan peningkatan 0,27 poin menjadi 7,74. Ini adalah kali pertama kapal ini berlayar sejauh itu, menandakan bahwa strategi yang diterapkan telah menghasilkan arus yang lebih deras dalam pemberantasan TPPU dan TPPT. Tahun 2024, PPATK kembali mengarungi samudra dengan semangat yang sama, menjaga haluan tetap stabil. Dengan nilai IE yang meningkat menjadi 7,93, perjalanan ini semakin mendekati daratan tujuan. Namun, tak hanya sekadar mencatat angka, keberhasilan ini juga menegaskan bahwa langkah-langkah strategis terus dievaluasi dan diperkuat agar kapal tetap kokoh menghadapi ombak tantangan. Namun, di antara angin kemenangan, ada riak-riak yang menandakan perlunya adaptasi lebih lanjut. Implementasi rekomendasi sempat melambat di 2023, seperti kapal yang harus berhenti sejenak untuk memperbaiki layar sebelum melaju lebih jauh. Tetapi di 2024, dengan navigasi yang lebih tajam, persentase pemenuhan tindak lanjut kembali menanjak, membuktikan bahwa kapal ini semakin tangguh dan siap menaklukkan cakrawala baru dalam reformasi birokrasi.



SAILING through the seas of bureaucratic reform, PPATK steers its course toward clearer waters, where transparency and effectiveness serve as guiding beacons. The Effectiveness Index (IE) acts as the primary compass, measuring the extent to which anti-money laundering and counter-terrorism financing strategies have taken root in Indonesia.

In 2022, PPATK set its sails and achieved an IE score of 7.47, signaling favorable winds for reform. The momentum grew stronger in 2023, pushing PPATK into the "highly effective" category with a 0.27-point increase to 7.74—its furthest progress yet. This milestone affirmed that the strategies in place had significantly strengthened efforts to combat financial crimes. By 2024, PPATK continued its steady navigation, reaching an IE score of 7.93, bringing it closer to its destination. Beyond the numbers, this progress reflects ongoing evaluations and refinements to ensure resilience against future challenges. Though implementation slowed briefly in 2023—like a ship pausing to adjust its sails—2024 saw a renewed push, with a rising follow-up rate proving that PPATK is more prepared than ever to chart new frontiers in bureaucratic reform.

Penghargaan dan Pengakuan

Awards & Recognition

BERLAYAR di samudra keuangan global, PPATK telah membangun sebuah rumah integritas yang kokoh, di mana fondasi transparansi dan kejujuran menjadi tiang penyangganya. Seperti seorang arsitek handal yang mendesain setiap struktur dengan teliti, PPATK menjaga keuangan negeri dari ancaman pencucian uang dan kejahatan finansial, memastikan setiap detail terjaga dengan rapat. Bukti kegigihannya terwujud dalam penghargaan yang diterima dari Badan Penegakan Hukum Narkotika Amerika Serikat (DEA) atas kerja sama dalam memerangi narkoba dan pencucian uang.

Melalui ketelitian yang tiada henti, PPATK telah mengungkap transaksi ilegal senilai USD 6,97 miliar sejak 2022, mengukir prestasi gemilang dalam melindungi pilar keuangan bangsa. Tak berhenti di sana, rumah integritas ini juga mendapatkan predikat "Informatif" dari Komisi Informasi Pusat, mencerminkan komitmen kuatnya terhadap keterbukaan informasi publik. Dengan inovasi digitalnya, PPATK kini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, memastikan setiap pintu informasi terbuka lebar. Di ranah internal, PPATK menyelesaikan 100% disparitas data kepegawaian, meraih penghargaan dari BKN, dan mencatatkan keberhasilan dalam tata kelola pengarsipan, yang membawanya meraih predikat Instansi Pemerintah Terbaik II. Semua ini menunjukkan dedikasi dalam menjaga dan merawat setiap bagian rumah integritas dengan profesionalisme tinggi.

Terakhir, seperti tembok yang tak tergoyahkan, PPATK berhasil mempertahankan nilai integritas 85,8 dalam Survei Penilaian Integritas 2023, tertinggi di antara instansi pemerintah lainnya. Ini membuktikan bahwa rumah integritas yang dibangun PPATK bukan hanya sebuah simbol, melainkan benteng yang kuat untuk menjaga keuangan bangsa dari ancaman luar dan dalam.

NAVIGATING the vast ocean of global finance, PPATK has built a strong house of integrity, where transparency and honesty stand as its pillars. Like a master architect meticulously designing every structure, PPATK safeguards the nation's financial system from the threats of money laundering and financial crimes, ensuring every detail is securely in place.

Its relentless dedication has been recognized through an award from the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) for its cooperation in combating narcotics and money laundering. With unwavering precision, PPATK has uncovered illegal transactions amounting to \$6.97 billion since 2022, marking a significant achievement in protecting the country's financial stability.

Beyond this, PPATK has earned the "Informative" status from the Central Information Commission, reflecting its strong commitment to public information transparency. Through digital innovation, it ensures accessibility for all, including individuals with special needs. Internally, PPATK has resolved 100% of personnel data discrepancies, earning recognition from the National Civil Service Agency (BKN) and securing second place as the Best Government Institution in archiving management. Finally, standing firm like an unshakable wall, PPATK maintained an integrity score of 85.8 in the 2023 Integrity Assessment Survey—the highest among government agencies—solidifying its role as a fortress against financial threats.



PPATK telah membangun rumah integritas yang kokoh dengan transparansi dan kejujuran sebagai fondasinya, **mengungkap transaksi ilegal senilai USD 6,97 miliar dan meraih berbagai penghargaan atas dedikasinya dalam menjaga keuangan negara.**

PPATK has built a strong integrity house with transparency and honesty as its foundation, uncovering illegal transactions worth \$6.97 billion and earning various awards for its dedication to safeguarding the nation's finances.

Menutup Tahun dengan Komitmen Tak Berbatas

Closing the Year with Unwavering Commitment

SEPANJANG tahun 2024, PPATK terus menunjukkan perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan Indonesia. Salah satu pencapaian terbesar tahun ini adalah pengungkapan kasus judi daring dengan total transaksi mencapai Rp359,81 triliun—sebuah bukti nyata efektivitas PPATK dalam menelusuri arus dana mencurigakan. Lebih dari itu, upaya intensif yang dilakukan berhasil menekan nominal deposit judi daring dari Rp7,89 triliun menjadi Rp6,29 triliun pada triwulan IV 2024, sebuah langkah maju dalam memberantas kejahatan keuangan di negeri ini.

Di panggung internasional, PPATK terus berperan aktif dalam Financial Action Task Force (FATF), memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan-pertemuan penting di Paris, Singapura, serta berbagai diskusi bilateral dengan negara mitra. Di dalam negeri, komitmen untuk memperkuat kebijakan hukum juga semakin nyata melalui dorongan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Bersama DPR, KPK, dan masyarakat sipil, PPATK tak henti mengedukasi publik tentang pentingnya

regulasi ini sebagai instrumen pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Kami di PPATK selalu terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan maupun masyarakat luas. Setiap saran yang diberikan menjadi bahan refleksi agar kami terus berkembang dan semakin strategis dalam menjalankan tugas. Kami sadar, masih banyak ruang untuk perbaikan, dan meski penilaian terhadap kami mungkin tak selalu positif, kami berharap kepercayaan publik tetap terjaga. Kepercayaan adalah aset tak ternilai yang harus kami rawat dengan integritas maksimal. Perjuangan melawan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata bukanlah tugas yang mudah, tetapi komitmen kami tidak akan surut. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan ketahanan, dedikasi, dan kerja sama dari semua pihak. Dengan Pertolongan Terbaik lalu diikuti usaha yang tak mengenal lelah, kami yakin Indonesia bisa menjadi negeri yang lebih bersih dan aman dari kejahatan keuangan.

THROUGHOUT 2024, PPATK has remained at the forefront of safeguarding Indonesia's financial integrity. One of the year's most significant achievements was the successful exposure of online gambling networks, with transactions reaching Rp359.81 trillion—clear evidence of PPATK's effectiveness in tracing suspicious financial flows. Beyond that, relentless efforts led to a decline in online gambling deposits from Rp7.89 trillion to Rp6.29 trillion in the fourth quarter of 2024, marking a crucial step forward in combating financial crime.

On the international stage, PPATK has been actively engaged in the Financial Action Task Force (FATF), leading Indonesia's delegation in key meetings in Paris, Singapore, and various bilateral discussions with partner nations. Domestically, its commitment to strengthening legal frameworks has been further reinforced through advocacy for the passage of the Asset Forfeiture Bill. In collaboration with Parliament, the Corruption Eradication Commission (KPK), and civil society, PPATK continues to raise public awareness of the bill's importance as a tool for recovering assets derived from corruption.



GLOSARIUM

GLOSSARY

AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <i>Government Performance Accountability System</i>
AML	Anti Money Laundering <i>Anti Money Laundering</i>
AML CTF	Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing <i>Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing</i>
ANRI	Arsip Nasional Republik Indonesia <i>National Archives of The Republic Indonesia</i>
Apgakum	Aparat Penegak Hukum <i>Law Enforcement Officers/Agencies</i>
APH	Aparat Penegak Hukum <i>Law Enforcement Officers/Agencies</i>
APU-PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme <i>Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing</i>
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASN	Aparatur Sipil Negara <i>Civil Servant</i>
BAWASLU	Badan Pengawas Pemilihan Umum <i>General Election Supervisory Agency</i>
BI	Bank Indonesia <i>Central Bank of Indonesia</i>
BMN	Barang Milik Negara <i>State-owned Asset</i>
BNN RI	Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia <i>National Anti Narcotics Agency</i>
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme <i>National Anti Terrorism Board</i>
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan <i>Indonesian Audit Board</i>

BPR	Bank Perkreditan Rakyat <i>Rural Bank</i>
CAT	Collaborative Analysis Team <i>Collaborative Analysis Team</i>
CBCC	Cross Border Cash Carrier <i>Cross Border Cash Carrier</i>
CIFG	Counter ISIS Finance Group <i>Counter ISIS Finance Group</i>
CSM	Cyber Security Maturity <i>Cyber Security Maturity</i>
DJP	Direktorat Jenderal Pajak <i>Directorate General of Taxes</i>
DTTOT	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris <i>List of Suspected Terrorist Group and Organization</i>
DUMAS	Pengaduan Masyarakat <i>Public Complaints</i>
FATF	Financial Action Task Force <i>Financial Action Task Force</i>
FGD	Focus Group Discussion <i>Focus Group Discussion</i>
FICG	Financial Intelligence Consutative Group <i>Financial Intelligence Consutative Group</i>
FinCEN	Financial Crimes Enforcement <i>Financial Crimes Enforcement</i>
FIR on ML/TF	Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing <i>Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing</i>
FIU	Financial Intelligence Unit <i>Financial Intelligence Unit</i>
GFC	Green Financial Crime <i>Green Financial Crime</i>
HA	Hasil Analisis <i>Analysis Result</i>

HANI	Hari Anti Narkotika Internasional <i>International No Drugs Day</i>
Humas	Hubungan Masyarakat <i>Public Relations</i>
HP	Hasil Pemeriksaan <i>Examination Report</i>
ICRG	International Cooperation Review Group <i>International Cooperation Review Group</i>
IE	Indeks Efektivitas <i>Effectiveness Index</i>
IFTI	International Funds Transfer Instruction <i>International Funds Transfer Instruction</i>
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan <i>Activity Performance Indicator</i>
IKU	Indikator Kinerja Utama <i>Key Performance Indikator</i>
INF	Informasi <i>Information</i>
IO	Immediate Outcome <i>Immediate Outcome</i>
ISIS	Islamic State of Iraq and Syria <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
ISO	International Organization for Standardization <i>International Organization for Standardization</i>
ITKP	Indeks Tata Kelola Pengadaan <i>Procurement Governance Index</i>
K/L/D	Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah <i>Ministries/Institutions/Regional Work Units</i>
KAMI	Keamanan Informasi <i>Information Security</i>
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran <i>Proxy of Budget User</i>
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi <i>Indonesia's Corruption Eradication Commission</i>
KPU	Komisi Pemilihan Umum <i>General Election Commissions</i>
KSP	Koperasi Simpan Pinjam <i>Savings and Loan Association</i>
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi <i>International Summit</i>

KUPVA	Kelompok Usaha Penukaran Valuta Asing <i>Foreign Exchange Business Group</i>
LO	Laporan Operasional <i>Operational Report</i>
LO	Penghubung atau pendamping antara peserta dengan pihak penyelenggara <i>Liaison Officer</i>
LP3K	Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan <i>Archives Education and Training Organizing Institutions</i>
LPJK	Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan <i>Institutions Archive Services Organizer</i>
LPP	Lembaga Pengawas Pengatur <i>Regulatory Supervisory Agencies</i>
LPSDK	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye <i>Campaign Fund Contribution Report</i>
Menkop dan UKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah <i>Ministry of Cooperatives and SMEs of The Republic of Indonesia.</i>
MER	Mutual Evaluation Report <i>Mutual Evaluation Report</i>
MoU	Memorandum of Understanding <i>Memorandum of Understanding</i>
MTN	Medium Term Notes <i>Medium Term Notes</i>
MYR	Malaysian Ringgit <i>Malaysian Ringgit</i>
NII	Negara Islam Indonesia <i>Indonesian Islamic State</i>
Nilai Inti	"Prinsip-prinsip atau keyakinan dasar yang dipegang teguh seorang individu atau organisasi dalam menjalankan aktivitasnya" <i>"Core Value : basic principles or beliefs that an individual or organization adheres to in carrying out its activities"</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia <i>Unitary State of the Republic of Indonesia</i>

Nominee	"Seseorang atau perusahaan yang namanya digunakan untuk pembelian suatu benda seperti saham, tanah dan bangunan, dan lainnya tetapi sebenarnya bukan pemilik asli dari benda tersebut" <i>A person or company whose name is used to purchase an object such as shares, land and buildings, etc. but who is not actually the original owner of the object</i>
NRA	National Risk Assessment <i>National Risk Assessment</i>
NSPK	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria <i>Standard Procedure Norms and Criteria</i>
OPAC	Online Public Access Catalogue <i>Online Public Access Catalogue</i>
P3DN	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri <i>Increased Use of Domestic Products</i>
PANRB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi <i>Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform</i>
PBJ	Penyedia Barang dan Jasa <i>Provider of Goods and Services</i>
PBJP	Penyedia Barang dan/atau Jasa dan Profesi <i>Designated non-financial Businesses and Professions</i>
PDG	Policy Development Group <i>Policy Development Group</i>
Pemblokiran	"Tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan,pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu" <i>Bloking</i>
Pemilu	Pemilihan Umum <i>Election</i>
Pencucian Uang	"Suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/ dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal" <i>"An attempt to hide or disguise the origin of money/ funds or assets resulting from criminal acts through various financial transactions so that the money or assets appear as if they come from activities valid/ legal"</i>

Pendanaan Terorisme	"Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris." <i>"Terrorism Funding is any action in the context of providing, collecting, giving or lending funds, either directly or indirectly, with the intention of being used and/ or known to be used to carry out terrorist activities, terrorist organizations or terrorists."</i>
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah <i>Regional Head Elections</i>
PJK	Penyedia Jasa Keuangan <i>Financial Service Providers</i>
PJP LR	Penyelenggara Jasa Pembayaran Layanan Remitansi <i>Remittance Service Payment Service Provider</i>
PKPT	Program Kerja Pengawasan Tahunan <i>Annual Supervision Work Program</i>
PKS	Perjanjian Kerja Sama <i>Cooperation Agreement</i>
PMI	Pekerja Migran Indonesia <i>Indonesian Migrant Workers</i>
PMK	Peraturan Menteri Keuangan <i>Regulation of Minister of Finance</i>
PMPJ	Prinsip Mengenal Pengguna Jasa <i>Principles of Recognizing Service Users</i>
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak <i>Non-tax Revenue</i>
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia <i>Indonesian National Police</i>
PPATK Digipus	Perpustakaan Digital PPATK <i>PPATK Digital Library</i>
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen <i>Commitment Making Official</i>
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil <i>Civil Servants Investigator</i>
PPP	Public Private Partnership <i>Public Private Partnership</i>
PPSPM	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal <i>Proliferation of Weapons of Mass Destruction</i>

Profesi	Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan atau kejuruan tertentu <i>A paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification</i>
PTD	Penyelenggara Transfer Dana <i>Remittance Companies</i>
PTO	Petunjuk Teknis Operasional <i>Operational Intructions</i>
Pusdiklat	Pusat Pendidikan dan Latihan <i>Educational and Training Center</i>
PVA	Pedagang Valuta Asing <i>Authorized Money Changer</i>
Rakornas	Rapat Koordinasi Nasional <i>National Coordination Meeting</i>
RAN PE AWARD	"Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme" <i>National Action Plan for Preventing Violent Extremism that Leads to Terrorism</i>
RB	Reformasi Birokrasi <i>Bureaucratic Reform</i>
RBA	Risk Based Approach <i>Risk Based Approach</i>
RENSTRA	Rencana Strategis <i>Strategic Plan</i>
RKBN	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara <i>State Property Requirement Plan</i>
RKDK	Penggunaan Rekening Dana Kampanye <i>Use of Unreported Campaign Fund Accounts</i>
RPD	Rencana Penarikan Dana <i>Fund Withdrawal Plan</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional <i>National Medium Term Development Plan</i>
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang <i>National Long Term Development Plan</i>
RTMG	Risk, Trends and Methods Group <i>Risk, Trends and Methods Group</i>
RUP	Rencana Umum Pengadaan <i>General Procurement Plan</i>
RUU	Rancangan Undang - Undang <i>Draft Bill</i>

SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <i>Government Agency Performance Accountability System</i>
SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi <i>Agency Level Financial Application System</i>
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan <i>Government Accounting Standards</i>
SDI	Satu Data Indonesia <i>One Indonesian Data</i>
SDM	Sumber Daya Manusia <i>Human Resources Development</i>
SGD	Singapore Dollar <i>Singapore Dollar</i>
SIMAN	Sistem Manajemen Aset Negara <i>State Asset Management System</i>
SISPEKA	Sistem Informasi Penanganan Kejahatan Ekonomi <i>Statistical Data for Handling Economic Crimes</i>
SKP	Sasaran Kinerja Pegawai <i>Key Performance Indikator</i>
SNI ISO/IEC	"Standar Nasional Indonesia The International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission" <i>"Indonesian National Standard The International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission"</i>
SOP	Standar Operasional Prosedur <i>Standard Operational Procedure</i>
SPAK	Survei Persepsi Anti Korupsi <i>Anti Corruption Perception Survey</i>
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik <i>Electronic Based Government System</i>
SPI	Survei Penilaian Integritas <i>Integrity Assesment Survey</i>
SIPI	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah <i>Government Internal Control System</i>
SPKP	Survei Persepsi Kualitas Pelayanan <i>Service Quality Perception Survey</i>
SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik <i>Electronic Procurement System</i>
SRA	Sectoral Risk Assessment <i>Sectoral Risk Assessment</i>

SWI	Satgas Waspada Investasi <i>Investment Alert Task Force</i>
TA	Tahun Anggaran <i>Fiscal Year</i>
THB	Thai Baht <i>Thai Baht</i>
TI	Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>
TKM	Transaksi Keuangan Mencurigakan <i>Suspicious Financial Transactions</i>
TP	Tindak Pidana <i>Criminal Offense</i>
TPA	Tindak Pidana Asal <i>Predicate Crimes</i>
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme <i>Terrorism Financing Crimes</i>
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang <i>Money Laundering</i>
UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa <i>Goods/Services Procurement Work Unit</i>

Underlying	Kegiatan yang mendasari sebuah transaksi <i>Activities that underlie a transaction</i>
UPR	Unit Pemilik Risiko <i>Risk Unit Owner</i>
USD	United States Dollar <i>United States Dollar</i>
WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani <i>Clean and Serving Bureaucratic Area</i>
WBK	Wilayah Bebas Korupsi <i>Corruption Free Area</i>
WNA	Warga Negara Asing <i>Foreign Citizen</i>
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian <i>Unqualified Opinion</i>
ZI	Zona Integritas <i>Integrity Zones</i>
Fintech	Teknologi Finansial <i>Financial Technology</i>





INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat
Call Center 021-195
www.ppatk.go.id

